



PEMERINTAH
KOTA MAKASSAR

**Kota
Makassar**
Merajut Harmoni
Membangun Kebersamaan

RENCANA AKSI DAERAH

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH

KOTA MAKASSAR TAHUN 2025 - 2029





KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) untuk periode Tahun 2025-2029. Dokumen ini bukan sekadar sebuah rencana, melainkan perwujudan komitmen kuat Pemerintah Kota Makassar untuk memastikan setiap anak memiliki akses penuh terhadap pendidikan yang layak dan berkualitas.

RAD ini disusun dengan mengacu pada visi besar Kota Makassar, yaitu "Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan". Visi ini diterjemahkan ke dalam empat pilar pembangunan, dan RAD ini secara spesifik terkait erat dengan Pilar Unggul. Pilar ini menegaskan komitmen kita untuk menjadikan Makassar sebagai kota maju yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan dasar, termasuk pendidikan. Dengan fokus pada penanganan ATS, kita berupaya mengurangi angka putus sekolah dan memastikan anak-anak Makassar memiliki bekal terbaik untuk menghadapi tantangan masa depan.

Lebih lanjut, penyusunan RAD ini juga menerapkan prinsip Pilar Inklusif, yang mengedepankan kolaborasi dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Kami melibatkan berbagai pihak, mulai dari instansi pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, hingga sektor swasta. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dirancang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi riil di lapangan, serta mendapatkan dukungan penuh dari seluruh masyarakat.

Kami menyadari bahwa tantangan ATS sangat kompleks dan multidimensi. Oleh karena itu, RAD ini memuat strategi komprehensif, mulai dari langkah-langkah preventif untuk mencegah anak putus sekolah, hingga intervensi penanganan yang efektif bagi anak yang sudah tidak bersekolah. Semua ini dilakukan demi mewujudkan Pilar Berkelanjutan, yaitu memastikan program-program ini dapat berjalan secara efektif dan berkesinambungan, menciptakan fondasi yang kuat bagi generasi penerus.

Kami berharap, dokumen RAD ini dapat menjadi panduan yang solid dan inspiratif bagi seluruh pihak yang terlibat. Mari kita jadikan upaya ini sebagai ikhtiar bersama untuk membangun Makassar yang lebih baik, di mana tidak ada lagi anak yang tertinggal dalam meraih mimpi dan masa depannya.

Makassar, November 2025
Kepala Bappeda

H. Dahyal, S.Sos, M.Si

KATA SAMBUTAN

Walikota Makassar



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji Syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'la atas Nikmat dan karunia-Nya dan Atas nama Pemerintah Kota Makassar, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas tersusunnya Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) Tahun 2025-2029. Dokumen ini menjadi refleksi dari semangat gotong royong dan komitmen kita untuk membangun masa depan yang lebih cerah bagi anak-anak Kota Makassar.

Pendidikan menjadi investasi paling berharga bagi sebuah bangsa. Sebagaimana termaktub dalam visi pendidikan kita, yaitu "Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan", kita memiliki kewajiban moral untuk memastikan setiap anak dapat menikmati haknya atas Pendidikan. Rencana aksi ini menjadi implementasi nyata dari misi pertama, yakni Meningkatkan daya saing ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan pendidikan, khususnya pendidikan pesisir dan pulau. Dengan memberikan pendidikan yang layak, kita sedang mempersiapkan generasi yang unggul dan berdaya saing, yang akan menjadi motor penggerak ekonomi di masa depan.

Di sisi lain, RAD ini juga sangat sejalan dengan misi keenam, yaitu Meningkatkan akses pelayanan dan perlindungan pendidikan, anak, dan penyandang disabilitas. Anak-anak yang rentan, termasuk mereka yang berisiko putus sekolah, menjadi prioritas kita. Oleh karena itu, RAD ini memuat program-program yang bersifat inklusif dan Aman, memastikan tidak ada lagi anak yang terlupakan. Ini menjadi wujud nyata dari pilar Inklusif dan Aman, di mana kita menciptakan lingkungan yang mendukung dan melindungi anak-anak dari berbagai risiko.

Mari kita pastikan setiap anak di Kota Makassar merasa aman dan mendapatkan kesempatan yang sama untuk bersekolah. Ini menjadi tanggung jawab kita Sendiri. Saya mengajak seluruh elemen Pendidikan, orang tua, guru, aktivis Pendidikan, tenaga swadaya Pendidikan, dunia usaha, dan instansi pemerintah untuk bersinergi dan bergerak bersama.

Dengan kolaborasi yang kuat, saya yakin kita dapat mewujudkan Makassar sebagai kota yang berkelanjutan, di mana pendidikan menjadi fondasi utama bagi kemajuan dan kesejahteraan. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Makassar, November 2025
Walikota Makassar

Munafri Arifuddin

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Ketua Bappeda	II
Kata Sambutan Walikota	III
Daftar isi	IV
Daftar Grafik	V
Daftar Gambar	VI
Daftar Tabel	VII
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	4
1.3 Definisi dan kategori Anak Tidak Sekolah (ATS)	7
1.4 Keselarasan dokumen Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PPATS).....	8
1.5 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (PPATS).....	10
1.6 Ruang Lingkup	11
BAB II GAMBARAN UMUM, DEMOGRAFIS, GEOGRAFIS DAN LAYANAN AKSES PENDIDIKAN DI KOTA MAKASSAR	12
2.1 Kondisi Geografis dan Demografis	12
2.2 Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	15
2.3 Capaian Pembangunan Pendidikan	17
A Angka Partisipasi Sekolah dan Angka Partisipasi Murni	19
B Rata Rata Lama sekolah dan Harapan Lama Sekolah	22
2.4 Evaluasi Rencana Aksi Daerah 2022 – 2024	28
BAB III ANALISA SITUASI ANAK TIDAK SEKOLAH DAN STRATEGI PPATS	30
3.1 Program Penanganan Anak Tidak Sekolah	30
3.2 Situasi Anak Tidak Sekolah (ATS).....	31
3.3 Ketersediaan Sarana dan Prasarana	39
3.4 Permasalahan Anak Tidak Sekolah (ATS)	41
3.5 Issu Strategi PPATS	43
3.6 Strategi Nasional dan Arah Kebijakan	43
3.7 Sasaran Capaian Kolaborasi Lintas Sektor	46
BAB IV SASARAN, PROGRAM DAN RENCANA AKSI PPATS.....	49
4,1 Sasaran dan Target Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah ...	49
A Indikator Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah	50
B Sasaran Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah	51
C Tahapan Program Prioritas	54
4.2 Program, Kegiatan dan Anggaran	55
4.3 Aksi dan Peran Lembaga Terkait	79
4.4 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan	80
BAB V PENUTUP	83
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
1. Matriks dan Anggaran	
2. Format Monitoring dan Evaluasi RAD	
3. Daftar Istilah/Glosarium	
4. Tim Penyusun Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD)	

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.4	Indeks Pembangunan Manusia Kota Makassar Tahun 2022 – 2024	16
Grafik 2.5	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Jenis Kelamin di Kota Makassar Tahun 2022-2024	17
Grafik 2.7	Angka Partisipasi Sekolah (APS) sesuai kelompok usia	20
Grafik 2.8	Angka Partisipasi Murni (APM) sesuai kelompok usia	21
Grafik 2.9	Rata rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah	22
Grafik 2.10	Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin di Kota Makassar Tahun 2022-2024	23
Grafik 2.11	Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Jenis Kelamin d Kota Makassar tahun 2022 – 2024	23
Grafik 3.1	Jumlah ATS yang kembali ke layanan pendidikan formal dan non formal berdasarkan jenis keamin di Kota Makassar per tanggal 31 Agustus 2025	31
Grafik 3.2	Persentasi Anak Tidak Sekolah	32
Grafik 3.3	Jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) menurut kategori usia di Kota Makassar tahun 2024	32
Grafik 3.5	Proporsi status Anak Tidak Sekolah berdasarkan Dashboard Verval ATS	34
Grafik 3.6	Anak Tidak Sekolah berdasarkan kategori usia	35



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Administrasi Kota Makassar	13
------------	---------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Keselarasan Kerangka PPATS Tingkat Nasional, Provinsi dan Kota Makassar.....	9
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk menurut kelompok dan jenis kelamin	14
Tabel 2.3	Tingkat Pendidikan warga yang di tammatkan pada usia 15 tahun ke atas	15
Tabel 2.6	Ketiga Aspek Kebijakan Akses, Mutu, dan Tata Kelola	18
Tabel 2.7	Angka Partisipasi Sekolah (APS) sesuai kelompok Usia	20
Tabel 2.8	Angka Partisipasi Murni (APM) sesuai kelompok Usia	21
Tabel 2.12	Komponen Evaluasi Pelaksanaan dan target Capaian PATS	24
Tabel 2.13	Indikator Utama dan Proses	25
Tabel 3.4	Jumlah Anak Tidak Sekolah berdasarkan Dashboard Verval ATS Pusdatin	34
Tabel 3.7	Sebaran Anak Tidak Sekolah di setiap kecamatan.....	35
Tabel 3.8	Alasan Anak Tidak Sekolah di setiap kecamatan yang sudah di verifikasi	36
Tabel 3.9	Jumlah alasan ATS yang telah terverifikasi di Kota Makassar	37
Tabel 3.10	Data ATS berbasis kategori oleh OPD terkait	38
Tabel 3.11	Jumlah Warga/Anak Usia 0 -18 Tahun	39
Tabel 3.12	Sarana dan Prasarana satuan pendidikan semester Ganjil 2025/2026	39
Tabel 3.13	Kesesuaian daya tampung Rombel dan jumlah warga usia 7 – 18 tahun ..	41
Tabel 3.14	Sasaran capaian dan indikator pembangunan pendidikan lintas sektor	47
Tabel 4.1	Persentasi Penurunan Anak Tidak Sekolah (ATS)	50
Tabel 4.2	Capaian intermediate pelaksanaan RAD PPATS	51
Tabel 4.3	Sasaran dan Indikator PPATS	51
Tabel 4.4	Tahapan Program Prioritas PPATS	54
Tabel 4.5	Metode Intervensi Berdasarkan Alasan Anak Tidak Sekolah	55
Tabel 4.6	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Uraian Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PPATS) di Kota Makassar Tahun 2025-2029.....	60
Tabel 4.7	Aksi dan Target Capaian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Mendukung Pencegahan dan Penanganan ATS di Kota Makassar Tahun 2025-2029	79

BAB I

MAKASSAR UNGGUL, INKLUSIF, AMAN
DAN BERKELANJUTAN

I	Pendahuluan	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Dasar Hukum	4
1.3	Definisi dan Kategori Anak Tidak Sekolah (ATS)	7
1.4	Keselarasan Dokumen Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PPATS)	8
1.5	Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD)	10
1.6	Ruang Lingkup	11



Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Kota Makassar menyadari bahwa pembangunan yang berkelanjutan hanya bisa dicapai jika sumber daya manusia tersedia dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki mumpuni dalam berbagai aspek. Upaya Pembangunan tersebut hanya bisa dilakukan melalui kolaborasi dengan pemangku kepentingan dan mempunyai sasaran yang sama. Sasaran yang sama tersebut adalah upaya memastikan bahwa semua anak usia sekolah saat ini dapat menyelesaikan Pendidikan wajib belajar 13 tahun serta mendorong warga masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan akhir (Ijazah) sekolah menengah dapat menyelesaikan pendidikan menengah¹.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) periode 2025 – 2045 sudah mengamanahkan wajib belajar 13 tahun Dimana pada komponen transformasi sosial point 1 menyatakan Percepatan Wajib Belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah) serta

¹ Kebijakan Wajib Belajar di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 yang bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan, memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak, mengembangkan potensi diri, membantu anak-anak hidup mandiri, meningkatkan kualitas penduduk dan mendukung pertumbuhan ekonomi



efektifitas pengalokasian dan pemanfaatan anggaran khususnya wajib belajar setahun pra sekolah. Juga Pada muatan arah kebijakan peta jalan Pendidikan, pemerintah telah menetapkan 7 kerangka dasar yang salah satunya adalah Percepatan Wajib Belajar 13 tahun yang secara eksplisit mencantumkan Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah. Pemerintah pusat melalui Kementerian PPN/Bappenas telah memberikan panduan Strategi Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah (Stranas ATS) yang menjadi arah Pembangunan di daerah. Sasaran Anak Tidak Sekolah (ATS) difokuskan pada anak usia SD/MI sederajat (7-12 tahun), sekolah SMP/MTs sederajat (13-15 tahun), dan SMA/SMK/MA sederajat (16-18 tahun). Hal ini sejalan dengan capaian generasi Emas 2045, dimana pemerintah pusat telah menetapkan target usia menjadi 6 – 18 tahun yaitu setahun pra sekolah dalam Upaya pencapaian Wajib Belajar 13 tahun. Sejalan dengan kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2025 – 2045, yang mana dalam RPJPD tersebut memiliki 3 (tiga) arah pembangunan yaitu (1) Kesehatan untuk Semua, (2) Pendidikan Berkualitas yang Merata, dan (3) Perlindungan Sosial yang Adaptif.

Sebagai bagian dari pemerintahan secara menyeluruh, pemerintah Kota Makassar senantiasa melakukan sinergitas perencanaan, capaian dan target dari pemerintah pusat, provinsi untuk diterjemahkan secara operasional pada level Masyarakat.

Dalam RPJMD Pemerintah Kota Makassar periode 2020-2024, telah digambarkan kemajuan – kemajuan dalam pengembangan sumber daya manusia. Hal tersebut terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami kenaikan sebesar 3,5 poin dari 81,73 poin pada tahun 2020 menjadi 85,73 poin tahun 2024. Salah satu perhitungan indikator komposit IPM tersebut adalah Tingkat perkembangan Pendidikan yang dihitung dari rata rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Kedua Indikator tersebut telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dimana harapan lama sekolah pada tahun 2020 besaran 15,57 tahun Menjadi 15,62 tahun pada tahun 2024 serta rata rata lama sekolah telah mencapai 11.57 tahun pada tahun 2024 dari 11.21 tahun pada tahun 2020 (RPJMD, hal 64)².

Namun Demikian masih banyak tantangan yang dihadapi khususnya pada peningkatan akses ke layanan pendidikan dimana setiap anak dapat menyelesaikan pendidikannya pada sekolah menengah atas serta pemerintah menetapkan target Standard Pelayanan Minimal (SPM) adalah 100 %. Hal ini terlihat pada Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada usia 7-12 tahun sebesar 99,60 %, usia 13 – 15 tahun sebesar 96,86 % dan usia 16

² RPJMD Kota Makassar 2025-2029; Rata rata lama sekolah pada perhitungan IPM yaitu rata-rata jumlah tahun penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah menempuh pendidikan formal.



– 18 tahun sebesar 75,03 %³. Melihat data tersebut, semakin tinggi usia, tingkat penyelesaian pendidikan menengah ke atas menurun.

Dengan demikian, ketidakcapaian menjadi 100 % memperlihatkan banyak anak yang belum menyelesaikan Pendidikan tertinggi mereka (menengah 12 tahun) sehingga masuk kategori Anak Tidak Sekolah (ATS). Banyaknya ATS ini dipengaruhi oleh beberapa factor sehingga memberikan pengaruh pada belum tercapaian standar pelayanan minimal (SPM) yang dipersyaratkan. Belum tercapainya dikarenakan oleh;

1. Faktor ekonomi meliputi tingkat pendapatan Masyarakat khususnya pada kelompok rentan sehingga anak mereka tidak bisa bersekolah. Disamping itu dikarenakan Tingkat Pendidikan orang tua.
2. Akses terhadap layanan Pendidikan. Pada jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD) hampir setiap wilayah sudah dapat di akses namun pada jenjang SMP dan SMA ini yang masih tidak terdistribusi dengan baik sehingga banyak anak yang tidak mendapat akses.
3. Faktor budaya dan lingkungan. Tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian besar anak usia sekolah tidak bersekolah bukan karena biaya, namun lebih pada pergaulan lingkungan, kondisi ekonom orang tua yang melihat anaknya sudah bisa menghasilkan uang

Sebuah studi yang dilakukan oleh UNICEF tentang Anak Tidak Sekolah (ATS) di Indonesia mengidentifikasi berbagai faktor penyebab sehingga anak dan remaja usia sekolah di Indonesia tidak bersekolah. Faktor-faktor tersebut terkait dengan keterpencilan daerah tempat tinggal mereka, ketertinggalan atau kesenjangan pembangunan daerah, kemiskinan dan latar belakang ekonomi keluarga, serta

Masih belum memadainya layanan pendidikan untuk anak rentan seperti anak penyandang disabilitas. Studi ini juga mengidentifikasi bahwa masih banyak tantangan dari segi pemberian layanan pendidikan dan pelatihan, baik dari segi ketersediaan mau pun kualitas dan relevansinya⁴.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) periode 2025-2029, Pemerintah Kota Makassar secara jelas telah menjadikan Anak Tidak Sekolah (ATS) sebagai priorotas. Pada komponen RPJMD Sasaran 2.1.1: Meningkatnya Kualitas Dan Aksesibilitas, salah satu strateginya adalah peningkatan angka partisipasi sekolah dengan mengembalikan Anak Tidak Sekolah

³ Statistik Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Volume 10,2025

⁴ Stranas ATS di Indonesia, Kementerian PPB/ Bappenas – hal 5, UNICEF, Global Initiative on Out of School Children: Indonesia Case Study, 2015



dan Anak Putus Sekolah dengan pemberian bantuan Pendidikan (strategi 7). Demikian juga pada sasaran 6.1.2: Meningkatnya Kualitas Perlindungan Anak, dengan strategi memperkuat sistem perlindungan anak secara menyeluruh, berkelanjutan dan berbasis hak anak, dengan menjamin anak yang berstatus ATS dan APS untuk kembali bersekolah (strategi 5)⁵.

Melihat berbagai capaian dan tantangan tersebut, Pemerintah Kota Makassar bersama pemangku kepentingan lainnya akan mendorong dan senantiasa melakukan kolaborasi perencanaan dan penganggaran yang lebih luas khususnya pada sektor swasta serta mengoptimalkan potensi yang sudah berjalan. Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan Anak Sekolah (RAD PPATS) akan mendorong semua pihak dan merumuskan secara detail sasaran/target dan kegiatan pertahun untuk memudahkan kolaborasi lintas sektor serta penguatan rencana kerja tahunan setiap perangkat daerah terkait.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Aksi Daerah dalam Penanganan dan Pencegahan Anak Tidak Sekolah (PPATS) di Kota Makassar periode 2025-2029 adalah sebagai berikut;

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Penjelasan dalam Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235).
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 279).
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. UU Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90).

- 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal (PMU), (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 87).
 10. Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2).
 11. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341).
 12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019 (terkait pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3).
 13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136).
 14. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
 15. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif.
 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 871).
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara tahun 2017 Nomor 1312).
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139).
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
 20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No 2 Tahun 2017 tentang Pendidikan Wajb Belajar 12 Tahun (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 2) Nomor Registrasi Peraturan Daerah Pertarun Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (2-74/2017).
 21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan peraturan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2032 (Lembaran daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1) Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (1-34/2021).
 22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 – 2045.
 23. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (RA-PPATS), (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 71).
 24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2024.
 25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029.
 26. Pergub No 5 Tahun 2023 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI).

- 
27. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2019 Nomor 1).
 28. Peraturan daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2029.
 29. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1740/X/TAHUN 2025 Tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 - 2029
 30. Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (*UN Convention on the Rights of the Child*).
 31. Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities*).
 32. Konvensi PBB tentang Penghapusan Diskriminasi Perempuan (*UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*)

1.3. Definisi dan kategori Anak Tidak Sekolah (ATS)

Strategi Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah (Stranas ATS) ini bertujuan untuk memastikan adanya penguatan, perbaikan, perluasan, serta koordinasi yang lebih baik dan efektif dari berbagai program dan inisiatif pemerintah dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan pelatihan anak-anak di Indonesia. Stranas ATS ini berfokus pada berbagai kelompok anak usia 7 – 18 tahun yang menjadi sasaran penerima manfaat berbagai program, termasuk didalamnya kelompok anak rentan, seperti anak penyandang disabilitas, serta anak-anak yang berada di daerah 3T. Strategi Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah (Stranas ATS) memberikan definisi Anak Tidak Sekolah (ATS) adalah anak usia sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas (7-18 tahun) yang terdiri dari kategori;

1. tidak pernah bersekolah baik di jenjang SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat, atau SMA/MA sederajat
2. putus sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikannya (putus sekolah di tengah tengah jenjang SD, SMP, atau SM)
3. lulus sekolah tanpa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (transisi dari jenjang SD ke jenjang SMP atau dari jenjang SMP ke jenjang SMA)

Strategi Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah mengelompokkan Anak Tidak Sekolah berdasarkan kategori sebagai berikut;

1. Anak yang berada di daerah 3T

- 
2. Anak yang bekerja dan pekerja anak
 3. Anak penyandang disabilitas
 4. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH)
 5. Anak jalanan (Anjal) dan anak terlantar (Antar)
 6. Anak dalam pernikahan anak / ibu remaja
 7. Kelompok ATS lainnya.

Definisi: Kelompok ATS ini meliputi populasi ATS lainnya yang belum tercakup dalam pengelompokan di atas. Proporsi terbesar dari kelompok ATS ini adalah anak yang tidak bersekolah karena hambatan ekonomi atau sosial budaya namun mereka bukan pekerja anak atau anak bekerja, bukan penyandang disabilitas, bukan anak terlantar maupun anak jalanan, dan tidak sedang berhadapan dengan hukum. Kelompok ATS ini juga meliputi anak-anak yang secara ekonomi dan geografis mungkin mampu mengakses layanan pendidikan dan pelatihan, tetapi tetap memilih untuk tidak bersekolah atau mengikuti layanan pendidikan apa pun. Sebagian dari mereka memilih untuk tidak bersekolah karena adanya anggapan layanan pendidikan dan pelatihan yang ada tidak relevan dengan kehidupan mereka atau keluarganya. Selain itu, kelompok ATS ini juga meliputi anak yang berada dalam situasi rentan lainnya, seperti anak-anak Tenaga Kerja Indonesia yang tinggal di luar negeri, anak dalam situasi bencana, dan anak-anak yang menjadi korban pelecehan

1.4. Keselarasan dokumen Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PPATS)

Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PPATS) sejak diluncurkan secara Nasional pada Bulan Desember 2020 oleh Bappenas telah menjadi isu dan menjadi perhatian bagi pemangku kepentingan. Pemerintah pusat telah meminta kepada seluruh pemerintah daerah untuk menjadikan sebagai program prioritas. Program ini sebagai upaya untuk memastikan seluruh anak usia sekolah dapat menyelesaikan pendidikan mereka sampai pada jenjang pendidikan menengah. Pemerintah Kota Makassar dalam menyusun capaian pembangunan pendidikan senantiasa searah dan sejalan dalam mendukung capaian nasional dan provinsi. Dalam kerangka pembangunan pendidikan, pemerintah Kota Makassar secara eksplisit mencantumkan program Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PPATS) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) periode 2025 – 2029. Dalam mendukung program prioritas pemerintah pusat terkait Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah, pemerintah Kota Makassar telah

merumuskan dalam RPJMD. Tabel berikut menggambarkan kesesuaian program secara menyeluruh Nasional, Provinsi dan Kota Makassar;

Tabel 1.1 Keselarasan Kerangka PPATS tingkat Nasional, Provinsi dan Kota Makassar

Level	Keselarasn Dokumen	Kegiatan Prioritas/Sasaran/Strategi
Tingkat Nasional	RPJMN 2025 - 2029 Prioritas Nasional 4 ⁶	Kegiatan Prioritas (KP); Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah
		Sasaran 01; Tercapainya penurunan kasus anak putus sekolah dan anak tidak sekolah
		Sasaran 2: Meningkatnya kualitas pendidikan untuk semua secara merata dan inklusif
		Strategi 5: Penanganan anak tidak usia sekolah berbasis wilayah secara kolaboratif, termasuk pemberian bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu sebagai upaya pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah
		Sasaran 5: Meningkatnya kualitas generasi muda dan kesetaraan gender
Propinsi Sulawesi Selatan	RPJMD 2025-2029	Strategi 2: Penguatan system perlindungan anak secara efektif dan kolaboratif oleh Pemerintah dan Non Pemerintah dalam rangka pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak;
		Sasaran 9: Meningkatnya pembangunan perdesaan
		Starategi 1. Peningkatan peran dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dalam pemenuhan layanan dasar masyarakat desa;
		Strategi 7. Mendorong optimalisasi penggunaan dana desa yang tepat sasaran, transparan, dan partisipatif untuk mendukung prioritas pembangunan desa
		Tujuan 2.1 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
Kota Makassar	RPJMD Kota Makassar	Sasaran 2.1.1 : Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan
		Strategi 1. Peningkatan kualitas layanan pendidikan dasar dengan pemberian seragam gratis untuk siswa SD dan SMP di Kota Makassar
		Strategi 4 Penyediaan insentif bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SD dan SMP yang bertugas di wilayah kepulauan
		Strategi 7 Peningkatan angka partisipasi sekolah dengan mengembalikan Anak Tidak Sekolah dan Anak Putus

⁶ Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, lampiran II

		Sekolah dengan pemberian bantuan pendidikan Arah Kebijakan; Mengoptimalkan Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan serta penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas baik sistem pendidikan maupun peningkatan kualitas tenaga pendidik Sasaran 6.1.2: Meningkatnya Kualitas Perlindungan Anak Strategi 5 : Memperkuat sistem perlindungan anak secara menyeluruh, berkelanjutan, dan berbasis hak anak. Dengan Menjamin anak yang berstatus ATS dan APS untuk kembali bersekolah Srategi 6. Penguatan kebijakan dan regulasi Perlindungan Anak dan sistem hukum terkait tindak kekerasan dan eksploitasi anak. Arah kebijakan: Memperkuat sistem perlindungan anak secara menyeluruh, Berkelanjutan, dan berbasis hak anak
--	--	--

1.5. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD)

Maksud dari Rencana Aksi Daerah ini adalah:

1. Sebagai bahan dalam penyusunan atau mereview perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan perangkat daerah serta lembaga lainnya terkait Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS) dan Anak Beresiko Putus Sekolah (ABPS) sebagai upaya mencapai target perencanaan pembangunan daerah;
2. Mengidentifikasi, memetakan dan mengkolaborasikan peran dan tanggung jawab perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya yang berkontribusi terhadap Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS) dan Anak Beresiko Putus Sekolah (ABPS).
3. Menjadi referensi bagi pemangku kepentingan terlibat secara aktif dalam Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PPATS).

Tujuan dari Rencana Aksi Daerah ini adalah:

1. Memberikan gambaran pembangunan sektor pendidikan terkait dengan akses ke layanan Pendidikan di Kota Makassar;
2. Menjelaskan sasaran, strategi, dan program kegiatan dalam upaya Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS) dan Anak Beresiko Putus Sekolah (ABPS);
3. Memastikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara terintegrasi dalam Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS) dan Anak Beresiko Putus Sekolah (ABPS) melalui aksi kolaborasi;

- 
4. Mempercepat tercapainya program Wajib Belajar 13 Tahun
 5. Mendorong pemerintah Kota Makassar mampu melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS) dan Anak Beresiko Putus Sekolah (ABPS) secara menyeluruh, terstruktur dan terpadu dalam pemenuhan standar pelayanan minimal termasuk penganggaran; dan
 6. Mendorong masyarakat Kota Makassar mampu dan dapat berpartisipasi secara aktif dalam mendukung Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS) dan Anak Beresiko Putus Sekolah (ABPS)

1.6. Ruang Lingkup

Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PPATS) meliputi;

1. Perkembangan Pembangunan Pendidikan di kota makassar dengan melihat indicator capaian khususnya akses ke layanan pendidikan.
2. Anak tidak sekolah pada kelompok usi 6 – 18 tahun yang belum pernah bersekolah, putus sekolah dan lulus tidak melanjutkan.
3. Jenjang pendidikan tertinggi warga pada usia 19 tahun ke atas yang belum menyelesaikan jenjang pendidikan menengah mereka.
4. Alasan anak tidak sekolah dan upaya pencegahan pada layanan Pendidikan saat ini
5. Layanan Pendidikan non-formal

BAB II

SEKALI LAYAR BERKEMBANG
PANTANG BIDUK SURUT KE PANTAI

II	Gambaran Umum Geografis, Demografis dan Layanan Akses Pendidikan di Kota Makassar	12
2.1	Kondisi Geografi dan Demografis	12
2.2	Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	15
2.3	Capaian Pembangunan pendidikan	17
A	Angka Partisipasi Sekolah dan Angka Partisipasi Murni	19
B	Rata Rata Lama Sekolah dan Harapan lama Sekolah	22
2.4	Evaluasi Rencana Aksi Daerah 2022 - 2024	28



Gambaran Umum Geografis, Demografis dan Layanan Akses Pendidikan di Kota Makassar

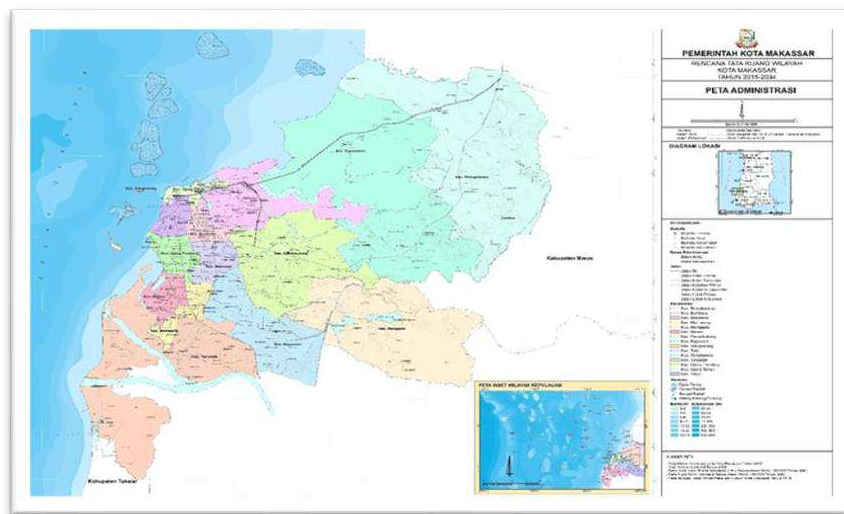
2.1 Kondisi Geografis dan Demografis

A. Geografis

Kota Makassar mempunyai luas wilayah 175,77 km persegi yang terletak di Pantai Barat Pulau Sulawesi dan berada pada titik koordinat 119° 18' 29,038" - 119°32'35,781" BT dan 5°8'6' 19" LS. Sesuai dengan karakteristik fisik dan perkembangannya. Batas-batas wilayah administratif Kota Makassar mencakup : Sebelah Utara Kabupaten Maros Sebelah Selatan : Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar Sebelah Timur : Kabupaten Gowa dan Maros Sebelah Barat : Selat Makassar Secara administratif, Kota Makassar terbagi atas 15 kecamatan dan 153 kelurahan. Bagian utara Kota Makassar terdiri atas Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Tallo, Kecamatan Ujung Tanah, dan Kecamatan Sangkarrang. Di bagian Selatan terdiri atas Kecamatan

Tamalate Dan Kecamatan Rappocini. Di bagian timur terbagi atas Kecamatan Manggala dan Kecamatan Panakkukang Bagian Barat terdapat Kecamatan Wajo, Bontoala, Ujung Pandang, Makassar, Mamajang, dan Mariso, Selain wilayah daratan. Kota Makassar yang memiliki wilayah Kepulauan di sepanjang garis Pantai Kota Makassar. Pulau ini merupakan 12 gugusan pulau- pulau karang yang disebut Pulau-Pulau Pabbiringa tau lebih dikenal sebagai Kepulauan Spermonde, secara administratif 15 Kecamatan di Kota Makassar dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kota Makassar



Sumber: Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015
Tentang RT RW Kota Makassar 2015-2034

B. Demografis

Kota Makassar sebagai ibukota provinsi dituntut untuk memberikan layanan yang paripurna dimana akses Pendidikan menjadi hal utama. Namun demikian, tantangan utamanya adalah banyak penduduk ke makassar namun tidak ber KTP Makassar namun tetap harus mendapat perhatian terkait akses pendidikan. Table berikut memperlihatkan penduduk Kota Makassar pada tahun 2024 (BPS, Kota Makassar dalam angka 2025)

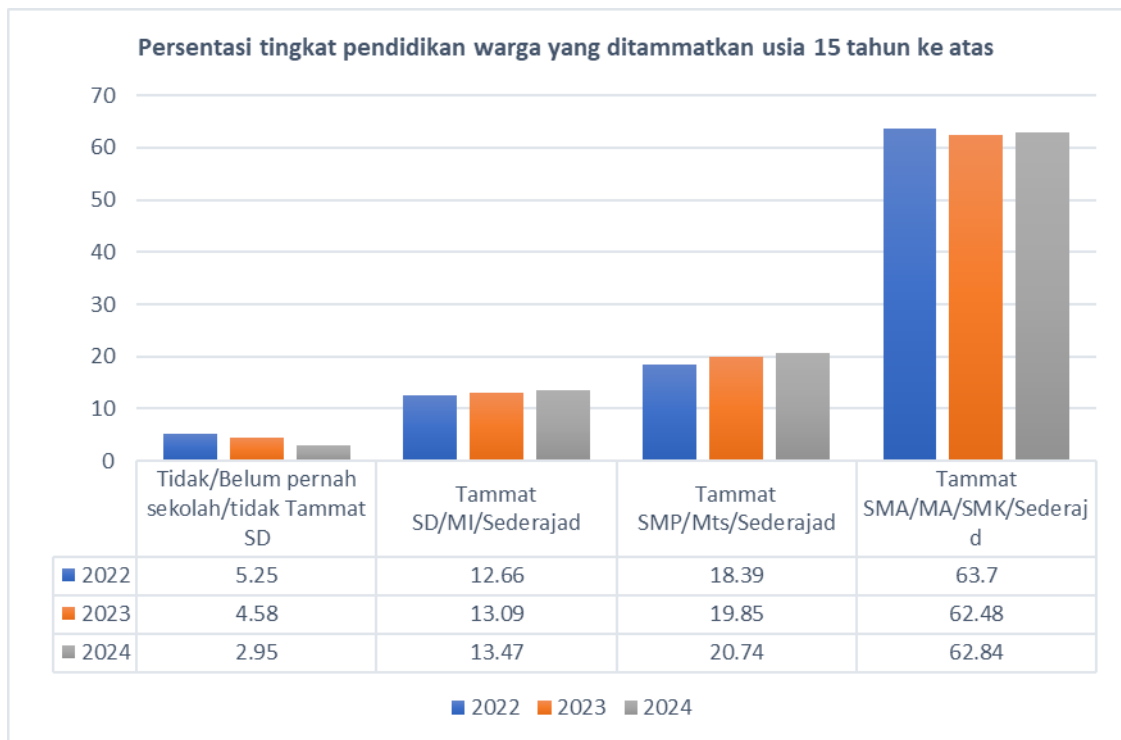
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk menurut kelompok usia dan jenis kelamin

Kelompok Umur	Penduduk (Laki-Laki) (Ribuan)	Penduduk (Perempuan) (Ribuan)	Penduduk (Laki-Laki + Perempuan) (Ribuan)
0-4	46,995	43,598	90,593
5-9	67,673	62,832	130,505
10-14	68,702	64,158	132,860
15-19	70,264	65,539	135,803
20-24	66,361	63,722	130,083
25-29	60,521	59,365	119,886
30-34	58,863	58,389	117,252
35-39	55,178	54,802	109,980
40-44	51,597	54,357	105,954
45-49	45,906	48,961	94,867
50-54	40,333	44,495	84,828
55-59	34,029	38,794	72,823
60-64	25,376	29,552	54,928
65-69	18,171	21,303	39,474
70-74	11,608	14,545	26,153
75+	12,431	19,441	31,872
Jumlah	734,008	743,853	1,477,861

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa jumlah anak usia sekolah 5 – 19 tahun berada pada kisaran 399,168 jiwa atau sekitar 27 % dari total jiwa. Dan usia intervensi dalam rangka pengembangan anak usia dini untuk mempersiapkan masuk pada usia sekolah pada kisaran 90,593 jiwa atau sekitar 6,1 %.

Sebagai ibukota provinsi dan menjadi pusat pertumbuhan dan pencarian lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia menjadi hal utama. Salah satu yang menjadi perhatian pemerintah adalah tingkat pendidikan warga. Tabel dan grafik berikut memperlihatkan Tingkat Pendidikan warga Kota Makassar yang ditamatkan pada usia 15 tahun ke atas sebagai berikut;

Tabel 2. 3 Tingkat Pendidikan warga yang di tammatkan pada usia 15 tahun ke atas



Sumber data ; kontribusi BPS (hasil rekap data OPD, September 2025)

Data terlihat bahwa Persentasi Tingkat pendidikan warga yang ditamatkan pada semua jenjang Pendidikan mengalami peningkatan. Warga yang belum pernah sekolah/tidak tammat SD menurun dari 5,25 % (2022) menjadi 2,95 % (2024). Demikian pula pada warga yang sudah tammat SD (mempunyai ijazah SD/MI/Sederajad) mengalami peningkatan dari 12,66 % (2022) menjadi 13,47 % (2024), serta pada jenjang SMP/MTS/Sederajad dan SMA/MA/SMK/Sederajad. Artinya, kesadaran warga meningkat untuk menyekolahkan anaknya.

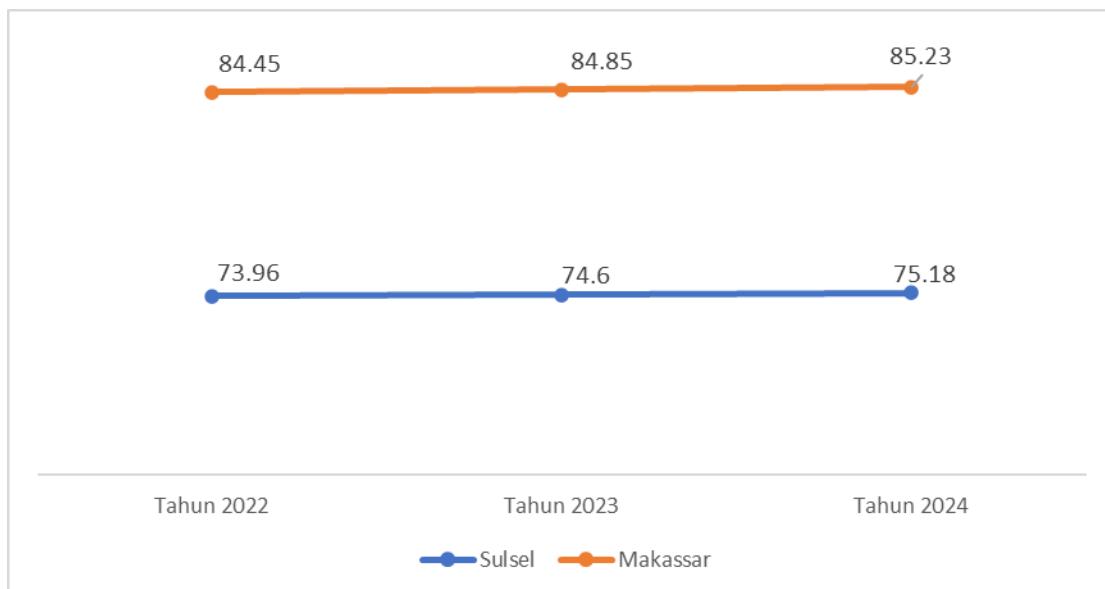
2.2 Capaian Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Peningkatan IPM menunjukkan perbaikan dalam kualitas hidup masyarakat, yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. yaitu :

- a. Umur Panjang dan Hidup Sehat (diukur melalui angka harapan hidup saat lahir)
- b. Pengetahuan (diukur melalui rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah)
- c. Standar Hidup Laya (diukur melalui pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Indeks Pembangunan Manusia di Kota Makassar terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada 3 tahun terakhir yaitu pada tahun 2024 mencapai 85,23 poin meningkat 0,38 poin dibandingkan capaian tahun sebelumnya 84.85 poin. Capaian ini diatas rata-rata nasional bahkan provinsi dan termasuk kategori tinggi, karena berada pada rentang nilai $80 \leq \text{IPM} < 90$.

Grafik 2.4 Indeks Pembangunan Manusia Kota Makassar Tahun 2022 – 2024

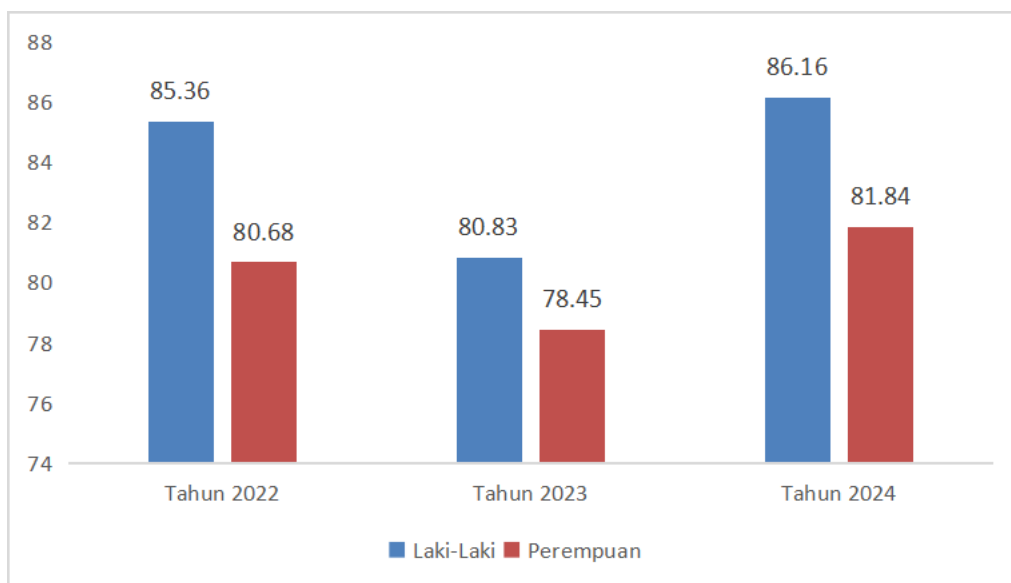


Sumber data : BPS Kota Makassar, 2022-2024

IPM Kota Makassar yang terus meningkat menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Makassar relatif lebih baik jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan. Namun demikian Pemerintah Kota Makassar perlu terus memberikan perhatian dan intervensi di berbagai sektor terutama di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi agar dapat lebih mempercepat laju peningkatan kualitas hidup manusia di tahun yang akan datang.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, maka terdapat ketimpangan capaian IPM laki-laki dan perempuan sebagaimana grafik berikut ini:

Grafik 2.5 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Jenis Kelamin
di Kota Makassar Tahun 2022-2024



Sumber data : BPS Prov. Sulsel, 2025

Grafik tersebut diatas menunjukkan bahwa IPM perempuan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (2022-2024) tertinggal dibanding laki-laki, hal ini dapat dipengaruhi oleh rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita yang masih rendah pada perempuan

2.3 Capaian Pembangunan Pendidikan

Dalam kerangka pembangunan Pendidikan, pemerintah pusat telah mendorong semua pemerintah daerah untuk melakukan kolaborasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan Pendidikan menuju pengembangan Pembangunan manusia yang berkelanjutan. Pengembangan tersebut yaitu “learning to know, learning to be, learning to live together, learning to do and learning to transform oneself and society” (www.unescobkk.org/education/esd-unit/definition-of-esd). Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mendorong dan memastikan tujuan Pembangunan yang berkelanjutan (Sustainability Development Goals -SDGs) tujuan 4 pendidikan tercapai sebagai komitmen global dan pemerintah Indonesia telah melakukan penandatanganan komitmen tersebut. *By 2030, memastikan semua anak laki dan perempuan menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah secara gratis, setara dan berkualitas yang mengarah pada hasil belajar*

yang relevan dan efektif. Apa yang dirumuskan dalam kerangka SDGs tersebut sejalan dengan UUD 1945 pasal 31 ayat (1) Setiap warga negara berhak mendapat Pendidikan.

Saat ini, pemerintah telah menetapkan kebijakan dengan menghadirkan program prioritas dalam mewujudkan Pendidikan bermutu untuk semua, salah satunya adalah Wajib Belajar 13 Tahun⁷. Ketiga kebijakan tersebut adalah Akses, Mutu dan Tata Kelola. Tabel Berikut menggambarkan ketiga aspek tersebut yaitu;

Tabel 2. 6 Ketiga Aspek Kebijakan Akses, Mutu, dam Tata Kelola

Aspek	Komponen	Penjelasan
AKSES	Partisipasi	Mencakup penanganan isu biaya Pendidikan (PIP), kesetaraan akses dan beasiswa afirmasi
	Daya Tampung	Menyediakan akses bagi wilayah tanpa satuan pendidikan dan wilayah kekurangan daya tampung.
	Anak Tidak Sekolah	Pencegahan Lanjut Tidak Melanjutkan dan Anak Putus Sekolah (Drop Out), serta mengembalikan ATS ke satuan pendidikan
MUTU	Hasil dan Proses Belajar	Peningkatan mutu dan proses hasil belajar serta Kurikulum yang terintegrasi dengan konteks lokal.
	Guru	Pemenuhan kebutuhan, Peningkatan mutu, Peningkatan kesejahteraan, Peningkatan jumlah dan mutu guru di daerah afirmasi 3T
	Infrastruktur	Pemenuhan infrastruktur untuk menunjang pembelajaran (Revitalisasi Sekolah)
	Penjaminan Mutu	Peningkatan Akreditasi
TATA KELOLA	Partisipasi Daerah	Peningkatan komitmen pemda, Sistem penjaminan mutu bagi satuan Pendidikan
	Partisipasi Orang Tua	Peningkatan pemahaman orang tua terkait pentingnya Pendidikan, Pelibatan



		Masyarakat dan mitra dalam implementasi wajib belajar
--	--	---

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Pendidikan merupakan aspek mendasar dan penting karena berfungsi sebagai alat ukur untuk mengevaluasi, memantau, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan, mulai dari input, proses, hingga output. Indikator ini membantu mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, merumuskan kebijakan yang lebih baik, dan memastikan pencapaian tujuan pendidikan nasional dan daerah.

Dalam kerangka Pembangunan Pendidikan dari sisi Akses, Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PPATS), Indikator Partisipasi Sekolah dan Angka Partisipasi Murni akan menjadi referensi utama.

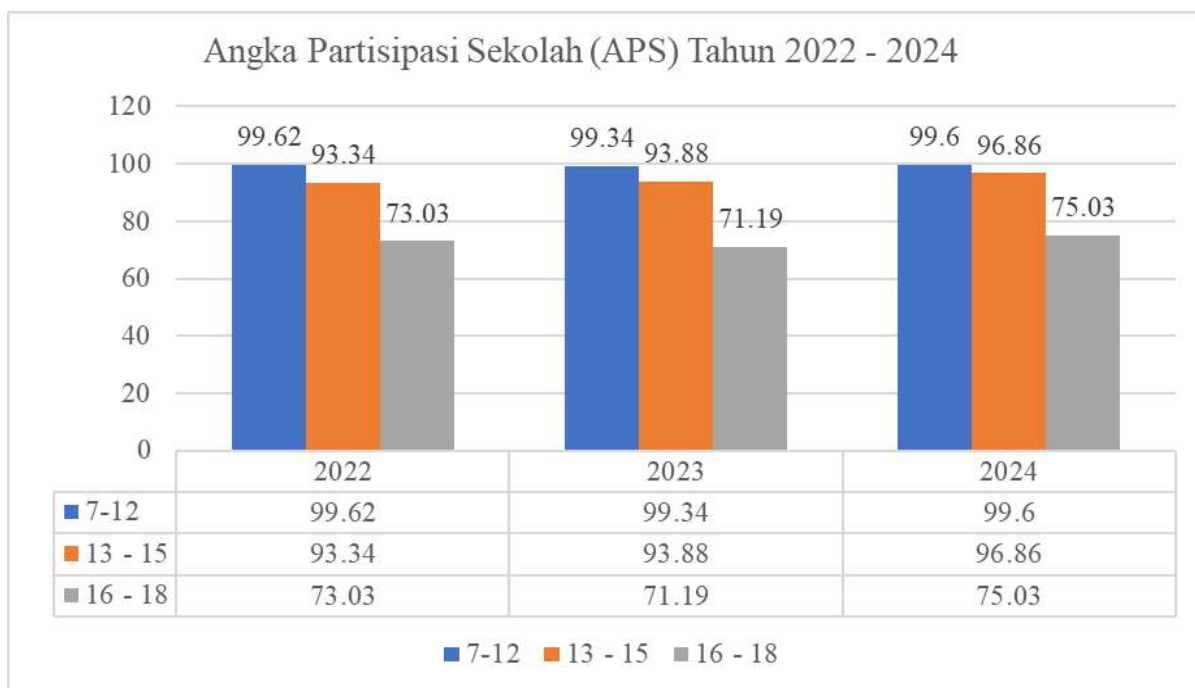
A. Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

Untuk melihat perkembangan tersebut, salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah layanan akses dan pemerataan pendidikan dimana pemerintah mendorong dan memastikan semua anak usia sekolah dan atau warga dapat penyelesaian pendidikan 13 tahun yaitu setahun pra sekolah dan pendidikan menengah 12 tahun. Pemerataan terhadap akses pendidikan di suatu wilayah dapat diukur melalui Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Kedua indikator tersebut berguna untuk melihat sejauhmana kelompok anak usia sekolah tersebut sudah dapat terakomodasi pada jenjang pendidikan dimana pun mereka berada dan sesuai kelompok usianya.

Angka Partisipasi Sekolah (APS), menunjukkan semakin tinggi capaian APS maka semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. APS menunjukkan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk kelompok umur tersebut.

Berikut⁸ adalah capaian akses yang dilihat dari partisipasi sekolah Kota Makassar sesuai usia mereka dan jenjang pendidikan mereka.

Grafik 2.7 Angka Partisipasi Sekolah (APS) sesuai kelompok usia



Sumber data: Statistik Sosial Sulawesi Selatan, volume 7, 2025

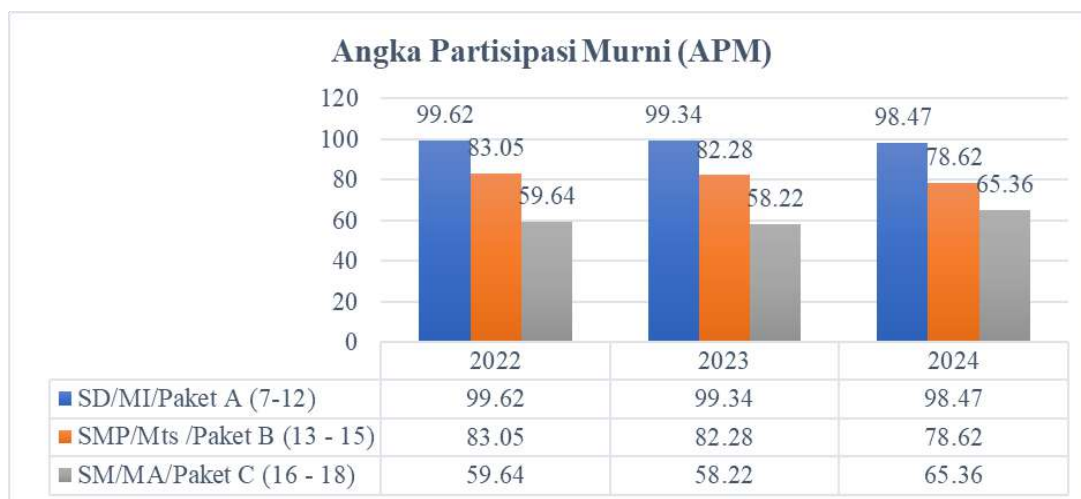
Melihat data diatas, kemajuan Pendidikan Kota Makassar dimana kelompok usia 7 – 12 walaupun mengalami fluktuasi perkembangannya namun terlihat bahwa hampir semua anak telah terakomodasi pada jenjang pendidikan atau bersekolah (99,6 % tahun 2024), namun pada kelompok usia 13 – 15 tahun, walaupun mengalami peningkatan dari 93.34 % pada tahun 2022 menjadi 96.86 % (2024) namun masih ada sekitar 3,14 % yang belum terdaftar atau bersekolah pada tahun 2024. Sama halnya dengan kelompok usia 16 – 18 tahun dimana pada tahun 2024 sekitar 75,03 % yang bersekolah atau meningkat sekitar 2 % dari tahun 2022 (73,03 %). Namun demikian, terlihat bahwa masih ada sekitar 24,97 % kelompok usia ini yang tidak bersekolah pada tahun 2024.

Disamping APS untuk mengukur capaian pembangunan terhadap akses pemerataan pendidikan tersebut, pemerintah juga menggunakan indikator Angka Partisipasi Murni (APM) sebagai pembanding untuk memastikan bahwa anak usia sekolah sesuai kelompok usianya terdaftar atau bersekolah pada jenjang pendidikan mereka. APM menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar

⁸ Statistik Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, Volume, 2025.

penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh.

Grafik 2.8 Angka Partisipasi Murni (APM) sesuai kelompok usia



Sumber data: Statistik Sosial Sulawesi Selatan, volume 7, 2025

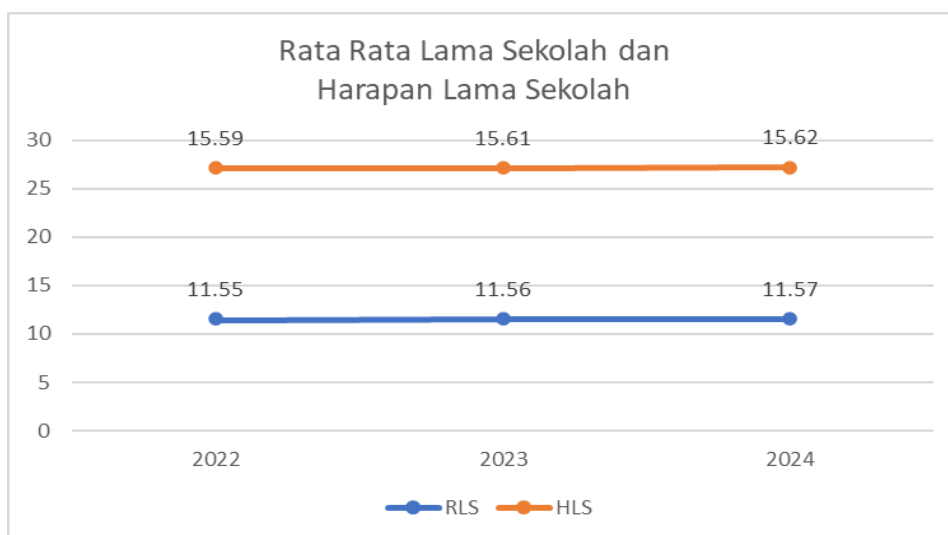
Tabel diatas memberikan pandangan bahwa anak usia sekolah 7-12 tahun yang bersekolah di Sekolah Dasar (SD) mengalami penurunan dari tahun ke tahun, walaupun hampir semua anak pada usia tersebut telah terdaftar pada satuan Pendidikan, atau masih ada sekitar 1,53 % anak usia tersebut yang belum terdaftar (tahun 2024). Demikian juga terlihat pada kelompok usia 13 – 15 tahun mengalami penurunan dari 83,05 % (2022) menjadi 78,62 % (2024) sedangkan usia 16 – 18 tahun mengalami peningkatan dari 59,64 % (2022) menjadi 65,36 % (2024). Mempelajari angka diatas, terlihat bahwa kelompok usia di atas 15 tahun yang masih banyak tidak melanjutkan/tidak bersekolah sesuai dengan usia dan jenjang Pendidikan mereka. Namun kelompok usia 16 – 18 tahun yang banyak tidak bersekolah pada satuan pendidikan sekolah menengah (SM) yaitu sekitar 34,64 % dari yang seharusnya mereka bersekolah sesuai dengan usianya.

B. Rata Rata Lama Sekolah (RL) dan Harapan Lama Sekolah (HLS)

Tingkat partisipasi sekolah dan kemampuan menyelesaikan pendidikan tertinggi warga akan memberikan dampak pada peningkatan rata rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Sebagai mana pada perhitungan Biro Pusat Statistik bahwa rata rata lama sekolah dihitung pada usia 25 tahun keatas. Perhitungan ini menjadi penetapan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pertimbangannya adalah pada kelompok usia tersebut

diasumsikan bahwa semua warga sudah menyelesaikan semua jenjang pendidikan mereka. Berikut adalah rata rata lama sekolah Kota Makassar ;

Grafik 2. 9 Rata rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

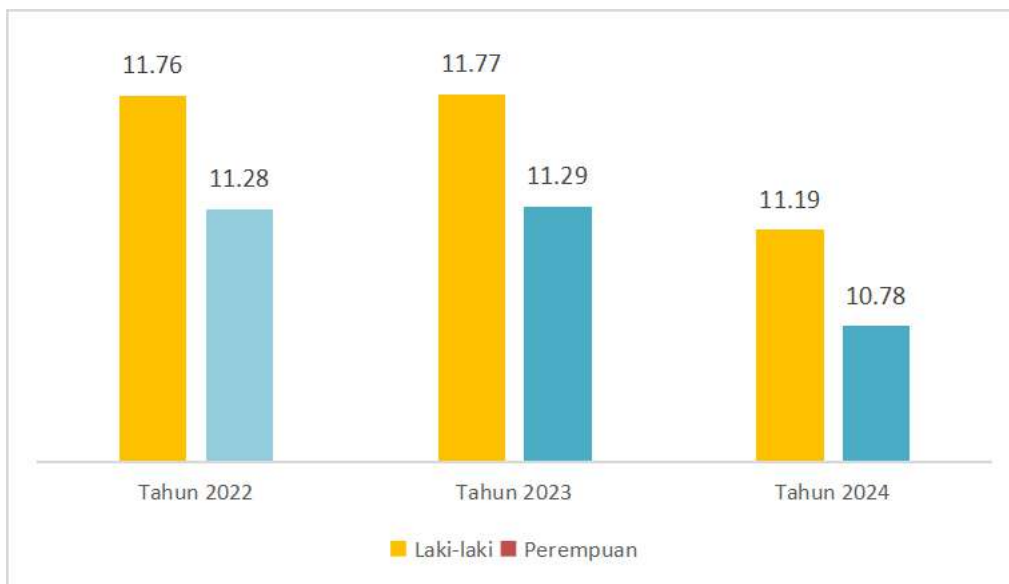


Sumber data: Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, volume 10 2025

Tabel di atas memperlihatkan bahwa Tingkat Pendidikan yang ditamatkan oleh warga Kota Makassar adalah 11.57 tahun, artinya warga sudah mencapai Pendidikan menengah kelas 11 semester dua atau sudah hampir tamat sekolah menengah (12 tahun) atau membutuhkan 0,43 tahun untuk menyelesaikan Pendidikan 12 tahun atau rata rata tingkat Pendidikan tertinggi 12 tahun di Kota Makassar. Demikian juga dengan harapan lama sekolah 15,62 tahun dimana warga yang berusia 7 tahun saat ini harapannya sudah dapat menyelesaikan pendidikan mereka minimal Diploma 3 atau S1 pada perguruan tinggi.

Jika dilihat dari perspektif gender, maka RLS laki-laki dan perempuan mengalami kesenjangan. Capaian RLS perempuan di Kota Makassar dari tahun 2022 sampai dengan 2024 lebih rendah dibanding laki-laki, faktor yang dapat mempengaruhi antara lain, perkawinan anak, kemiskinan, adanya anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, memilih untuk bekerja membantu orang tua, pengaruh lingkungan dan lain sebagainya., seperti pada grafik dibawah ini.

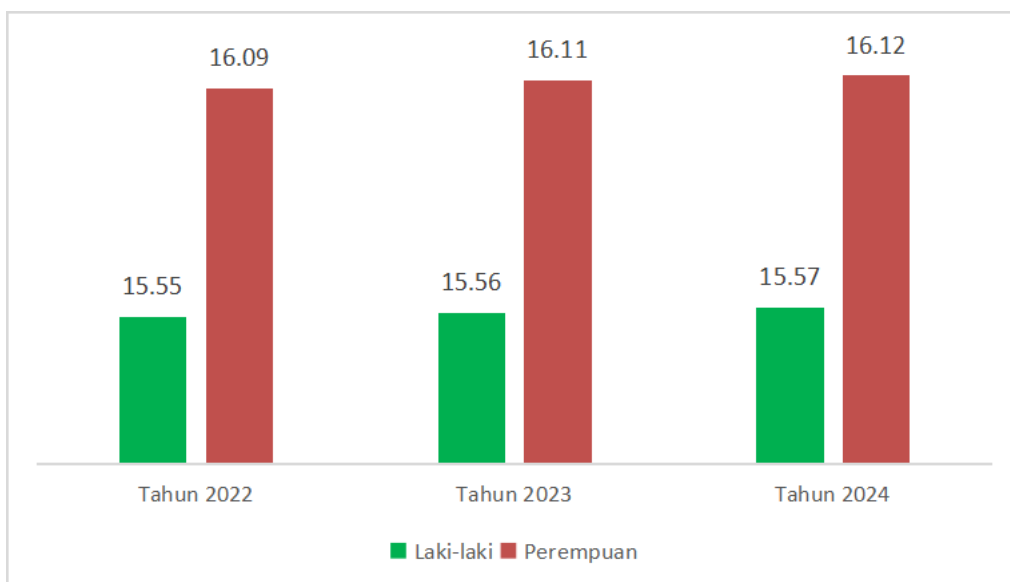
Grafik 2.10 Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin di Kota Makassar Tahun 2022-2024



Sumber data : BPS Prov. Sulsel, 2025

Hal yang sama juga terlihat pada HLS yang juga mengalami kesenjangan gender pada grafik berikut :

Grafik 2. 11 Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Jenis Kelamin d Kota Makassar tahun 2022-2024



Sumber data : BPS Prov. Sulsel, 2025

Grafik tersebut menunjukkan bahwa HLS laki-laki lebih rendah daripada perempuan, perempuan lebih bnyak mempunyai harapan untuk melanjutkan pendidikan hingga bangku perkuliahan tahun keempat.

2.4 Evaluasi hasil Rencana Aksi Daerah periode 2022 - 2024

a) Evaluasi pelaksanaan dan target capaian PATS

Evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu;

1. Program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Evaluasi ini dilakukan dengan melakukan FGD dengan pemangku kepentingan untuk mengetahui aksi yang dilakukan dalam upaya mendorong penurunan angka anak tidak sekolah. Komponen evaluasi sebagai Berikut;

Tabel 2.12 Komponen Evaluasi Pelaksanaan dan target Capaian PATS

No	Komponen evaluasi		Capaian
	Tahap Pelaksanaan RAD PATS		
1	Penyelarasan RAD ATS dengan dokumen Perencanaan dan penganggaran Pembangunan daerah		RAD pada periode sebelumnya belum secara optimal terencana dengan baik. Namun pada periode RPJMD 2025-2029, isu ATS sudah menjadi prioritas dalam Perencanaan dan dilakukan secara kolaboratif.
2	Pelaksanaan program dan kegiatan dan mengawal kegiatan yang sudah direncanakan dan dianggarkan		OPD terkait secara spesifik belum teranggarkan namun isu ATS sudah menjadi salah satu pembahasan secara terintegrasi dengan kegiatan kegiatan lainnya seperti saat pertemuan dengan kelompok Masyarakat dan juga pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan secara terkoordinasi masih diantisipasi oleh Bappeda dengan melakukan Gerakan kolaborasi dengan unsur lainnya seperti Baznas, CSR untuk

			berpartisipasi dalam Penanganan Anak Tidak Sekolah.
3	Implementasi RAD di Tingkat kecamatan dan desa/kelurahan dan melakukan pendampingan serta pengembangan kapasitas pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan		Belum terlaksana secara optimal kecuali di 4 kelurahan yaitu Tamangapa, Lembo, Barombong dan Rappocini sebagai model pendampingan dari Pemerintah Provinsi atas dukungan UNICEF bersama mitra lokal LemINA.
4	Melakukan pemantauan dan revisi sederhana pelaksanaan sejumlah aksi prioritas yang sudah ditetapkan		Pemantauan belum dilakukan secara optimal.
5	Evaluasi Aksi Aksi Peran OPD terkait (Aksi I-Aksi V) pada tingkat kota		Beberapa aksi aksi sudah terlaksana khususnya pada komponen data walaupun masih terbatas, peningkatan kesadaran Masyarakat secara terbatas. Beberapa Aksi belum dilaksanakan oleh OPD terkait.
6	Evaluasi Aksi Aksi Peran OPD terkait (Aksi I & II) pada tingkat kecamatan dan kelurahan		Belum optimal berjalan. Walaupun pendataan secara lokal sudah dilakukan namun aksi menganani ATS belum berjalan optimal.

2. Capaian utama ATS setelah intervensi OPD terkait.

Tabel 2.13 Indikator Utama dan Proses

No	Indikator utama dan proses	Capaian
1	Pengurangan jumlah ATS	
a	Asumsi ATS 15.300 (100 ATS per kelurahan)	Tidak tercapai
b	ATS ⁹ di 4 kelurahan lokus teridentifikasi dan kembali ke sekolah minimal 75 % dan mendapat pelatihan	Berdasarkan data SIPBM yang ditarik pada 6 Oktober 2022: a. Kelurahan Tamangapa: - Jumlah keluarga terdaftar: 2.668 KK

		- Jumlah keluarga yang diverifikasi: 2.624 KK - Data ATS: 30 anak - Jumlah anak putus sekolah yang ingin kembali ke layanan pendidikan: 15 anak (8 laki-laki, 7 perempuan). - Rinciannya adalah sebagai berikut: 1. Sekolah Menengah Pertama: 4 anak. 2. Paket A: 4 anak. 3. Paket B: 4 anak. 4. Paket C: 3 anak. b. Kelurahan Lembo - Jumlah keluarga terdaftar: 1.791 KK - Jumlah keluarga yang diverifikasi: 1.761 KK - Data ATS: 148 anak - Jumlah anak putus sekolah yang telah kembali ke sekolah di SMPN 51 Makassar: 1 anak. - Jumlah anak putus sekolah yang ingin kembali ke layanan pendidikan: 30 anak (15 laki-laki, 15 perempuan). - Rinciannya adalah sebagai berikut: 1. Sekolah dasar: 5 anak. 2. Sekolah Menengah Pertama: 1 Anak. 3. Sekolah Menengah Atas: 4 anak. 4. Paket A: 3 anak. 5. Paket B: 10 anak. 6. Paket C: 7 anak. c. Kelurahan Barombong: - Jumlah keluarga terdaftar: 1.682 KK - Jumlah keluarga yang diverifikasi: 1.562 KK - Data ATS: 44 anak - Jumlah ATS yang telah kembali ke sekolah di PKBM Attarim Makassar: 14 anak.
--	--	--

		- Jumlah anak putus sekolah yang telah kembali ke sekolah di SMPN 15 Makassar: 1 anak. - Jumlah anak tidak sekolah yang ingin kembali ke layanan pendidikan: 15 anak (10 laki-laki, 5 perempuan). - Rinciannya adalah sebagai berikut: 1. Sekolah Menengah Pertama: 1 Anak. 2. Paket B: 4 anak. 3. Paket C: 10 anak. d. Kelurahan Rappocini: - Jumlah keluarga terdaftar: 720 KK - Jumlah keluarga yang diverifikasi: 524 KK - Data ATS: 35 anak - Jumlah ATS yang ingin untuk kembali ke layanan pendidikan: 26 anak (14 laki-laki, 12 perempuan). - Rinciannya adalah sebagai berikut: 1. Sekolah dasar: 2 Anak. 2. Pusat pelatihan kerja: 2 anak. 3. Paket A: 5 anak. 4. Paket B: 6 anak. 5. Paket C: 11 anak.
2	Keberadaan dan efektifitas program dan kegiatan untuk penanganan ATS	Program penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Makassar meliputi pendataan melalui Sikolaki, pendidikan kesetaraan di PKBM, beasiswa bagi keluarga rentan, serta pendekatan komunitas melalui lorong sebagai titik pendampingan. Program ini efektif pada tahap identifikasi dan menyediakan jalur kembali bersekolah, terbukti dari peserta PKBM yang mendapatkan ijazah kesetaraan. Namun efektivitas masih terhambat faktor ekonomi keluarga,

		kapasitas PKBM yang bervariasi, serta koordinasi lintas dinas yang belum optimal. Penguatan data terpadu, dukungan sosial-ekonomi, dan monitoring outcome diperlukan untuk meningkatkan keberhasilan penanganan ATS di Makassar
a	Semua kelurahan yang belum intervensi melakukan pendataan ATS berbasis by name by address (aplikasi sikolaki0 dan mengembalikan anak ke layanan Pendidikan formal dan non formal.	Pendataan ATS telah dilakukan melalui aplikasi sikolaki yang dikembangkan oleh Bappeda, namun hasil pendataan belum dianalisis oleh tim kelurahan.
b	Jumlah kegiatan pada setiap sektor terlaksana dan memastikan semua anak dan warga mendapat layanan Pendidikan formal dan nonformal untuk mencapai Pendidikan menengah 12 tahun serta pelatihan yang mendukung kemandirian mereka.	Kegiatan di setiap OPD terkait ATS belum secara spesifik terencana dalam dokumen renjana tahunan namun isu ATS dan upaya peningkatan kesadaran dilakukan secara tematik dengan isu lainnya.
3	Melakukan evaluasi dan pelaporan PATS dan memastikan capaian indikator pada RAD	Belum optimal namun dilakukan secara tematik oleh Bappeda dan menyampaikan hasilnya ke tim PPATS provinsi

b) Rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi proses dan hasil pelaksanaan RAD periode 2022-2024, rekomendasi untuk pengembangan RAD periode 2025 – 2029 sebagai berikut;

1. Penanganan Anak Tidak Sekolah di perluas menjadi Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah.
2. Pemangku kepentingan diberikan penguatan dan pemahaman terkait PPATS dan terlibat secara aktif.
3. Data ATS tersedia pada level kelurahan
4. Penguatan tim ATS pada level kelurahan.
5. Program dan kegiatan pada setiap sektor terkait perlu lebih di fokuskan pada salah satu atau dua sub kegiatan sebagai bagian dari kolaborasi sesuai fungsi OPD terkait.
6. Sosialisasi dokumen RAD pada pemangku kepentingan termasuk pada level kelurahan.
7. Tim Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah di bentuk di setiap kecamatan/kelurahan dengan memperkuat tim yang sudah tersedia.
8. Penguatan dan pengoptimalan pendidikan non formal terlibat secara aktif.
9. Pertemuan reguler tim PPATS tingkat Kota Makassar yang dikoordinir oleh Bappeda

BAB III

MULIA : INKLUSIF: MENGUTAMAKAN PEMBANGUNAN YANG MERATA UNTUK SELURUH LAPISAN MASYARAKAT.

III	Analisa Situasi Anak Tidak Sekolah dan Strategi PPATS	30
3.1	Program PPATS	30
3.2	Situasi Anak Tidak Sekolah (ATS)	31
3.3	Ketersediaan Sarana dan Prasarana	39
3.4	Permasalahan Anak Tidak Sekolah (ATS)	41
3.5	Isu Strategi PPATS	43
3.6	Strategi Nasional dan Arah kebijakan PPATS	43
3.7	Sasaran capaian kolaborasi lintas sektor	46



Analisa Situasi Anak Tidak Sekolah dan Strategi PPATS

3.1 Program Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS)

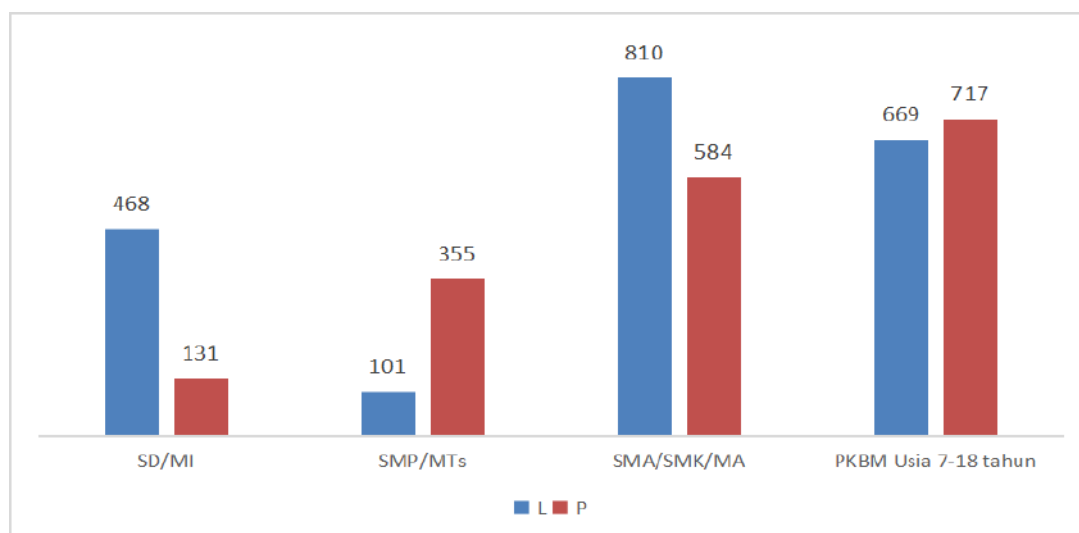
Program Penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS) sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar sejak tahun 2021 atas dukungan UNICEF bersama Yayasan Lembaga Ibu dan Anak (LemINA). Dimulai dengan 4 kelurahan model yaitu Kelurahan Barombong, Lembo, Rappocini dan Tamangapa dengan melakukan pendataan secara sensus melalui Sistem Informasi Pembangunan Masyarakat (SIPBM) yang disebut aplikasi “Sikolaki”, dimana data ATS by name by adress dapat terdeteksi. Saat itu, data ATS terdeteksi di 4 kelurahan sebanyak 257 anak dan terkonfirmasi kembali ke layanan pendidikan formal dan non formal sebanyak 86 anak dan yang sudah terdaftar ke dapodik sebanyak 16 anak¹⁰. Pemerintah Kota Makassar melalui RAD sebelumnya senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan senantiasa akselerasi kelurahan model yang menjadi pembelajaran.

¹⁰ Laporan mitra lokal, Yayasan Lembaga Mitra Ibu & Anak (Lemina, 2022)

Selama Periode uji coba Bappeda sebagai Koordinator Program PPATS melakukan inovasi dengan melakukan pendataan secara terbatas dengan memilih sampel yang masuk kategori menengah dan atau penerima bantuan sosial pada semua kelurahan.

Berdasarkan pengalaman tersebut, upaya secara massif dilakukan untuk memastikan data data yang teridentifikasi dapat dikembalikan ke layanan pendidikan baik formal maupun non formal. Berdasarkan laporan dari Dinas Pendidikan Kota Makassar, ATS usia 7-18 tahun yang berhasil dikembalikan ke layanan pendidikan formal dan non formal per tanggal 31 Agustus 2025 (Dapodik) sebanyak 3.835 anak dengan distribusi sebagai mana terlihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 3.1 Jumlah ATS yang kembali ke layanan pendidikan formal dan non formal berdasarkan jenis keamin di Kota Makassar per tanggal 31 Agustus 2025



Sumber data : Laporan Dinas Pendidikan Kota Makassar 2025

3.2 Situasi Anak Tidak Sekolah

Perkembangan pendidikan khususnya pada Akses layanan pendidikan yang diukur melalui Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Makassar memperlihatkan kemajuan yang significant. Pada tahun 2024 APS usia 7 – 12 tahun (SD/MI/Sederajat) telah mencapai 99,6 persen, usia 13 – 15 tahun (SMP/MTs/Sederajat) mencapai 96,86 persen dan kelompok usia 16 – 18 tahun (SMA/MA/sederajat) sebesar 75,03 persen. Meskipun mengalami peningkatan, namun kelompok usia menengah masih menghadapi tantangan dimana masih banyak anak yang belum menyelesaikan pendidikan menengah (12 tahun) dan ini akan berpengaruh pada perhitungan rata rata lama sekolah. Melihat angka tersebut, terlihat masih banyak anak usia sekolah yang seharusnya bersekolah tapi tidak bersekolah

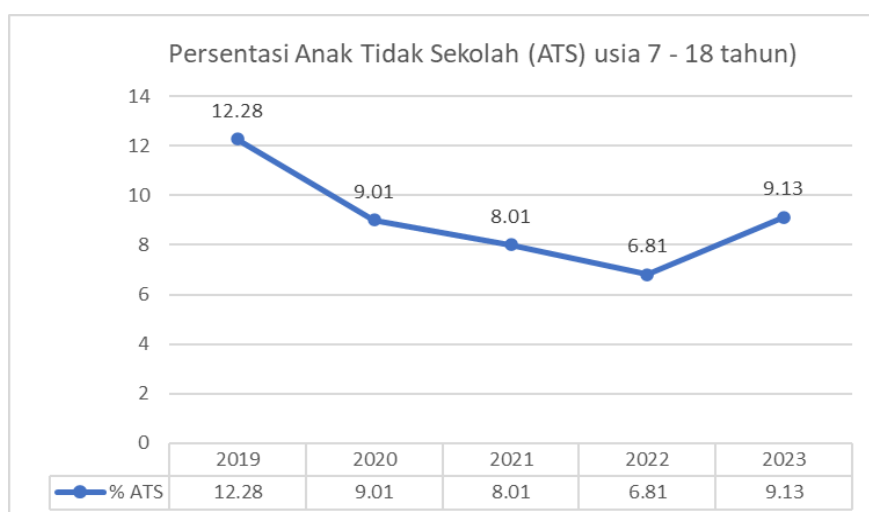
Pemerintah telah mewajibkan semua warga usia sekolah untuk bisa menamatkan pendidikan menengah mereka 12 tahun. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan untuk menurunkan anak tidak sekolah sehingga mereka bisa menyelesaikan pendidikan tertinggi mereka 12 tahun, namun sampai saat ini, data anak sekolah masih banyak. Namun demikian, upaya untuk menurunkan jumlah ATS masih memerlukan kolaborasi dan sinergi lintas sektor dan pemangku kepentingan

Data Anak Tidak sekolah (ATS) masih menjadi perhatian dan masalah utama karena ketersediaan data belum seluruhnya terverifikasi dan penyajiannya belum berbasis kelurahan dan tidak memperlihatkan jumlah dan profil ATS (nama, alamat, dan alasannya mengapa tidak sekolah). Pada tahun 2022, Pemerintah Kota Makassar telah meresmikan program PPATS dan Aplikasi *Sikolaki* yang digunakan untuk melakukan pendataan pada ATS. Hingga tahun 2025 aplikasi tersebut terus dikembangkan. Selain Aplikasi *Sikolaki*, data ATS dapat diakses melalui *website* Pusdatin Kemendikdasmen. Pada web tersebut ditampilkan data makro per wilayah individu peserta didik.

Berdasarkan sumber data resmi, perkembangan situasi Anak Tidak Sekolah dapat diketahui sebagai berikut :

1. **Badan Pusat Statistik.** Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan informasi persentase ATS kelompok umur 7 – 18 tahun yang digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran. Di Kota Makassar persentase ATS turun dari 12,28 % pada tahun 2019 menjadi 6,81% pada tahun 2022 tetapi kemudian naik menjadi 9,13% pada tahun 2023.

Grafik 3.2 Persentasi Anak Tidak Sekolah

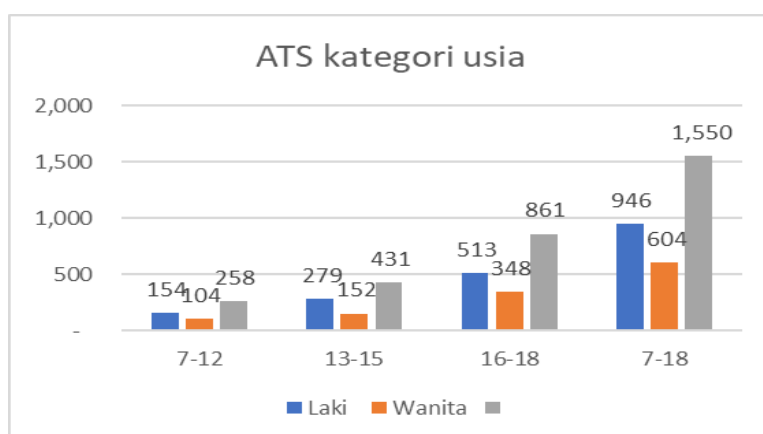


Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025

Kenaikan persentase jumlah ATS di Kota Makassar pada tahun 2023 dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya faktor kemiskinan yang menyebabkan keluarga tidak mampu membiayai pendidikan, jika merujuk pada data BPS Kota Makassar, persentase penduduk miskin di Kota Makassar mengalami peningkatan dari 4,58% pada tahun 2022 menjadi 5,07% pada tahun 2023. Selain faktor kemiskinan, faktor lainnya meliputi keluarga, perceraian, anak yang terlantar dan lain sebagainya

2. **Aplikasi “Sikolaki” Kota Makassar.** Data ATS yang tertera pada aplikasi Sikolaki’ diperoleh melalui pendataan secara terbatas pada semua kelurahan dimana data tersebut diprioritaskan bagi kepala keluarga yang masuk kategori penerima bantuan sosial atau penduduk penerima bantuan langsung tunai. Hasil data tersebut dilihat pada tabel berikut:

Grafik 3.3 Jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) menurut kategori usia
di Kota Makassar tahun 2024



Sumber data : Sikolaki’, Bappeda 2024

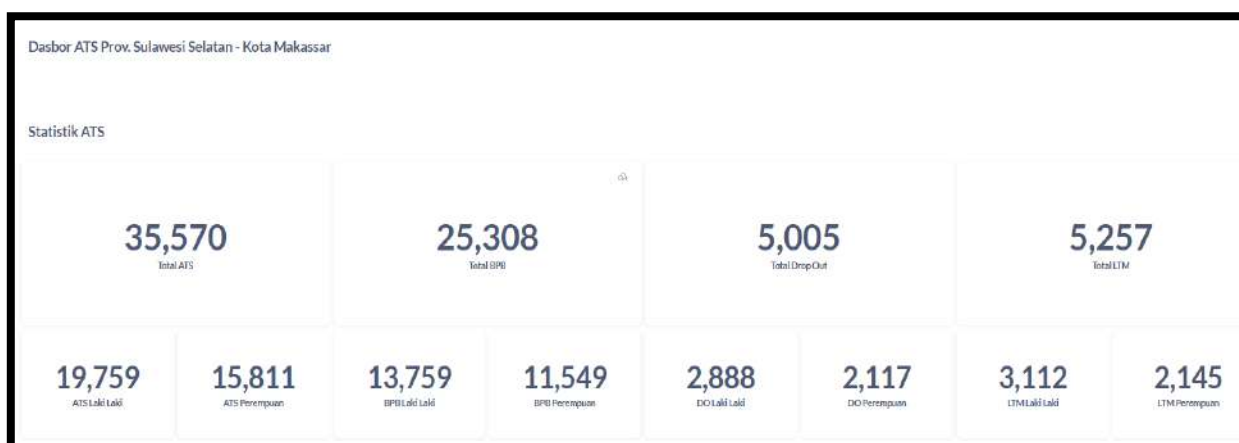
Tabel diatas menunjukkan bahwa Anak Tidak Sekolah usia 7 – 18 tahun teridentifikasi sebanyak 1.550, yang terdiri dari kelompok usia 16 – 18 tahun sebanyak 861 anak (55,5%), 13 – 15 tahun 431 Anak (27,81%) dan usia 7-12 tahun sebanyak 258 anak (16,65%). ATS tertinggi ditemukan pada usia 16.18 tahun, disusul pada usia 13-15 tahun dan usia 7-12 tahun. Namun demikian, data ini perlu direkonfirmasi untuk memastikan jumlah ATS yang akan kembali ke layanan pendidikan baik formal dan non formal

3. **Dashboard verval ATS Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.**

Data yang ditunjukkan pada sistem ini memperlihatkan jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) yang diperoleh dari hasil padupadan data Dapodik, EMIS (Kemenag), PDDikti dan Dukcapil dengan kategori Belum Pernah Bersekolah (BPB), Putus Sekolah (PS) dan Lulus Tidak Melanjutkan (LTM). Data ini berbasis BNBA (*By Name By Address*) yang diperoleh *realtime* dan digunakan untuk melakukan intervensi. Berdasarkan data yang dirilis pada

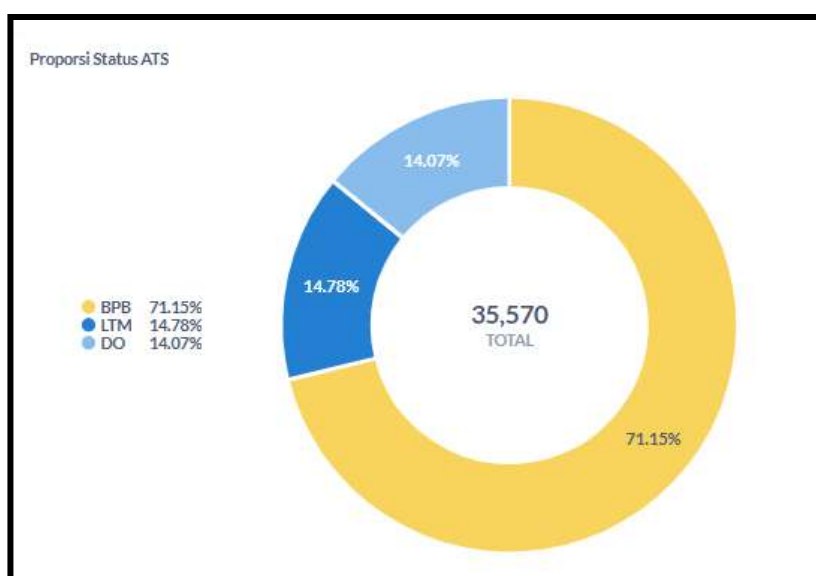
tanggal 4 Desember 2025 menunjukkan bahwa jumlah ATS di Kota Makassar tertinggi diantara 23 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Dashboard Verval ATS dapat diakses secara langsung dan online. Pada dashboard tersebut terlihat bahwa jumlah ATS sebanyak 35,570 anak atau sekitar 20,01 % dari total Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 177,757 anak dengan kategori Belum Pernah Bersekolah (BPB) sebanyak 25,308 anak, Putus Sekolah /Drop Out (DO) 5,005 anak, dan Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) sebanyak 5,257 anak. Secara detail terlihat pada tabel gambar berikut:

Tabel 3.4 Jumlah Anak Tidak Sekolah berdasarkan Dashboard Verval ATS Pusdatin



Sumber : Dashboard Verval ATS Pusdatin tanggal 5 Desember 2025

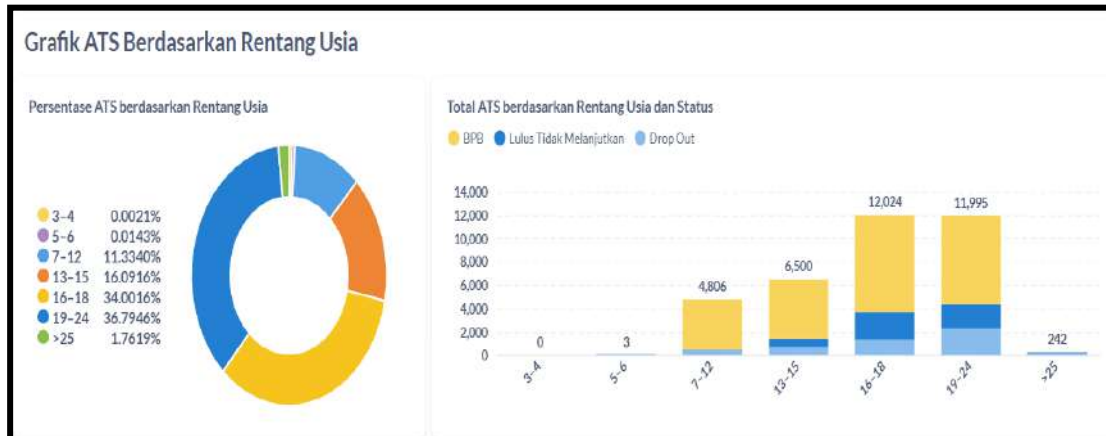
Grafik 3.5 Proporsi status Anak Tidak Sekolah berdasarkan Dashboard Verval ATS



Sumber : Dashboard Verval ATS Pusdatin tanggal 5 Desember 2025.

Melihat data diatas, terlihat bahwa Anak Tidak Sekolah dengan kategori BPB termasuk cukup tinggi yaitu 71,15 %. Disamping itu bahwa usia 16 – 18 tahun merupakan kelompok usia anak yang cukup tinggi terkait Anak Tidak Sekolah yaitu 34,0016 %. Berikut grafik Anak Tidak sekolah berbasis usia yaitu;

Grafik 3.6 Anak Tidak Sekolah berdasarkan kategori usia



Sumber : Dashboard Verval ATS Pusdatin tanggal 5 Desember 2025

Berdasarkan data rangkuman di atas, terlihat bahwa jumlah ATS berdasarkan sumber data Dashboard Verval ATS cukup tinggi dan membutuhkan upaya untuk melakukan verifikasi/validasi berbasis sistem dan dilakukan melalui kelurahan. Sebaran Anak Tidak Sekolah di setiap kecamatan sebagaia berikut;

Tabel 3.7 Sebaran Anak Tidak Sekolah di setiap kecamatan

Rangkuman Individu Wilayah - Verval ATS Pusdatin Kemendikdasmen					
No	Kecamatan	Jumlah BPB	Putus Sekolah	LTM	Total
1	Kec. Mariso	870	263	204	1,337
2	Kec. Mamajang	842	201	150	1,193
3	Kec. Tamalate	4,283	720	711	5,714
4	Kec. Makasar	1,395	306	392	2,093
5	Kec. Ujung Pandang	251	49	51	351
6	Kec. Wajo	504	67	63	634
7	Kec. Bontoala	1,170	249	235	1,654
8	Kec. Ujung Tanah	708	170	285	1,163
9	Kec. Tallo	3,372	699	1,144	5,215
10	Kec. Panakuk kang	2,620	392	461	3,473
11	Kec. Biringkanaya	2,968	670	549	4,187
12	Kec. Tamalanrea	1,850	290	285	2,425
13	Kec. Rappocini	2,176	400	318	2,894
14	Kec. Manggala	2,059	475	382	2,916
15	Kec. Kep. Sangkarrang	240	54	27	321
	Total	25,308	5,005	5,257	35,570

Sumber : Dashboard Verval ATS Pusdatin tanggal 5 Desember 2025

Pada tabel di atas, terlihat bahwa Anak Tidak Sekolah menyebar di semua kecamatan dan hanya tiga kecamatan dengan jumlah di bawah seribu yaitu kec Ujung Pandang, Wajo dan Sangkarrang. Masih banyaknya Anak Tidak Sekolah yang belum terdeteksi melalui sistem Dashboard Verval ATS dikarenakan belum optimalnya tim dalam melakukan verifikasi/validasi melalui sistem. Verifikasi/validasi data ini dapat dilakukan oleh admin pada tingkat kelurahan bersama dengan admin dapodik satuan pendidikan yang ada di kelurahan tersebut. Adapun akun admin kelurahan, tim Dapodik Dinas Pendidikan dapat membubuhkan akun kepada setiap admin kelurahan dengan mengeluarkan code refferal.

Pada laman Dashboard Verval ATS, hasil verifikasi masih sangat rendah yaitu 537 anak atau hanya 1,51 % dari jumlah sebanyak 35,570 anak (Sumber : Dashboard Verval ATS Pusdatin tanggal 5 Desember 2025). Lambatnya verifikasi/validasi dilakukan secara tidak langsung dapat menghambat aksi dalam melakukan gerakan kembali ke layanan pendidikan. Berikut ini adalah hasil validasi/verifikasi setiap kecamatan yang menggambarkan alasan Anak Tidak Sekolah.

Tabel 3.8 Alasan Anak Tidak Sekolah di setiap kecamatan yang sudah di verifikasi

Rangkuman Hasil Verifikasi - Verval ATS Pusdatin Kemendikdasmen																					
No	Kecamatan	k_1	k_2	k_3	k_4	k_5	k_6	k_7	k_8	k_9	k_10	k_11	k_12	k_13	k_14	k_15	k_16	k_17	k_18	k_19	Sudah Verifikasi
1	Kec. Mariso	6	1	0	6	2	0	4	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	2	39
2	Kec. Mamajang	5	5	4	5	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	24
3	Kec. Tamalate	28	3	10	14	11	0	7	1	1	0	0	0	13	0	0	0	0	0	3	91
4	Kec. Makasar	10	1	1	7	2	0	2	3	0	0	0	0	5	0	0	0	0	1	0	32
5	Kec. Ujung Pandang	0	0	2	2	1	0	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	10
6	Kec. Wajo	0	0	1	1	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	8
7	Kec. Bontoala	4	0	1	3	1	0	4	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	17
8	Kec. Ujung Tanah	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	6
9	Kec. Tallo	10	0	2	12	7	0	7	6	0	0	0	0	12	0	1	3	0	0	3	63
10	Kec. Panakukang	16	1	0	8	3	0	4	5	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	5	53
11	Kec. Biringkanaya	26	0	0	10	6	0	6	2	0	0	0	2	19	0	0	1	0	0	3	75
12	Kec. Tamalanrea	4	1	0	2	7	0	5	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	2	34
13	Kec. Rappocini	21	2	0	6	0	0	5	0	1	0	0	0	8	0	0	0	1	0	2	46
14	Kec. Manggala	9	2	0	4	3	0	6	1	0	0	0	1	8	0	0	0	0	1	3	38
15	Kec. Kep. Sangkarrang	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Jumlah	139	16	21	81	43	0	59	21	2	0	0	3	119	0	1	5	1	2	24	537

Sumber : Dashboard Verval ATS Pusdatin tanggal 5 Desember 2025

Berdasarkan tabel di atas, ATS yang sudah diverifikasi dapat diidentifikasi dan dipastikan sebagai ATS. Data ATS sebanyak 537 anak tersebut dapat diakses/dilihat by name by adress pada admin kelurahan. Hasil validasi/verifikasi tersebut dapat diketahui alasan mengapa anak tersebut tidak bersekolah. Dari 537 anak yang telah terverifikasi, berikut alasan mengapa anak tersebut tidak bersekolah.

Tabel 3.9 Jumlah alasan ATS yang telah terverifikasi di Kota Makassar

No	Simbol	Alasan/ Penyebab	Jumlah
1	K_1	Tidak mau bersekolah	139
2	K_2	Tidak ada biaya	16
3	K_3	Sekolah jauh dari rumah	21
4	K_4	Sudah cukup dengan Tingkat Pendidikan yang dimiliki saat ini	81
5	K_5	Menikah / mengurus rumah tangga	43
6	K_6	Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah	0
7	K_7	Bekerja	59
8	K_8	Pengaruh lingkungan/teman	21
9	K_9	Beranggapan sekolah tidak penting	2
10	K_10	Tidak memiliki seragam sekolah	0
11	K_11	Tidak memiliki Akta Kelahiran	0
12	K_12	Masalah Kesehatan/penyandang disabilitas	3
13	K_13	Lainnya	119
14	K_14	Dikeluarkan	0
15	K_15	Mengundurkan diri	1
16	K_16	Hilang	5
17	K_17	Melanjutkan ke luar negeri	1
18	K_18	Melanjutkan ke Pondok Pesantren	2
19	K_19	Meninggal dunia	24
		Jumlah	537

Sumber : Dashboard Verval ATS Pusdatin tanggal 5 Desember 2025

Pada laman Dashboard verval ATS berdasarkan data yang telah diverifikasi seperti pada tabel di atas, dari 19 alasan, alasan lainnya yang sebanyak 119 masih memerlukan klarifikasi pada tingkat kelurahan sehingga diketahui alasan secara pasti¹¹. Alasan ATS yang teridentifikasi tersebut dapat dilakukan aksi secara langsung baik pada level pemerintahan kelurahan dan juga sektor terkait untuk dianggarkan setiap tahun.

Berbagai alasan tersebut juga menunjukkan bahwa berbagai macam alasan sehingga anak usia sekolah yang seharusnya menyelesaikan pendidikan 12 tahun tetapi menjadi ATS dan hampir di semua kecamatan terdapat Anak Tidak Sekolah. Data yang telah teridentifikasi tersebut, paling tidak ada 5 alasan yang mendominasi mengapa Anak Tidak Sekolah yaitu (1) Tidak mau sekolah (139), (2) tingkat pendidikan yang dimiliki sudah

¹¹ Alasan lainnya pada dashboard verval ATS sudah diberikan masukan ke tim Pusdatin untuk direviu.

cukup (81), (3) Bekerja (59), (4) Menikah/mengurus rumah tangga (43) dan (5) sekolah jauh dan pengaruh teman

(@ 21). Pada alasan lainnya, walaupun banyak namun tidak jelaskan /ditulis pada sistem tersebut

4. **Data ATS berbasis kategori.** Data ini ditemukan secara langsung oleh Dinas terkait yang teridentifikasi berdasarkan kategori sebagai berikut;

Tabel 3.10 Data ATS berbasis kategori oleh OPD terkait¹²

Kategori ATS	Temuan OPD terkait	Jumlah		Jumlah	Tahun
		L	P		
Berhadapan dengan hukum	DP3A			59	2025 (N)
Kekerasan	DP3A			328	2025 (November)
Pernikahan Anak	DP3A			35	19 (2024) dan 13 (2025)
Disabilitas	Dinsos			1	2024
Anak Jalanan	Dinsos	103	56	159	89 (2023) dan 70 (2024)

(Catatan: jumlah laki dan perempuan akan disempurnakan saat menyusun DPA)

Data temuan berbasis kategori Anak Tidak Sekolah (ATS) oleh Dinas Terkait menjadi referensi dalam menangani secara interkoneksi lintas sektor seperti pada tabel di atas. Dengan data by name dan by adress oleh sektor terkait maka dinas terkait akan lebih mudah dalam melakukan intervensi juga validasi untuk memastikan bahwa mereka masih terdaftar pada satuan layanan pendidikan.

Berdasarkan sumber data yang disebutkan di atas, maka upaya penanganan anak tidak sekolah pada periode RAD ini adalah menyatukan pemahaman bahwa data Anak Tidak Sekolah (ATS) secara keseluruhan tersedia pada level kelurahan dimana semua sektor hanya punya data yang sumbernya dari kelurahan sehingga diperlukan sinergi kolaborasi.

Pemerintah pusat sudah memberikan panduan dalam Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PPATS) dengan menggunakan data lintas sektor seperti yang

¹² Data rekap hasil konfirmasi OPD terkait saat pertemuan lintas sektor

disiapkan oleh Dashboard Verval ATS Pusdatin . Namun demikian penyiapan data ATS lokal¹³ sebagai inovasi daerah sangat dibutuhkan untuk memastikan dan memudahkan dalam melakukan validasi/verifikasi data lintas sektor yang disiapkan oleh pemerintah pusat.

3.3 Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Sarana dalam mendukung Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah merupakan hal yang utama. Ketersediaan ruang kelas pada setiap satuan pendidikan akan memastikan bahwa semua anak dapat tertampung pada layanan pendidikan sehingga anak dapat bersekolah, sehingga upaya pencegahan lebih awal dapat dioptimalkan. Untuk melihat ketersediaan sarana, diperlukan mengetahui jumlah warga usia sekolah yang akan diperbandingkan dengan jumlah rombongan belajar. Tabel berikut memperlihatkan jumlah warga usia sekolah;

Tabel 3.11 Jumlah Warga/Anak Usia 0 -18 Tahun

Kelompok Umur	L	P	Jumlah
0 -4	45,100	41,939	87,039
5 - 6	27,064	25,178	52,242
7-12	81,470	76,006	157,476
13 - 15	41,344	38,630	79,974
16 - 18	42,377	39,217	81,594

Sumber : Diolah, Dinas Catatan Sipil Kota Makassar, 11 Desember 2025

Tabel berikut ini adalah prasarana satuan pendidikan yang tersedia di Kota Makassar.

Tabel 3.12 Sarana dan Prasana satuan pendidikan semester Ganjil 2025/2026

Satuan Pendidikan	Sekolah	Rombel	Keterangan sumber
TK	552	1,542	Sumber Dinas Pendidikan Kota Makassar
SD	482	5,548	
SMP	235	2,085	
RA	88	216	Kementerian Agama Kota Makassar
MI	70	486	
MTs	52	364	

¹³ Data lokal seperti pengumpulan data melalui aplikasi sikolaki yang diinisiasi oleh Bappeda Kota Makassar



MA	32	269	Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, semester 2025/2026 Ganjil, published secara online, 7 Desember 2025
SMA/SMK	223	2,245	
SLB	23	384	
PKBM	34	367	
SKB	2	37	

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023, tentang Standard Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Pada peraturan tersebut telah ditetapkan jumlah Peserta Didik untuk pendidikan anak usia dini dari usia 0 (nol) sampai dengan 2 (dua) tahun; (b) 12 (dua belas) Peserta Didik untuk pendidikan anak usia dini dari usia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun; (c) 15 (lima belas) Peserta Didik untuk pendidikan anak usia dini di atas 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun; (d) 28 (dua puluh delapan) Peserta Didik untuk sekolah dasar/madrasah tsanawiyah; (e) 32 (tiga puluh dua) Peserta Didik untuk sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah; (f) 36 (tiga puluh enam) Peserta Didik untuk sekolah menengah atas/madrasah aliyah/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan (g) 5 (lima) Peserta Didik untuk sekolah dasar luar biasa; (h) 8 (delapan) Peserta Didik untuk sekolah menengah pertama luar biasa dan sekolah menengah atas luar biasa; (i) 20 (dua puluh) Peserta Didik untuk program paket A atau bentuk lainnya yang sederajat; (j) 25 (dua puluh lima) Peserta Didik untuk program paket B atau bentuk lain yang sederajat; (k) 30 (tiga puluh) Peserta Didik untuk program paket C atau bentuk lainnya yang sederajat. Peserta Didik per Rombongan Belajar (Rombel) pada pasal 8 ayat 2 yaitu (a) 10 (sepuluh)

Mencermati kedua tabel di atas, ketersediaan sarana dan jumlah warga usia sekolah dapat terlayani dengan melihat daya tampung jumlah rombongan belajar dengan jumlah warga jika mereka mendaftar pada satuan pendidikan sesuai dengan usia mereka.

Tabel 3.13 Kesesuaian daya tampung Rombel dan jumlah warga usia 7 – 18 tahun

Satuan Pendidikan Formal	Jumlah Sekolah	Jumlah Rombel	Jumlah PD per Rombel	Daya Tampung Rombel	Jumlah Warga kelompok umur	Selisih daya tampung dan jumlah warga
SD/MI (7-12 Tahun)	552	6,034	28	168,952	157,476	11,476
SMP/MTs (13-15 Tahun)	287	2,449	32	78,368	79,974	(1,606)
SMA/SMK/MA (16 - 18 Tahun)	255	2,514	36	90,504	81,594	8,910

Sumber data : Disdik dan Dukcapil, data di olah, 11 Desember 2025

Berdasarkan tabel tersebut di atas, terlihat bahwa daya tampung Rombel pada satuan pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah (SD/MI) sebanyak 168,952 siswa jika dibandingkan dengan jumlah warga usia tersebut sebanyak 157,476 anak, maka daya tampung masih tersedia dan masih dapat menampung warga yang akan mendaftar sebanyak 11,476 anak.

Demikian juga pada jenjang satuan pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) terdapat jumlah 2,449 Rombel. Jika setiap rombongan belajar menampung 32 peserta didik, maka daya tampung dengan jumlah rombongan belajar tersebut adalah 78,368 peserta didik. Dengan jumlah 79,974 warga usia 13-15 tahun maka ketersediaan sarana Rombel masih kurang karena masih ada sekitar 1,606 anak yang belum bisa terdaftar pada satuan pendidikan tersebut.

Hal lain terlihat pada kelompok usia 16 – 18 tahun (SMA/SMK/MA) dimana daya tampung Rombel tersedia sebanyak 90,504 anak dari jumlah 2,514 Rombel dengan aturan setiap Rombel dapat terisi 36 peserta didik. Melihat daya tampung dan jumlah warga tersebut, bahwa sarana Rombel yang tersedia masih cukup dimana masih ada sekitar 8,910 anak yang dapat tertampung dengan jumlah Rombel tersebut.

3.4 Permasalahan Anak Tidak Sekolah (ATS)

Permasalahan Anak Tidak Sekolah (ATS) tidak hanya dilihat dari satu sudut pandang saja, namun memerlukan pendekatan lain dalam upaya penanganannya. Penanganan anak tidak sekolah hanya dapat diketahui jika masalah utamanya dapat ditemukan dan dianalisis secara bersama. Berikut ini adalah identifikasi permasalahan ATS yang ditemukan pada aspek pencegahan, penanganan dan Tata Kelola sebagai berikut :

- a. Rendahnya verifikasi data ATS mempengaruhi proses pengembalian ATS ke



layanan pendidikan formal dan non formal menjadi lambat. Sebanyak 35,570 anak masih memerlukan upaya untuk dilakukan validasi/verifikasi. Hal ini disebabkan belum optimalnya manajemen data ATS dan keterbatasan kapasitas sumber daya pengelola data ATS. Selain itu, sumber data ATS masih bersifat sektoral, sehingga jumlahnya masih sebatas perkiraan. Demikian juga informasi terkait siapa, dimana, dan mengapa anak tidak bersekolah belum terkoordinir dan belum dianalisa sehingga pengananannya masih terbatas dan belum dikoordinasikan dengan baik.

- b. Ketersediaan sarana dan prasarana layanan pendidikan kurang optimal, terutama Sekolah Menengah Pertama negeri yang belum dapat menampung siswa/siswi lulusan SD pada saat pendaftaran sekolah. Jumlah PKBM dan SKB masih kurang padahal kedua layanan pendidikan non formal ini banyak diminati oleh ATS sebagai tempat untuk kembali bersekolah. Per semester Ganjil 2025/2026¹⁴, PKBM sebanyak 34 satuan Pendidikan dan SKB sebanyak 2 satuan Pendidikan.
- c. Kurangnya kolaborasi dan sinergi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penanganan ATS berbasis faktor penyebab.. Beragam faktor penyebab ATS belum dikaji secara komprehensif dan lintas sektor belum memahami dan memetakan fungsi dan peran lembaga/organisasinya yang dapat diwujudkan dengan berbagai intervensi yang saling terkait antar satu sektor dan sektor lainnya serta berkesinambungan.
- d. Belum optimalnya dukungan Lembaga non pemerintah, dunia usaha dan media dalam upaya pencegahan dan pengembalian ATS disebabkan oleh pemahaman dan model kerjasama yang belum sepenuhnya dapat mengatasi penyebab masalah ATS.
- e. Kurangnya inovasi pada upaya pencegahan dan penanganan ATS. Bentuk-bentuk layanan inovatif yang dapat meningkatkan minat ATS untuk kembali bersekolah, diantaranya layanan pendidikan yang mudah diakses oleh ATS, penggunaan pembelajaran berbasis digitalisasi, layanan pada wilayah kumuh dan miskin, layanan pada wilayah rawan bencana, dan inovasi promosi dan preventif terhadap anak beresiko putus sekolah
- f. Belum optimalnya pemantauan dan evaluasi terpadu pencegahan dan penanganan ATS. Pemantauan dan evaluasi ATS terhadap pelaksanaan pencegahan dan penanganan ATS masih dilaksanakan secara parsial oleh masing-masing sektor dan berdampak pada ketepatan penyusunan kebijakan dan rencana intervensi. Belum

optimalnya pemantauan dan evaluasi terpadu disebabkan oleh instrumen yang tersusun belum terpadu, dan kapasitas tim evaluator yang belum memadai.

3.5 Isu strategis PPATS

Berdasarkan permasalahan dalam upaya pencegahan dan penanganan ATS, maka isu strategis yang relevan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan verifikasi, validasi dan rekonfirmasi data ATS
2. Pemenuhan sarana dan prasarana layanan Pendidikan yang memadai
3. Peningkatan kolaborasi dan sinergi lintas sektor serta pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan dan penanganan ATS berbasis faktor penyebab.
4. Peningkatan dukungan Lembaga non pemerintah, dunia usaha dan media dalam upaya pencegahan dan pengembalian ATS
5. Peningkatan inovasi pencegahan dan penanganan ATS
6. Peningkatan pemantauan dan evaluasi terpadu pencegahan dan penanganan ATS

Berdasarkan pada isu dan gambaran data ATS tersebut di atas, pemerintah Kota Makassar akan melakukan penyelerasan dengan Strategi dan Arah Kebijakan Nasional PPATS.

3.6 Strategi dan Arah Kebijakan Nasional PPATS

Strategi Nasional telah memberikan gambaran dalam upaya pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah melalui 3 kebijakan utama yang telah dituangkan dalam kerangka pengusulan Peraturan Presiden tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah¹⁵ yaitu;

A. **Arah Kebijakan 1:** Pencegahan Anak Tidak Sekolah melalui Penguatan Layanan Pendidikan, Satuan Pendidikan, dan Edukasi. Arah kebijakan ini memiliki strategi pelaksanaan sebagai berikut:

1. Memperkuat Layanan Pendidikan Sebagai Upaya untuk Mencegah Anak Tidak Sekolah, melalui:
 - a. perluasan dan peningkatan akses serta kualitas layanan pendidikan formal, nonformal, dan informal sesuai kebutuhan Anak; dan
 - b. penguatan mutu dan relevansi layanan pendidikan serta standar kompetensi sebagai upaya pengukuhan rekognisi siswa setelah lulus.

¹⁵ Draft lampiran pengusulan Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah, Webinar 1 Agustus 2024 oleh Bappenas.

- 
2. Memperkuat Satuan Pendidikan Sebagai Upaya untuk Mencegah Anak Tidak Sekolah, melalui:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan pendataan Anak Berisiko Putus Sekolah serta memetakan kebutuhan khusus mereka;
 - b. perencanaan dan pelaksanaan penjangkauan, pendampingan, dan pemantauan terhadap Anak Berisiko Putus Sekolah;
 - c. fasilitasi percepatan penyelesaian tantangan, hambatan, dan masalah yang dihadapi oleh Anak Berisiko Putus Sekolah; dan
 - d. pemastian terciptanya lingkungan belajar yang kondusif, aman, dan nyaman bagi Anak.
 3. Melaksanakan Penguatan Edukasi Terkait Kebijakan dan Program Pencegahan Anak Tidak Sekolah, melalui:
 - a. sosialisasi urgensi kebijakan, peraturan, program, dan kegiatan pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah kepada Masyarakat dan Satuan Pendidikan;
 - b. kampanye sosial pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah;
 - c. pelatihan untuk instansi pemerintahan yang memiliki tugas dan fungsi terkait pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah; dan
 - d. optimalisasi pelaksanaan partisipasi Masyarakat dalam melakukan edukasi pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah.
- B. Arah Kebijakan 2:** Penanganan Anak Tidak Sekolah melalui Penguatan Pendataan, Penjangkauan, Pengembalian, dan Pendampingan bagi Anak Tidak Sekolah. Arah kebijakan ini memiliki strategi pelaksanaan sebagai berikut:
1. Memperkuat Mekanisme Pendataan Anak Tidak Sekolah, melalui:
 - a. pemanfaatan data lintas sektor, khususnya antara sektor pendidikan, sosial, dan administrasi kependudukan, sebagai data awal untuk mengidentifikasi Anak Tidak Sekolah;
 - b. penguatan mekanisme verifikasi, validasi, dan sinkronisasi data berdasarkan data awal yang telah tersedia di tingkat daerah; dan
 - c. pemastian sistem keamanan pemanfaatan data Anak Tidak Sekolah
 2. Mengembangkan dan Melaksanakan Penjangkauan Anak Tidak Sekolah, melalui:
 - a. pengembangan mekanisme penanganan kasus Anak Tidak Sekolah yang mencakup pemetaan profil Anak Tidak Sekolah, identifikasi faktor risiko, tantangan, serta kebutuhan dukungan untuk dapat bersekolah atau kembali bersekolah;

- 
- b. penguatan kerja sama dengan perangkat daerah terkait untuk memperluas jaringan penjangkauan; dan
 - c. penguatan dan pengimplementasian strategi inovatif seperti skema insentif partisipasi pendidikan.
 3. Melaksanakan Pengembalian Anak Tidak Sekolah ke Layanan Pendidikan atau Pelatihan, melalui:
 - a. diversifikasi layanan pendidikan dan pelatihan;
 - b. pemastian ketersediaan dan keterjangkauan akses layanan pendidikan dan pelatihan yang fleksibel dan adaptif sesuai kebutuhan tiap kelompok Anak Tidak Sekolah;
 - c. revitalisasi setiap Satuan Pendidikan (formal maupun non formal) dan lembaga pelatihan;
 - d. pengupayaan kelancaran akses dan distribusi bantuan pembiayaan kepada lembaga pendidikan dan pelatihan untuk mengurangi beban biaya operasional dan menjamin kualitas lembaga dan layanan; dan
 - e. penyediaan bantuan administratif dan perlengkapan untuk mendukung pengembalian Anak Tidak Sekolah ke layanan pendidikan atau layanan pelatihan
 4. Memperkuat Pendampingan Anak Tidak Sekolah
 - a. pendampingan berkala yang komprehensif sesuai dengan kebutuhan tiap kelompok Anak Tidak Sekolah; dan
 - b. peningkatan keterlibatan dan peran keluarga serta kelompok Masyarakat dalam pendampingan Anak Tidak Sekolah.
 - C. **Arah Kebijakan 3:** Penguatan Tata Kelola dan Mekanisme Koordinasi Lintas Sektor melalui Sinkronisasi Kebijakan, Penyediaan Sumber Daya, serta Penguatan Kerangka Pengendalian dan Evaluasi. Arah kebijakan ini memiliki strategi pelaksanaan sebagai berikut:
 1. Melakukan Sinkronisasi Kebijakan, Peraturan, Program, dan Kegiatan Instansi Pemerintahan yang Memiliki Keterkaitan dalam Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah, melalui:
 - a. penyusunan, pengusulan, dan/atau penetapan kebijakan, peraturan, program, kegiatan, dan penyediaan alokasi anggaran untuk pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah sesuai kewenangannya dengan melibatkan partisipasi Masyarakat;

- 
- b. pemetaan kebijakan, peraturan, program, dan kegiatan instansi pemerintahan dan/atau Masyarakat yang memiliki keterkaitan dalam pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah; dan
 - c. pengembangan mekanisme koordinasi antara kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, mitra pembangunan, dan lembaga Masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah.
 2. Menyediakan Sumber Daya yang Memadai untuk Mendukung Upaya Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah, melalui:
 - a. pengoptimalan pelaksanaan partisipasi Masyarakat dalam penyusunan kebijakan, peraturan, program, dan kegiatan terkait pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah;
 - b. penguatan kapasitas sumber daya manusia baik di tingkat nasional maupun daerah pada tiap rangkaian upaya pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah; dan
 - c. pengoptimalan perencanaan dan pemanfaatan anggaran dalam tiap rangkaian upaya pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah.
 3. Memperkuat Kerangka Pengendalian dan Evaluasi Upaya Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah, melalui:
 - a. pengembangan sistem pengendalian dan evaluasi yang efektif untuk mendukung keberhasilan pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah; dan
 - b. perencanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, peraturan, program, dan kegiatan pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah

Strategi dan arah kebijakan yang telah digariskan dalam Strategi Nasional PPATS dielaborasi kedalam kerangka RPJMD, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang dijabarkan secara komprehensif ke dalam Rencana Strategis (Renstra) serta dijabarkan secara terstruktur ke dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) yang akan menjadi pedoman dalam menyusun dan mengembangkan Rencana Kerja Tahunan (Renja).

3.7 Sasaran capaian kolaborasi lintas sektor dalam PPATS

Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PPATS) memerlukan kolaborasi lintas sektor terkait. Hal ini terkait dengan banyaknya faktor yang mempengaruhinya. RPJMD Pemerintah Kota Makassar periode 2025 – 2030 secara

terstruktur telah memuat sasaran dan capaian dalam mendukung capaian nasional. Tabel berikut adalah sasaran dan indikator dalam mendukung upaya penanganan lintas sektor sebagai berikut:

Tabel 3.14 Sasaran capaian dan indikator pembangunan pendidikan lintas sektor

Sasaran Renstra OPD terkait	Indikator 2030	Program Strategis (Relevant PPATS)	OPD
Meningkatnya Layanan PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah	Rata rata lama sekolah sebesar 11.63 dan Harapan lama sekolah sebesar 16.68	Menjamin siswa/i ATS dan APS untuk kembali bersekolah	Dinas Pendidikan
Meningkatnya kualitas pemenuhan hak dan perlindungan perempuan serta anak	Persentase Pemenuhan Hak Anak, perlindungan perempuan dan anak yang mendapat layanan perlindungan dan pemulihan secara Komprehensif (100%)	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan Program Peningkatan Kualitas Keluarga mendukung anak usia 6-18 tahun dapat memperoleh haknya untuk menuntaskan wajib belajar 13 tahun dan Anak yang Beresiko Putus Sekolah (ABPS) dapat dicegah agar tidak menjadi ATS.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Menurunkan beban PPKS	Persentase PPKS yang mendapatkan bantuan sosial tepat sasaran (100%)	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Program Rehabilitasi Sosial mendukung keluarga ATS yang masuk dalam kategori miskin dapat dikurangi beban pengeluarannya pada kebutuhan bahan pokok rumah tangga.	Dinas Sosial
Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase ketersediaan layanan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat (100%)	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga adat dan masyarakat hukum adat mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga ATS dan ABPS.	Badan Pemberdayaan Masyarakat
Meningkatnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Program Pendaftaran Penduduk mendukung penyiapan dan memastikan dokumen kependudukan ATS dan ABPS telah	Dinas Catatan Sipil

	(99,45%) Persentase pemanfaatan data kependudukan (80%)	terpenuhi.	
Meningkatnya jumlah pengguna transportasi publik	Persentase peningkatan jumlah pengguna transportasi publik per tahun (3,5%) Persentase peningkatan jumlah Angkutan publik (30%)	Program penyelenggaraan lalulintas dan angkutan jalan (LLAJ) mendukung penyiapan transportasi atau bus antar jemput ke sekolah	Dinas Perhubungan
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Statistik untuk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan	Indeks pembangunan Statistik (IPS)	Pembangunan infrastruktur Teknologi untuk Pengelolaan Data Statistik: Evaluasi menyeluruh Portal Satu Data Makassar yang sudah ada (fitur, performa, interoperabilitas) dan Identifikasi kebutuhan pengembangan baru, seperti integrasi real-time update data antar OPD	Kominfo
Meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing dan perlindungan pekerja dalam menghadapi pasar kerja	% tenaga kerja Bersertifikat kompetensi	Program Pelatihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas	Disnaker
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (100%)	Program Koordinasi dan Sinkronisasi pembangunan daerah mendukung dan memastikan dokumen perencanaan RKPD dan Renja OPD terintegrasi pencegahan dan penanganan ATS	Bappeda

BAB IV

MULIA : UNGGUL. MAKASSAR SEBAGAI KOTA YANG MAJU DENGAN KUALITAS MODAL MANUSIA YANG UNGGUL, MASYARAKAT YANG SEJAHTERA, PEREKONOMIAN YANG PRODUKTIF, INFRASTRUKTUR YANG RAMAH LINGKUNGAN, DAN KEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN INOVASI (IPTEKIN)

IV	Sasaran dan Rencana Aksi Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah	49
4.1	Sasaran dan Target PPATS	49
A	Indikator PPATS	50
B	Sasaran PPATS	51
C	Tahapan Program Prioritas	54
4.2	Program Kegiatan dan Anggaran	55
4.3	Aksi dan Peran Lembaga Terkait	79
4.4	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan	80



Sasaran dan Rencana Aksi Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah

4.1 Sasaran dan Target PPATS

Dalam upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan dalam RPJMD periode 2025-2029 di Kota Makassar yaitu terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, pemerintah akan memastikan tujuan pembangunan yang berkelanjutan dengan menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Pemerintah Kota Makassar akan memprioritaskan wajib belajar 13 tahun serta meningkatkan daya saing sumber daya manusia pada kelompok penduduk usia 15 tahun. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pemerintah Kota Makassar telah menetapkan strategi yaitu Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah dengan mengembalikan Anak Tidak Sekolah dan Anak Putus Sekolah dengan pemberian bantuan pendidikan

(strategi 7, sasaran 2.1.1 RPJMD 2025-2029). Sejalan dengan hal tersebut, Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah Menetapkan sasaran dan indikator sebagai panduan bagi pemangku kepentingan untuk mencapai target RPJMD tersebut.

A. Indikator PPATS

Selaras dengan sasaran dan indikator pembangunan pendidikan tersebut pada tabel BAB III, Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PPATS) menjadi prioritas untuk dilakukan intervensi secara kolaboratif. Berdasarkan data tersebut, maka target penurunan angka anak sekolah diharapkan 5 % per tahun selama di periode 2025 – 2030 sebagai berikut;

Tabel 4.1 Persentasi Penurunan Anak Tidak Sekolah (ATS)

Indikator	Data Awal 2023 (%)	Capaian pertahun				
		2025	2026	2027	2028	2029
Persentasi (%) Penurunan Angka Anak Tidak Sekolah	9.13	8.67	8.24	7.83	7.44	7.06

Data diolah berdasarkan data dasar tahun 2023 oleh BPS

Berdasarkan tabel di atas, persentasi penurunan Anak Tidak Sekolah di Kota Makassar diharapkan dapat dicapai sebesar 7,06 % pada akhir tahun 2029. Sejalan dengan hal ini, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kota Makassar juga telah menetapkan paling tidak **angka ATS ditargetkan turun hingga di bawah 2% dari populasi usia sekolah menengah (SMP dan SMA) pada tahun 2029**, mendukung keberhasilan program wajib belajar 13 tahun¹⁶.

Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah yang dilakukan akan memberikan dampak pada peningkatan rata rata lama sekolah dengan mengoptimalkan peningkatan tingkat pendidikan warga yang di tammatkan pada jenjang pendidikan menengah yaitu pendidikan 12 tahun. Sejalan dengan capaian tersebut untuk memastikan rata rata lama sekolah di Kota Makassar menjadi 12 tahun pada tahun 2030, maka Rencana Aksi Daerah ini juga mendorong peningkatan tingkat pendidikan warga usia 19 tahun ke atas untuk menyelesaikan pendidikan menengah melalui jalur pendidikan non formal dan secara khusus pada kategori usia 19 – 24 tahun.

¹⁶ Renstra Dinas Pendidikan periode 2025 – 2029, halaman 40

Indikator intermediate capaian Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PPATS) dapat diukur melalui indikator akses layanan dasar pendidikan seperti pada tabel berikut yaitu;

Tabel 4.2 Capaian intermediate pelaksanaan RAD PPATS

No	Indikator	Data Awal 2024	Capaian SPM layanan dasar	Keterangan referensi
1	Angka Partisipasi Sekolah usia 5-6 tahun	65,82 %	100 %	Indikator kinerja RPJMD 2025-2029
2	Angka Partisipasi Sekolah			Statistik sosial provinsi SulSel, volume 7 2025
	Usia 7 – 12 Tahun	99,6	100 %	
	Usia 13 - 15 Tahun	96,86	100 %	
	Usia 16 - 18 Tahun	75,03	100 %	
3	Rata Rata Lama Sekolah usia 25 tahun	11,57	12	Capaian Wajib Belajar 12 Tahun (kebijakan nasional)

B. Sasaran PPATS

Sebagai upaya pencapaian penurunan persentasi/ Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) dan menjadi panduan bagi pemangku kepentingan dalam melakukan kolaborasi, berikut adalah sasaran dan indikator yang digambarkan sebagai berikut;

Tabel 4.3 Sasaran dan Indikator PPATS

Sasaran	Indikator	Data Awal 2025	Target capaian 2029	OPD terkait
A. Pencegahan				
1. Meningkatkan satuan pendidikan berpartisipasi secara aktif dalam PPTAS	Persentasi (%) satuan pendidikan SD/MI, SMP/Mts dan SM/MA yang berpartisipasi secara aktif	N/A	100 %	Dinas Pendidikan dan Kemenag Dinas kominfo
2. Meningkatkan satuan	Persentasi (%) anak	N/A	100 %	Dinas

pendidikan dalam mengidentifikasi anak beresiko putus sekolah tetap bersekolah	teridentifikasi beresiko putus sekolah tetap bersekolah pada satuan pendidikan formal dan non formal			Pendidikan dan Kemenag
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat /organisasi dalam kampanye PPATS	Persentasi (%) organisasi yang teridentifikasi terlibat dalam PPATS.	N/A	75 %	DP3A, BPM, Diskominfo Dinas Pendidikan
B. Penanganan				
1. Meningkatnya Jumlah kelurahan memiliki data ATS	Persentasi (%) kelurahan yang memiliki data ATS	4	100 %	BPM (Bagian Pemberdayaan Masyarakat)
2. Meningkatnya verifikasi dan validasi data ATS melalui Pusdatin (data lintas sektor)	Persentasi (%) Data ATS terverifikasi dan validasi by system	537	100 %	Dinas Pendidikan dan PMD (atau bidang yang menangani kelurahan) Capil
3. Meningkatnya ATS teridentifikasi dan kembali kelayanan pendidikan (bersekolah)	Persentasi (%) ATS teridentifikasi dan terkonfirmasi kembali ke layanan pendidikan dan menyelesaikan pendidikan 12 tahun	N/A	100 %	Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama
4. Meningkatnya ATS kategori berhadapan dengan Hukum kembali ke layanan pendidikan	Persentasi (%) ATS berhadapan dengan hukum kembali ke layanan pendidikan dan menyelesaikan pendidikan 12 tahun	59	75 %	DP3A

5. Meningkatnya ATS/ABPS kategori akibat Kekerasan kembali dan bertahan pada layanan pendidikan.	Persentasi (%) ATS dan ABPS kategori akibat kekerasan kembali dan bertahan pada satuan ayanan pendidikan dan menyelesaikan pendidikan 12 tahun	328	75 %	DP3A
6. Meningkatnya ATS kategori anak jalanan kembali kelayanan pendidikan	Persentasi (%) ATS kategori anak jalanan kembali ke layanan pendidikan dan menyelesaikan pendidikan 12 tahun	159	100 %	Dinsos
7. Meningkatnya ATS kategori pernikahan anak kembali kelayanan pendidikan	Persentasi (%) ATS kategori pernikahan anak ke layanan pendidikan dan menyelesaikan pendidikan 12 tahun	N/A	75 % (35 Anak)	DP3A
8. Meningkatnya pendidikan warga yang ditamatkan sampai pendidikan menengah (12 tahun), usia 19 – 24 tahun)	Persentasi (%) warga yang teridentifikasi kelompok usia 19 – 24 tahun kembali ke layanan pendidikan non formal dan menyelesaikan pendidikan 12 tahun	N/A	100 %	Dinas Pendidikan dan Kemenag
9. Meningkatnya ATS mendapat pelatihan	Persentasi (%) ATS mendapat pelatihan sesuai minat bakat mereka.	N/A	100 %	Dinas Pendidikan Kemenag Dinas Perindag or Disnaker or CSR
C. Tata kelola dan koordinasi				

10. Mendorong sinkronisasi kebijakan dan peraturan	Persentasi (%) regulasi PPATS	N/A	100 %	OPD terkait sesuai tupoksinya
11. Meningkatnya OPD terkait dalam melakukan perencanaan dan anggaran PPATS	Persentasi (%) OPD memiliki Renstra dan Renja terintegrasi PPATS	1 OPD	100 %	Bappeda dan OPD terkait
12. Meningkatnya mekanisme koordinasi tim PPATS	Persentasi (%) tim PPATS terbentuk pada tingkat kota dan kelurahan	N/A	100 %	PMD atau yang mengurus kelurahan Bappeda

C. Tahapan Program Prioritas

Berdasarkan indikator dan sasaran capaian Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PPATS) sebagai bagian dari aksi kolaborasi lintas sektor periode 2025 – 2029, berikut adalah Strategi tahapan pelaksanaannya;

Tabel 4.4 Tahapan Program Prioritas PPATS

No	Isu strategis	Tahun				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Peningkatan verifikasi, validasi dan rekonfirmasi data ATS					
2	Pemenuhan sarana dan prasarana layanan Pendidikan yang memadai					
3	Peningkatan kolaborasi dan sinergi lintas sektor serta pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan dan penanganan ATS berbasis faktor penyebab					
4	Peningkatan dukungan Lembaga non pemerintah, dunia usaha dan media dalam upaya pencegahan dan pengembalian ATS					
5	Peningkatan inovasi pencegahan dan penanganan ATS					

6	Peningkatan pemantauan dan evaluasi terpadu pencegahan dan penanganan ATS					
---	---	--	--	--	--	--

4.1 Program, Kegiatan dan anggaran

Program Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PPATS) dilakukan secara kolaboratif merupakan penjabaran dari sasaran dan strategi serta arah kebijakan yang telah tertuang dalam RPJMD Kota Makassar 2025-2029. Program yang akan dijabarkan oleh setiap badan, dinas dan lembaga teknis daerah yang secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Penjabaran program ini akan mangacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam Rencana Strategi (Renstra) setiap OPD terkait, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Uraian Kegiatan dapat digambarkan sesuai dengan sasaran Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PPATS) sebagai bagian dari perencanaan untuk mencapai tujuan dan indikator pembangunan pendidikan seperti yang dirumuskan dalam RPJMD.

Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah berbasis kolabotarif ini dilakukan berdasarkan alasan /faktor – faktor mengapa anak tidak sekolah. Berdasarkan penelitian dan pengalaman selama intervensi pada periode RAD periode sebelumnya, berikut adalah alasan anak tidak sekolah yang akan menjadi rujukan/rumusan dalam menyusun/mengidentifikasi program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024. Alasan ATS adalah sebagai berikut;

Tabel 4.5 Metode Intervensi Berdasarkan Alasan Anak Tidak Sekolah

No	Alasan Anak Tidak Sekolah	Metode Intervensi	OPD penanggungjawab
1	Tidak mau sekolah	- Pertemuan orang tua dan anak bersama pemerintah kelurahan - Edukasi, pendampingan dan	DP3A

		konseling oleh penyuluh, psikolog atau konselor	
2	Tidak ada biaya	• Pemberian beasiswa oleh pemerintah daerah, lembaga dan dunia usaha (dana CSR) • Pendidikan gratis bagi anak yang berasal dari keluarga miskin	Disdik Dinsos
3	Sekolah jauh dari rumah	• Pembelajaran jarak jauh • Pemerataan pembangunan gedung sekolah • Fasilitasi bus sekolah gratis	Disdik Dinsos Dishub
4	Sudah cukup dengan pendidikan yang dimiliki saat ini	Advokasi melalui pertemuan rutin tingkat komunitas di masyarakat desa/kelurahan Edukasi oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat	BPM
5	Menikah /mengurus rumah tangga	• Pengembalian anak ke layanan pendidikan non formal. • Penguatan ekonomi keluarga	DP3A
6	Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah	• Pendampingan terhadap anak korban kekerasan • Pelaksanaan sekolah	DP3A

		ramah anak	
7	Bekerja	• Pengembalian ATS ke layanan pendidikan non formal • Mendekatkan layanan PKBM dan SKB pada wilayah tinggi perkerja anak	Disnaker
8	Pengaruh lingkungan/teman	• Melaksanakan pendidikan karakter dan menegakkan disiplin sekolah • Pengawasan terhadap siswa di sekolah • Pengembalian ATS ke layanan pendidikan non formal	DP3A Dinsos
9	Beranggapan sekolah tidak penting	Advokasi melalui pertemuan rutin tingkat komunitas di masyarakat desa/kelurahan	Bappeda
10	Tidak memiliki seragam sekolah	Penyediaan seragam sekolah	Disdik
11	Tidak memiliki Akta Kelahiran	Menerbitkan akte kelahiran	Dukcapil
12	Masalah Kesehatan/Penyandang Disabilitas	• Advokasi melalui pertemuan rutin tingkat komunitas di masyarakat desa/kelurahan • Memberikan pelayanan kesehatan terhadap disabilitas	Disdik, Dinkes, dan Rumah Sakit

13	Dikeluarkan dari sekolah	• Kesepakatan lintas satuan pendidikan baik layanan formal dan non formal • Melaksanakan pembinaan terhadap siswa/siswi yang menjalani lintas satuan pendidikan	Disdik, UPF SD/ sederajat dan SMP/ sederajat
14	Mengundurkan diri	• Advokasi melalui pertemuan rutin tingkat komunitas di masyarakat desa/ kelurahan • Melaksanakan pendampingan/ konseling terhadap siswa/ siswi yang mengundurkan diri	Disdik dan DP3A
15	Hilang	Menghapus data ATS pada level desa/ kelurahan pada sistem aplikasi	BPM
16	Melanjutkan ke luar negeri	Memperbaharui data ATS pada sistem aplikasi	Disdik
17	Melanjutkan ke Pondok Pesantren atau lainnya	Memperbaharui data ATS pada sistem aplikasi	Disdik dan Kemenag
18	Meninggal dunia	Menghapus data ATS pada level desa/ kelurahan pada sistem aplikasi	BPM
19	Lainnya	Mengkoordinasikan penanganan sesuai dengan permasalahan yang ditemukan	Bappeda



Berdasarkan pada alasan tersebut di atas, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Strategis Perangkat Daerah yang mendukung sasaran Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah yang diarahkan melalui uraian kegiatan

Rencana Aksi Daerah secara detail terlampir sebagai bagian dari RAD secara keseluruhan – Lampiran 1.

Tabel 4.6 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Uraian Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PPATS) di Kota Makassar Tahun 2025-2029

No	Sasaran dan Indikator PPATS	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian kegiatan	OPD Penanggung jawab/Pelaksana
A	Pencegahan					
1	Meningkatnya satuan pendidikan berpartisipasi secara aktif dalam PPTAS Indikator; 100 % satuan pendidikan SD/MI, SMP/Mts dan SM/MA yang berpartisipasi secara aktif	Program pengelolaan pendidikan	1. Pengelolaan pendidikan sekolah dasar 2. Pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1. Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan SD dan SMP	1. Pengembangan kompetensi guru inovatif SD dan SMP 2. Pengembangan kompetensi kepek inovatif SD dan SMP 3. Pengembangan kompetensi manajerial kepek SD dan SMP	Dinas Pendidikan

No	Sasaran dan Indikator PPATS	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian kegiatan	OPD Penanggung jawab/Pelaksana
2	Meningkatnya satuan pendidikan dalam mengidentifikasi anak beresiko putus sekolah tetap bersekolah . Indikator : 100 % anak teridentifikasi beresiko putus sekolah tetap bersekolah pada satuan pendidikan formal dan non formal	Program pengelolaan pendidikan	1. Pengelolaan pendidikan sekolah dasar 2. Pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1. Penyediaan biaya personil peserta didik SD 2. Penyediaan biaya personil peserta didik SMP 3. Pembangunan sarana dan prasarana dan utilitas sekolah 4. Pembangunan ruang kelas baru 5. Pengadaan mebel sekolah	1. Pemberian beasiswa jenjang SD dan SMP 2. Pengadaan seragam sekolah SD dan SMP 3. Pembangunan Ruang kelas baru 4. Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 5. Pengadaan meja dan kursi siswa	Dinas Pendidikan
		Pemenuhan hak anak	Pengautan dan pengembangan penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kab/kota	Peningkatan kapasitas lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kab.kota	1. Bimbingan Teknis bagi Guru tentang pelaksanaan Sekolah Ramah Anak dalam upaya pencegahan bullying di sekolah dan perkawinan anak 2. Bimbingan Teknis bagi Pengelola Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam upaya pelaksanaan psikoedukasi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Sasaran dan Indikator PPATS	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian kegiatan	OPD Penanggung jawab/Pelaksana
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat /organisasi dalam kampanye PPATS Indikator : 75 % organisasi yang teridentifikasi terlibat dalam PPATS	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal Kesetaraan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non formal Kesetaraan	1. Kampanye Sadar Pendidikan di sekolah formal dan non formal 2. Aktivitas layanan untuk penyelenggaraan proses belajar bagi peserta didik dengan memberikan bantuan untuk mendaftar menjadi peserta didik serta Penyediaan pembiayaan operasional dan pendukung pembelajaran bagi warga belajar dan keterampilan melalui dan BOS	Dinas Pendidikan
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Rakyat	• Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan dan penanganan ATS di seluruh kelurahan • Menyusun rencana PPATS di kelurahan sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi	Bagian Pemberdayaan Masyarakat
		Program pemberdayaan lembaga		1. Peningkatan kapasitas kelembagaan, lembaga	1. Bekerjasama dengan lembaga kemasyarakatan (PKK	Bagian Pemberdayaan Masyarakat

No	Sasaran dan Indikator PPATS	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian kegiatan	OPD Penanggung jawab/Pelaksana
		kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat		kemasyarakatan, desa/kelurahan (RT/RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna), Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat. 2. Fasilitasi sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan, desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat.	dan Disdik) untuk memberikan edukasi dan menggerakkan masyarakat dalam melaksanakan PPATS 2. Bekerjasama dengan LPM dan RT/RW untuk mencegah, menangani dan memantau setiap warga dipastikan menyelesaikan pendidikan wajib belajar 13 tahun.	
		Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi BKB (Bina Keluarga Balita), BKL (Bina Keluarga Lansia), BKR (Bina Keluarga Remaja), PIK-R, UPPKA	Pembinaan PIK-Remaja • Pembinaan kelompok Bina Keluarga • Remaja Pembinaan kelompok UPPKA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Sasaran dan Indikator PPATS	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan (Usaha Peningkatan Pendapatan)	Uraian kegiatan	OPD Penanggung jawab/Pelaksana
		Ketahanan keluarga	Pembinaan PIK-R		Meningkatkan pendidikan kesehatan reproduksi remaja, dan pencegahan pergaulan bebas serta kesehatan reproduksi	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Pendampingan dan penguatan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kab/kota	Edukasi Pentingnya melanjutkan Pendidikan anak putus sekolah - Meningkatkan edukasi pencegahan ATS bagi keluarga penerima bantuan sosial - Memantau dan memastikan setiap keluarga miskin sesuai data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional hasil yang memilikianak usia 7-18 tahun menerima bantuan sosial	Dinas Sosial
B	Penanganan					
1	Meningkatnya Jumlah kelurahan memiliki data ATS	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal Kesetaraan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal Kesetaraan	1. Peningkatan kapasitas tim kelurahan terkait pembuatan akun	Dinas Pendidikan

No	Sasaran dan Indikator PPATS	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian kegiatan	OPD Penanggung jawab/Pelaksana
	Indikator : 100 % kelurahan yang memiliki data ATS				dan cara melakukan verifikasi dashboard Verval ATS dan pendataan lokal 2. Pendataan warga negara usia 6 -18 yang belum bersekolah formal/non formal - Jumlah warga usia 19 – 23 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan menengah - Pengembangan kompetensi operator Dapodik SD dan SMP	
2	Meningkatnya verifikasi dan validasi data ATS melalui Pusdatin (data lintas sektor) serta Meningkatnya ATS teridentifikasi dan kembali kelayanan pendidikan	Program pengelolaan pendidikan	Pengelolaan pendidikan sekolah dasar Pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Bimbingan Teknis Verifikasi dan Validasi Database SPMB Jenjang SD, SMP, Non Formal Verifikasi dan validasi Dapodik dari satuan pendidikan yang sesuai dengan kondisi terkini, melalui dashboard Verval	Dinas Pendidikan

No	Sasaran dan Indikator PPATS	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian kegiatan	OPD Penanggung jawab/Pelaksana
	(bersekolah) Indikator : 100 % Data ATS terverifikasi dan validasi by system, teridentifikasi dan kembali ke layanan pendidikan dan menyelesaikan pendidikan 12 tahun				ATS Pusdatin Identifikasi ATS dan pengembalian ATS ke layanan pendidikan Pendataan warga negara dengan koordinasi dan bekerjasama dengan dinas terkait, kerjasama dengan kelurahan ataupun kecamatan untuk melakukan pendataan siswa di daerahnya. Koordinasi dengan satuan pendidikan dalam rangka pemutakhiran Dapodik. Supervisi/ pendampingan kepada satuan pendidikan melalui workshop teknis pemutakhiran Dapodik,	
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal Kesetaraan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	• Pendampingan Anak Tidak Sekolah • Perlengkapan Siswa Anak Tidak Sekolah	

No	Sasaran dan Indikator PPATS	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian kegiatan	OPD Penanggung jawab/Pelaksana
3	Meningkatnya ATS kategori (Anak Berhadapan Hukum-ABH, Anak Berkebutuhan Khusus-ABK, Anak Korban Kekerasan-AKK, Perkawinan Anak - PA, dan lainnya) untuk kembali ke layanan pendidikan Indikator : 100% ATS kategori memerlukan perlindungan khusus anak (ABH, ABK, AKK, PA dan lainnya) teridentifikasi dan terverifikasi kembali ke layanan pendidikan dan menyelesaikan pendidikan 12 tahun	Perlindungan khusus anak	Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, memerlukan koordinasi tingkat daerah kab/kota	Layanan pendampingan tenaga ahli bagi anak korban kekerasan tingkat kab/kota	- Meningkatkan layanan anak korban kekerasan pada Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak - Memantau dan memastikan Anak berhadapan Hukum, Anak Berkebutuhan Khusus, Anak korban kekerasan dan anak kategori perlindungan khusus lainnya mendapatkan layanan pendidikan hingga menyelesaikan wajib belajar 13 tahun	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4	Meningkatnya	Program	Rehabilitasi Sosial	1. Pemberian akses	1. Pengusulan ATS masuk	Dinas Sosial

No	Sasaran dan Indikator PPATS	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian kegiatan	OPD Penanggung jawab/Pelaksana
	keluarga ATS kategori miskin termasuk anak jalanan yang mendapatkan bantuan layanan pendidikan (dasar dan menengah) Indikator : 100 % ATS dari keluarga miskin termasuk anak jalanan teridentifikasi dan terkonfirmasi kembali ke layanan pendidikan dan menyelesaikan pendidikan 12 tahun	Rehabilitasi Sosial	Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	pendidikan dan kesehatan dasar 2. Pendataan Fakir Miskin	ke dalam desil 1-5. 2. Pengusulan ATS masuk ke Sekolah Rakyat bagi yang bersedia 3. Koordinasi daftar nama ATS ke Disdik 4. Memberikan edukasi pencegahan ATS bagi keluarga penerima bantuan sosial serta Memantau dan memastikan setiap keluarga miskin sesuai data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional hasil yang memilikianak usia 7-18 tahun menerima bantuan sosial	
		Program Rehabilitasi Sosial	Pemberian akses pendidikan dan pelayanan dasar Program Perlindungan dan Jaminan Sosial/Pendidikan dan kesehatan dasar		Pemberian bantuan pendidikan dasar bagi keluarga ATS yang tergolong masyarakat miskin	

No	Sasaran dan Indikator PPATS	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian kegiatan	OPD Penanggung jawab/Pelaksana
5	Meningkatnya pendidikan warga yang ditamatkan sampai pendidikan menengah (12 tahun), usia 19 – 24 tahun) Indikator : 100 % warga yang teridentifikasi kelompok usia 19 – 24 tahun kembali ke layanan pendidikan non formal dan menyelesaikan pendidikan 12 tahun	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal Kesetaraan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal Kesetaraan	1. Kampanye Sadar Pendidikan Berbasis Shelter Warga 2. Aktivitas layanan untuk penyelenggaraan proses belajar bagi peserta didik meliputi: • Bantuan untuk mendaftar menjadi peserta didik di sekolah tempat anak kembali belajar. • Penyediaan pembiayaan operasional dan pendukung pembelajaran bagi warga belajar dan keterampilan melalui BOS daerah	Dinas Pendidikan
6	Meningkatnya ATS mendapat pelatihan Indikator : 100 % ATS mendapat pelatihan sesuai minat bakat mereka.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas tenaga kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi bagi pencari kerja berdasarkan unit kompetensi	Fasilitasi pelatihan, magang, workshop, training melalui kerjasama dengan DUDI atau SMK / BLK sesuai minat ATS yang terdaftar di PKBM/SKB	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



No	Sasaran dan Indikator PPATS	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian kegiatan	OPD Penanggung jawab/Pelaksana
7	Meningkatnya ketersediaan busbagi ATS yang kembali bersekolah Indikator : 100% ATS yang tidak memiliki sarana transportasi difasilitasi bus sekolah sehingga dapat kembali bersekolah	Program penyelenggara an Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang danatau Barang Antar Kota dalam Satu Daerah KabupatenKota	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang danatau Barang Antar Kota dalam Satu Daerah KabupatenKota	Fasilitasi bus antar jemput sekolah	Dinas Perhubungan
C	Tata kelola dan koordinasi					

No	Sasaran dan Indikator PPATS	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian kegiatan	OPD Penanggung jawab/Pelaksana
1	Meningkatnya dokumen perencanaan daerah dan dokumen perangkat daerah yang terintegrasi PPATS Indikator : 100% dokumen perencanaan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah terkait terintegrasi PPATS	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pembangunan daerah	Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia	Koordinasi dan sinkronisasi Renstra/Renja dengan RPJMD dan RKPD yang terintegrasi PPATS Penyusunan Peraturan Walikota tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Penanganan ATS Sosialisasi Perwali tentang PPATS kepada OPD, kecamatan, kelurahan dan seluruh stakeholder terkait	Bappeda
		Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pembangunan daerah	Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Asistensi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah bidang pembangunan manusia	Koordinasi dan asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah terkait yang mendukung PPATS dan memastikan dokumen perencanaan tersebut terintegrasi PPATS	Bappeda
2	Meningkatnya pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi kegiatan dan	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Memantau dan mengevaluasi realisasi kinerja dan anggaran kegiatan yang mendukung	Bappeda

No	Sasaran dan Indikator PPATS	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian kegiatan	OPD Penanggung jawab/Pelaksana
	anggaran yang mendukung PPATS Indikator : 100 % target kinerja dan anggaran kegiatan yang mendukung PPATS tercapai	Pembangunan Daerah	Pembangunan Manusia	Bidang Pemerintahan	PPATS Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PPATS) Workshop pengembalian Anak tidak Sekolah (ATS) Melaksanakan kebijakan PPATS dan evaluasi terhadap capaian kinerja terkait PPATS	
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Rakyat	Melakukan sosialisasi penancangan penanganan ATS Melakukan rapat koordinasi penetapan Tim Teknis Penanganan ATS pada semua level. Melakukan pemetaan data ATS dalam sistem informasi yang sudah ada. Melakukan konsultasi publik tentang penetapan prioritas ATS.	Bappeda, BPM, Disdik



No	Sasaran dan Indikator PPATS	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian kegiatan	OPD Penanggung jawab/Pelaksana
					Bekerjasama dengan lembaga kemasyarakatan (PKK dan Disdik) untuk memberikan Bekerjasama dengan LPM dan RT/RW untuk mencegah, menangani dan memantau setiap warga dipastikan menyelesaikan pendidikan wajib belajar 13 tahun.	

4.2 Aksi dan Peran Lembaga Terkait

Rencana Aksi Daerah (RAD) merupakan panduan bagi pemangku kepentingan dalam upaya memastikan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Anak Beresiko Putus Sekolah (ABPS) mendapat layanan pendidikan yang layak dan berkualitas. Berikut ini adalah aksi dan peran OPD terkait;

Tabel 4.7 Aksi dan Target Capaian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Mendukung Pencegahan dan Penanganan ATS di Kota Makassar Tahun 2025-2029

AKSI	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	DUKUNGAN OPD TERKAIT
PENCEGAHAN			
AKSI I	1. Pembentukan tim PPATS tingkat kecamatan dan kelurahan	Bappeda	Kementerian Agama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, DPP&KB, DP3A, kecamatan & kelurahan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan BPS
	2. Pengembangan regulasi tingkat kecamatan dan kelurahan	Bappeda	Bagian Hukum Sekretariat daerah Kota Makassar, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	3. Kepastian anggaran berbasis sektor	Bappeda	Kementerian Agama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, DPP&KB, DP3A, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan
	4. Pengembangan Rencana Aksi Daerah dan sinkronisasi program dan kegiatan	Bappeda	Kementerian Agama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, DPP&KB, DP3A, kecamatan & kelurahan, Dinas Pendidikan, CSR, PKBM
PENANGANAN			
AKSI II	1. Ketersediaan data ATS	Dinas Pendidikan dan BPM	Kementerian Agama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, DPP&KB, DP3A, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, kecamatan & kelurahan
	2. Regulasi penggunaan dana kelurahan	Bappeda	Pemerintah tingkat kecamatan dan kelurahan
	3. Pengembalian anak ke layanan pendidikan formal dan non formal	Dinas Pendidikan, Kementerian Agama	Kementerian Agama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, DPP&KB, DP3A, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, kecamatan & kelurahan, PKBM, CSO

AKSI III	1. Kesiapan layanan pendidikan formal dan non formal	Dinas Pendidikan, Kementerian Agama	Dinas Perpustakaan, PKBM, Dinas Pendidikan Prov. Sul-Sel
	2. Ketersediaan program PIP-KIP	Dinas Sosial	Dinas Pendidikan, kementerian Agama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemerintah tingkat Kelurahan
	3. Pengembangan inovasi pembelajaran bagi anak di kelurahan	Dinas Pendidikan, Kementerian Agama	Dinas Perpustakaan, NGO, DP3A, DPP&KB
TATA KELOLA & KOORDINASI			
AKSI IV	1. Pendidikan keluarga ATS/Konseling	DPP&KB	DP3A, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama
	2. Ketersediaan peluang kemandirian ATS (keterampilan sosial dan vokasional)	Dinas Ketenagakerjaan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pariwisata, Dinas Pemuda dan Olahraga
	3. Kemitraan dengan dunia usaha bagi kemandirian ATS dan remaja di kelurahan	Dinas Koperasi dan UMKM	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, BUMN/Tim CSR, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Balai Latihan Kerja (BLK)
AKSI V	1. Pengembangan inovasi program terkait minat baca/literasi	Dinas Perpustakaan	BRIDA Kota Makassar, Dinas Pendidikan, NGO/CSO, CSR, Kementerian Agama
	2. Advokasi	Bappeda	BRIDA Kota Makassar, NGO/CSO

4.3 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Implementasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PPATS) tidak hanya berhenti pada penyiapan dokumen namun perlu dilakukan aksi nyata oleh berbagai pihak sesuai dengan kewenangannya. Sebagai upaya untuk memastikan tercapainya program, maka tim PPATS Kota Makassar yang dikoordinir oleh Bappeda melakukan serangkaian kegiatan melalui pemantauan dan evaluasi.

A. Pemantauan.

Pemantauan merupakan kegiatan rutin terstruktur yang dilakukan oleh Tim koordinasi PPATS yang terdiri dari OPD dan pemangku kepentingan lain yang dikoordinir oleh Bappeda selaku Ketua PPATS. Frekuensi pemantauan dilakukan minimal dua kali setahun terdiri dari pertengahan dan akhir tahun yang diikuti pemangku kepentingan, tim PPATS kecamatan dan kelurahan atau disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Pemantauan dilakukan dengan menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi yang akan dikembangkan secara teknis oleh tim sekretariat PPATS. Tujuan pemantauan ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua anak yang masuk kategori ATS dapat menerima intervensi baik pendidikan maupun pelatihan. Pemantauan ini dilakukan pada level kelurahan dan juga satuan pendidikan.

B. Evaluasi.

Evaluasi merupakan suatu proses untuk menjelaskan secara sistematis untuk mencapai obyektif, efisien, dan efektif, serta untuk mengetahui dampak dari suatu kegiatan dan juga membantu pengambilan keputusan untuk perbaikan satu atau beberapa aspek program perencanaan yang akan datang. Tujuan utama evaluasi adalah memperoleh informasi yang tepat sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan tentang perencanaan program, keputusan tentang komponen input pada program, implementasi program yang mengarah kepada kegiatan dan keputusan tentang output menyangkut hasil dan dampak dari program kegiatan. Evaluasi dilakukan melalui mekanisme antara lain;

- Pertemuan awal tahun. Pertemuan ini dilakukan pada awal tahun untuk memastikan bahwa kegiatan tahun berjalan telah terakomodasi dan dapat dijalankan serta melakukan sinkronisasi kegiatan.
- Pertemuan tengah semester (enam bulanan) oleh tim PPATS Kota Makassar dengan mengundang seluruh OPD pengampuh. Pertemuan ini dilakukan setelah serangkaian pemantauan telah dilakukan di sebagian besar kelurahan dan sekolah. Pada pertemuan ini, tim PPATS memungkinkan untuk melakukan perubahan kegiatan yang tertuang dalam RAD untuk disesuaikan dengan capaian dan tantangan yang ditemukan di lapangan. Perubahan kegiatan untuk dilaksanakan pada tahun berjalan.

- Pertemuan akhir tahun. Pertemuan ini bertujuan untuk melihat capaian dan proses pelaksanaan RAD oleh setiap OPD terkait dan mempersiapkan pengumpulan data dalam rangka penulisan laporan tahunan RAD PPATS .
- Evaluasi pelaksanaan dan capaian indikator Rencana Aksi Daerah PPATS dilakukan pada pertengahan periode Rencana Aksi Daerah yaitu pada tahun ke 3 pelaksanaan (2027). Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui capaian target, kegiatan dan mengusulkan review RAD jika target capaian memenuhi indikator dan mengusulkan kegiatan baru dalam upaya mengoptimalkan perencanaan.
- Format evaluasi dan monitoring terlampir pada lampiran 2 sebagai bagian dari dokumen RAD ini

C. Pelaporan.

Laporan pelaksanaan RAD PPATS disampaikan oleh setiap OPD terkait bersama tim PPATS kelurahan yang akan menjadi bahan laporan Tengah tahunan dan akhir tahun untuk dilaporkan ke Walikota kemudian ke Tingkat provinsi.

Adapun tujuan pelaporan RAD PATS antara lain adalah:

- a. Memberikan informasi mengenai proses pelaksanaan Rencana Aksi ;
- b. Memberikan informasi mengenai pencapaian dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Rencana Aksi dan identifikasi dan sharing praktik baik;
- c. Menyiapkan kebijakan dan rekomendasi pelaksanaan Rencana Aksi Penanganan ATS tahun berikutnya;
- d. Menyiapkan bahan advokasi dan sosialisasi Rencana Aksi Penanganan

BAB V

MULIA : BERKELANJUTAN. MAKASSAR SEBAGAI KOTA YANG MEMPERHATIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN DAN PENGGUNAAN SUMBER DAYA SECARA EFISIEN SERTA TANGGUH DALAM PENANGANAN BENCANA DAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM. KONDISI INI DIDUKUNG OLEH TATA KELOLA YANG BERINTEGRITAS SERTA MASYARAKAT SIPIL YANG PARTISIPATIF



"Sinergi Sikolaki"

PASTIKAN TIADA ANAK TERTINGGAL, CEGAH DAN TANGANI ATS

Menuju Makassar yang MULIA

Penutup

Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah ini merupakan langkah strategis dan komprehensif yang mengedepankan sinergi dan kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan. Dokumen ini menjadi panduan yang akan terus dievaluasi dan disesuaikan seiring dengan dinamika dan perkembangan di lapangan, demi mencapai tujuan mulia yaitu memastikan setiap anak di Kota Makassar untuk mendapatkan haknya atas pendidikan yang berkualitas. Pelaksanaan RAD ini dapat berjalan dengan baik jika;

Komitmen Bersama pemangku kepentingan. Ketercapaian pelaksanaan dan ratget PPATS tidak hanya bergantung pada kualitas perencanaan, namun juga pada komitmen dan partisipasi aktif dari semua pihak atau multi sektor, organisasi perangkat daerah terkait, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, tokoh agama, dunia usaha, keluarga, dan seluruh elemen masyarakat. Semangat kolaborasi yang telah melandasi penyusunan dokumen ini harus terus dipelihara dan diperkuat dalam setiap



Tahapan implementasi. Komitmen yang terbangun tersebut tidak hanya pada bagaimana menyiapkan input tapi bagaimana memberikan kesempatan pendidikan yang setara kepada seluruh anak, kita tidak hanya memenuhi hak individu, tetapi juga membuka potensi besar bagi kemajuan sosial, ekonomi, dan budaya daerah.

Partisipasi Masyarakat dan pihak ketiga. Kami menyadari bahwa tantangan dalam penurunan angka anak tidak sekolah memerlukan kerja keras serta partisipasi aktif Masyarakat. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh pihak untuk terus bergandengan tangan, memperkuat koordinasi, dan berinovasi dalam mencari solusi yang efektif dan berkelanjutan.

Monitoring dan Evaluasi yang berkelanjutan. Monitoring dan evaluasi yang berkala akan menjadi kunci untuk mengukur kemajuan, mengidentifikasi hambatan, dan melakukan penyesuaian yang diperlukan agar tujuan RAD ini dapat tercapai secara optimal.

Akhir kata, kami berharap Rencana Aksi Daerah ini dapat menjadi pendorong semangat dan panduan yang nyata bagi seluruh pemangku kepentingan dan mari bersama-sama kita wujudkan mimpi setiap anak di Kota Makassar tidak ada yang tertinggal “No One Left Behind”

Lampiran I

NO	Sasaran	Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	Uraian Kegiatan	Indikator/ta rget capaian 2026 - 2029)	Target Kinerja dan Pagu															Su mb er dan a	Penan ggung jawab
		Tahun 2025			Tahun 2026			Tahun 2027			Tahun 2028			Tahun 2029							
		Target capaian (satuan/ %)			Pagu (Esti masi dana)	Lokasi	Target capaian (satuan/ %)	Pagu (Estim asi dana)	Lokasi	Target capaian (satuan/ %)	Pagu (Estim asi dana)	Lokasi	Target capaian (satuan/ %)	Pagu (Estim asi dana)	Lokasi	Target capaian (satuan/ %)	Pagu (Estimas i dana)	Lokasi			
A	PENCEGAHAN																				
1	Meningkatn ya satuan pendidikan berpartisipa si secara aktif dalam PPTAS	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar/ Pengelolaan pendidikan sekolah dasar /Pengembang an karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan SD	1. Pengembangan kompetensi guru inovatif SD 2. Pengembangan kompetensi kepek inovatif SD 3. Pengembangan kompetensi manajerial kepek SD	100 % satuan pendidikan SD/MI, yang berpartisipa si secara aktif	50 % satuan pendidik an memaha mi dan melakuk an interven si pada satuan pendidik an mereka	1,259 ,361, 500	setiap kecam atan	50 % satuan pendidi kan memah ami dan melaku kan interven si pada satuan pendidik an mereka	1,259,3 61,500	setiap kecam atan	50 % satuan pendidik an memaha mi dan melakuk an interven si pada satuan pendidik an mereka	1,259, 361,50 0	setiap kecam atan	50 % satuan pendidi kan memah ami dan melaku kan interven si pada satuan pendidi kan mereka	1,259, 361,50 0	setiap kecam atan	50 % satuan pendidi kan memah ami dan melaku kan interven si pada satuan pendidi kan mereka	1,259,36 1,500	setiap kecamat an	AP BD	Dinas Pendid ikan
2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar/ Pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama/Peng embangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan SMP	1. Pengembangan kompetensi guru inovatif SMP 2. Pengembangan kompetensi kepek inovatif SMP 3. Pengembangan kompetensi manajerial kepek SMP	100 % satuan pendidikan SMP, yang berpartisipa si secara aktif	50 % satuan pendidik an memaha mi dan melakuk an interven si pada satuan pendidik an mereka	1,284 ,322, 500	setiap kecam atan	50 % satuan pendidi kan memah ami dan melaku kan interven si pada satuan pendidi kan mereka	1,284,3 22,500	setiap kecam atan	50 % satuan pendidik an memaha mi dan melakuk an interven si pada satuan pendidik an mereka	1,284, 322,50 0	setiap kecam atan	50 % satuan pendidi kan memah ami dan melaku kan interven si pada satuan pendidi kan mereka	1,284, 322,50 0	setiap kecam atan	50 % satuan pendidi kan memah ami dan melaku kan interven si pada satuan pendidi kan mereka	1,284,32 2,500	setiap kecamat an	AP BD	Dinas Pendid ikan

NO	Sasaran	Nomenklatur Urusan Kabupaten/K ota	Uraian Kegiatan	Indikator/ta rget capaian 2026 - 2029)	Target Kinerja dan Pagu															Su mb er dan a	Penan ggung jawab
		Tahun 2025			Tahun 2026			Tahun 2027			Tahun 2028			Tahun 2029							
		Target capaian (satuan/ %)			Pagu (Esti masi dana)	Lokasi	Target capaian (satuan/ %)	Pagu (Estim asi dana)	Lokasi	Target capaian (satuan/ %)	Pagu (Estim asi dana)	Lokasi	Target capaian (satuan/ %)	Pagu (Estim asi dana)	Lokasi	Target capaian (satuan /%)	Pagu (Estimas i dana)	Lokasi			
3	Meningkatn ya satuan pendidikan dalam mengidentif ikasi anak beresiko putus sekolah tetap bersekolah .	Program pengelolaan pendidikan/ Pengelolaan pendidikan sekolah dasar dan Pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Peny ediaan biaya personil perserta didik; Penyediaan biaya personil perserta didik SMP; Pembanguna n sarana dan prasarana dan utilitas sekolah	Pemberian beasiswa jenjang SD dan SMP Pengadaan seragam sekolah SD dan SMP Pembangunan Ruang kelas baru	Indikator : 100 % anak teridentifik asi beresiko putus sekolah tetap bersekolah pada satuan pendidikan formal dan non formal	100 % satuan pendidik an mempun yai data anak teridenti fikasi beresiko putus sekolah tetap bersekol ah pada satuan pendidik an formal dan non formal	1,437 ,047, 400	satuan pendid ikan	100 % satuan pendidi kan mempu nyai data anak terident ifikasi beresik o putus sekolah tetap berseko lah pada satuan pendidi kan formal dan non formal	1,437,0 47,400	satuan pendid ikan	30 % satuan pendidik an mempun yai data anak teridenti fikasi beresiko putus sekolah mendap at beasisw a atau bantuan lainnya	1,437, 047,40 0	satuan pendid ikan	50 % satuan pendidi kan yang mempu nyai data anak terident ifikasi beresik o putus sekolah mendap at beasisw a atau bantuan lainnya	1,437, 047,40 0	satuan pendid ikan	100 % satuan pendidi kanyan g mempu nyai data anak terident ifikasi beresik o putus sekolah menda pat beasis wa atau bantua n lainnya	1,437,04 7,400	satuan pendidik an	AP BD	Dinas Pendid ikan

NO	Sasaran	Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	Uraian Kegiatan	Indikator/ta rget capaian 2026 - 2029)	Target Kinerja dan Pagu															Su mb er dan a	Penan ggung jawab
		Program /Kegiatan /Sub Kegiatan			Tahun 2025			Tahun 2026			Tahun 2027			Tahun 2028			Tahun 2029				
					Target capaian (satuan/ %)	Pagu (Esti masi dana)	Lokasi	Target capaian (satuan/ %)	Pagu (Estim asi dana)	Lokasi	Target capaian (satuan/ %)	Pagu (Estim asi dana)	Lokasi	Target capaian (satuan/ %)	Pagu (Estim asi dana)	Lokasi	Target capaian (satuan/ %)	Pagu (Estimas i dana)	Lokasi		
4		Program Peningkatan Kualitas Keluarga/Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah KabupatenKota/Layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/Kota	Edukasi dan layanan konseling tim Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) terhadap anak dan keluarga di sekolah dan tempat lainnya	100% anak yang membutuhkan edukasi dan konseling termasuk dalam upaya mencegah ATS mendapatkan layanan edukasi dan konseling	100% anak yang membutuhkan edukasi dan konseling termasuk dalam upaya mencegah ATS mendapatkan layanan edukasi dan konseling	336,740,500	satuan pendidikan	100% anak yang membutuhkan edukasi dan konseling termasuk dalam upaya mencegah ATS mendapatkan layanan edukasi dan konseling	336,740,500	satuan pendidikan	100% anak yang membutuhkan edukasi dan konseling termasuk dalam upaya mencegah ATS mendapatkan layanan edukasi dan konseling	336,740,500	satuan pendidikan	100% anak yang membutuhkan edukasi dan konseling termasuk dalam upaya mencegah ATS mendapatkan layanan edukasi dan konseling	336,740,500	satuan pendidikan	100% anak yang membutuhkan edukasi dan konseling termasuk dalam upaya mencegah ATS mendapatkan layanan edukasi dan konseling	336,740,500	satuan pendidikan	AP BD	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	Sasaran	Nomenklatur Urusan Kabupaten/K ota	Uraian Kegiatan	Indikator/ta rget capaian 2026 - 2029)	Target Kinerja dan Pagu															Su mb er dan a	Penan ggung jawab
		Tahun 2025			Tahun 2026			Tahun 2027			Tahun 2028			Tahun 2029							
		Target capaian (satuan/ %)			Pagu (Esti masi dana)	Lokasi	Target capaian (satuan/ %)	Pagu (Estim asi dana)	Lokasi	Target capaian (satuan/ %)	Pagu (Estim asi dana)	Lokasi	Target capaian (satuan/ %)	Pagu (Estim asi dana)	Lokasi	Target capaian (satuan /%)	Pagu (Estimas i dana)	Lokasi			
5	Meningkatn ya partisipasi masyarakat /organisasi dalam kampanye PPATS	Program Pengelolaan Pendidikan/P engelolaan Pendidikan Nonformal Kesetaraan/P embinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal Kesetaraan	Kampanye Sadar Pendidikan Berbasis Shelter Warga Aktivitas layanan untuk penyelenggaraan proses belajar bagi peserta didik meliputi: Bantuan untuk mendaftar menjadi peserta didik Penyediaan pembiayaan operasional dan pendukung pembelajaran bagi warga belajar dan keterampilan – BOS daerah	75 % organisasi yang teridentifik asi terlibat dalam PPATS	Organis asi penduku ng PPATS teridenti fikasi dan berkomi tmen dalam menduk ung program	361,2 09,20 0	Kota Makas sar	Organis asi penduk ung PPATS terident ifikasi dan berkom itmen dalam menduk ung progra m	361,20 9,200	Kota Makas sar	25 % Organis asi penduk ung yang terident ifikasi terlibat secara langun g dalam progra m PPATS	361,20 9,200	Kota Makas sar	25 % Organi sasi penduk ung yang terident ifikasi terlibat secara langun g dalam progra m PPATS	361,209, 200	Kota Makassa r	AP BD	Dinas Pendid ikan			
6		Program Pemerintahan dan Kesejahteraa n Rakyat/Pelak sanaan Kebijakan Kesejahteraa n Ralyat/Pelaks anaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraa n Rakyat	1. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan dan penanganan ATS di seluruh kelurahan 2. Menyusun rencana PPATS di kelurahan sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi	100% kelurahan melaksanak an PPATS	100% keluraha n melaksa nan PPATS	219,7 67,79 6	setiap kelura han	100% kelurah an melaks anan PPATS	219,76 7,796	setiap kelura han	100% keluraha n melaksa nan PPATS	219,76 7,796	setiap kelura han	100% kelurah an melaks anan PPATS	219,767, 796	setiap keluraha n	AP BD	Bagian Pembe rdyaa n Masya rakat			
B	PENANGANAN																				

NO	Sasaran	Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	Uraian Kegiatan	Indikator/ta rget capaian 2026 - 2029)	Target Kinerja dan Pagu															Su mb er dan a	Penan ggung jawab
		Tahun 2025			Tahun 2026			Tahun 2027			Tahun 2028			Tahun 2029							
		Target capaian (satuan/ %)			Pagu (Esti masi dana)	Lokasi	Target capaian (satuan/ %)	Pagu (Estim asi dana)	Lokasi	Target capaian (satuan/ %)	Pagu (Estim asi dana)	Lokasi	Target capaian (satuan/ %)	Pagu (Estim asi dana)	Lokasi	Target capaian (satuan/ %)	Pagu (Estimas i dana)	Lokasi			
7	Meningkatn ya Jumlah kelurahan memiliki data ATS	Program Pengelolaan Pendidikan/P engelolaan Pendidikan Nonformal Kesetaraan/P embinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal Kesetaraan	• peningkatan kapasitas tim kelurahan terkait pembuatan akun dan cara melakukan verifikasi dashboard Verval ATS dan pendataan lokal -- Bekerjasama dengan BPM • Pendataan warga negara usia 6 -18 yang belum bersekolah formal/non formal • Jumlah warga usia 19 – 23 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan menengah • Pengembangan kompetensi operator SD dan SMP	Indikator : 100 % kelurahan yang memiliki data ATS	100% keluraha n memilik i data ATS	174,4 39,90 0	kelura han	100% kelurah an memili ki data ATS	174,43 9,900	kelura han	100 % keluraha n memilik i data ATS	174,43 9,900	Keluar ahan	100 % kelurah an memili ki data ATS	174,43 9,900	Keluar ahan	100 % kelurah an memili ki data ATS	174,439, 900	Keluarah an	AP BD	Dinas Pendid ikan

NO	Sasaran	Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	Uraian Kegiatan	Indikator/ta rget capaian 2026 - 2029)	Target Kinerja dan Pagu															Su mb er dan a	Penan ggung jawab
		Program /Kegiatan /Sub Kegiatan			Tahun 2025			Tahun 2026			Tahun 2027			Tahun 2028			Tahun 2029				
					Target capaian (satuan/ %)	Pagu (Esti masi dana)	Lokasi	Target capaian (satuan/ %)	Pagu (Estim asi dana)	Lokasi	Target capaian (satuan/ %)	Pagu (Estim asi dana)	Lokasi	Target capaian (satuan/ %)	Pagu (Estim asi dana)	Lokasi	Target capaian (satuan /%)	Pagu (Estimas i dana)	Lokasi		
8	Meningkatn ya verifikasi dan validasi data ATS melalui Pusdatin (data lintas sektor) serta Meningkatn ya ATS teridentifik asi dan kembali kelayanan pendidikan (bersekolah)	Program pengelolaan pendidikan/ Pengelolaan pendidikan sekolah dasar/Penyedi aan biaya personil peserta didik sekolah dasar	Bimbingan Teknis Verifikasi, Validasi Database SPMB Jenjang SD, Verifikasi dan validasi Dapodik dari satuan pendidikan yang sesuai dengan kondisi terkini, melalui dashboard Verval ATS Pusdatini, dentifikasi ATS dan pengembalian ATS ke layanan pendidikan; Pendampingan Anak Tidak Sekolah; Perlengkapan Siswa Anak Tidak Sekolah Pendataan warga negara dengan koordinasi dan bekerjasama dengan dinas terkait, kerjasama dengan kelurahan ataupun kecamatan untuk melakukan pendataan siswa di daerahnya. Koordinasi dengan satuan pendidikan dalam rangka pemutakhiran Dapodik. Supervisi/ pendampingan kepada satuan pendidikan melalui workshop teknis pemutakhiran Dapodik,	Indikator : 100 % Data ATS terverifikasi dan validasi by system, teridentifik asi dan kembali ke layanan pendidikan dan menyelesai kan pendidikan 12 tahun	100 % keluraha n memilik i data ATS dan melakuk an validasi data Verval ATS, terident ifikasi dan kembali ke layanan pendidik an	715,7 64,20 0	Keluar ahan	100 % kelurah an memilik i data ATS dan melakuk an validasi data Verval ATS, terident ifikasi dan kembali ke layanan pendidik an	715,76 4,200	Keluar ahan	100 % keluraha n memilik i data ATS dan melakuk an validasi data Verval ATS, terident ifikasi dan kembali ke layanan pendidik an	715,76 4,200	Keluar ahan	100 % kelurah an memilik i data ATS dan melakuk an validasi data Verval ATS, terident ifikasi dan kembal i ke layanan pendidi kan	715,76 4,200	Kelura han	100 % kelurah an memilik i data ATS dan melakuk an validasi data Verval ATS, terident ifikasi dan kembal i ke layanan pendidi kan	715,764, 200	Keluraha n	AP BD	Dinas Pendid ikan

NO	Sasaran	Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	Uraian Kegiatan	Indikator/ta rget capaian 2026 - 2029)	Target Kinerja dan Pagu															Su mb er dan a	Penan ggung jawab
		Program /Kegiatan /Sub Kegiatan			Tahun 2025			Tahun 2026			Tahun 2027			Tahun 2028			Tahun 2029				
					Target capaian (satuan/ %)	Pagu (Esti masi dana)	Lokasi	Target capaian (satuan/ %)	Pagu (Estim asi dana)	Lokasi	Target capaian (satuan/ %)	Pagu (Estim asi dana)	Lokasi	Target capaian (satuan/ %)	Pagu (Estim asi dana)	Lokasi	Target capaian (satuan/ %)	Pagu (Estimas i dana)	Lokasi		
9		Program pengelolaan pendidikan/ Pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama/ Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Bimbingan Teknis Verifikasi, Validasi Database SPMB Jenjang SMP, identifikasi ATS dan pengembalian ATS ke layanan pendidikan	Indikator : 100 % Data ATS terverifikasi dan validasi by system, teridentifikasi dan kembali ke layanan pendidikan dan menyelesaikan pendidikan 12 tahun	100 % kelurahan memiliki data ATS dan melakukan validasi data Verval ATS, teridentifikasi dan kembali ke layanan pendidikan	721,283,200	Kelurahan	100 % kelurahan memiliki data ATS dan melakukan validasi data Verval ATS, teridentifikasi dan kembali ke layanan pendidikan	721,283,200	Kelurahan	100 % kelurahan memiliki data ATS dan melakukan validasi data Verval ATS, teridentifikasi dan kembali ke layanan pendidikan	721,283,200	Kelurahan	100 % kelurahan memiliki data ATS dan melakukan validasi data Verval ATS, teridentifikasi dan kembali ke layanan pendidikan	721,283,200	Kelurahan	100 % kelurahan memiliki data ATS dan melakukan validasi data Verval ATS, teridentifikasi dan kembali ke layanan pendidikan	721,283,200	Kelurahan	APBD	Dinas Pendidikan

NO	Sasaran	Nomenklatur Urusan Kabupaten/K ota	Uraian Kegiatan	Indikator/ta rget capaian 2026 - 2029)	Target Kinerja dan Pagu															Su mb er dan a	Penan ggung jawab
		Tahun 2025			Tahun 2026			Tahun 2027			Tahun 2028			Tahun 2029							
		Target capaian (satuan/ %)			Pagu (Esti masi dana)	Lokasi	Target capaian (satuan/ %)	Pagu (Estim asi dana)	Lokasi	Target capaian (satuan/ %)	Pagu (Estim asi dana)	Lokasi	Target capaian (satuan/ %)	Pagu (Estim asi dana)	Lokasi	Target capaian (satuan /%)	Pagu (Estimas i dana)	Lokasi			
10		Program Pengelolaan Pendidikan/P engelolaan Pendidikan Nonformal Kesetaraan/ Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/K esetaraan	Pendampingan Anak Tidak Sekolah Perlengkapan Siswa Anak Tidak Sekolah Workshop Peningkatan Kompetensi Tutor Kesetaraan Dalam Perencanaan dan Evaluasi Pembelajaran Penguatan Pengembalian Anak Tidak Sekolah Kampanye Sadar Pendidikan Berbasis Shelter Warga Pertemuan dengan kelurahan dan forum PKBM/ layanan Non Formal Memberikan motivasi dan bimbingan kepada ATS yang kembali bersekolah agar tetap bersekolah	100 % ATS teridentifik asi dan terkonfirma si kembali ke layanan pendidikan dan menyelesai kan pendidikan 12 tahun	Jumlah ATS teridenti fikasi dan terverifi kasi kembali ke layanan pendidik an	698,0 00	Keluar ahan	Jumlah ATS terident ifikasi dan terverif ikasi kembali ke layanan pendidi kan	698,00 0	Keluar ahan	20 % Jumlah ATS teridenti fikasi terdaftar pada layanan pendidik an (dapodik)	698,00 0	Keluar ahan	30 % Jumlah ATS terident ifikasi terdafta r pada layanan pendidi kan (dapodi k)	698,00 0	Keluar ahan	50 % Jumlah ATS terident ifikasi terdafta r pada layanan pendidi kan (dapodi k)	698,000	Keluarah an	AP BD II	Dinas Pendid ikan

NO	Sasaran	Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	Uraian Kegiatan	Indikator/ta rget capaian 2026 - 2029)	Target Kinerja dan Pagu															Su mb er dan a	Penan ggung jawab
		Tahun 2025			Tahun 2026			Tahun 2027			Tahun 2028			Tahun 2029							
		Target capaian (satuan/ %)			Pagu (Esti masi dana)	Lokasi	Target capaian (satuan/ %)	Pagu (Estim asi dana)	Lokasi	Target capaian (satuan/ %)	Pagu (Estim asi dana)	Lokasi	Target capaian (satuan/ %)	Pagu (Estim asi dana)	Lokasi	Target capaian (satuan/ %)	Pagu (Estimas i dana)	Lokasi			
11		Program Pengelolaan Pendidikan/P engelolaan Pendidikan Nonformal Kesetaraan/ Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal Kesetaraan	1. Workshop Peningkatan Kompetensi Tutor Kesetaraan Dalam Perencanaan dan Evaluasi Pembelajaran 2. Penguatan Pengembalian Anak Tidak Sekolah 3. Kampanye Sadar Pendidikan Berbasis Shelter Warga	100 % ATS teridentifik asi dan terkonfirma si kembali ke layanan pendidikan dan menyelesai kan pendidikan 12 tahun	Jumlah ATS teridenti fikasi dan terverifi kasi kembali ke layanan pendidik an	174,4 39,90 0	Keluar ahan	Jumlah ATS terident ifikasi dan terverif ikasi kembal i ke layanan pendidi kan	174,43 9,900	Keluar ahan	20 % Jumlah ATS teridenti fikasi terdaftar pada layanan pendidik an (dapodik)	174,43 9,900	Keluar ahan	30 % Jumlah ATS terident ifikasi terdafta r pada layanan pendidi kan (dapodi k)	174,43 9,900	Keluar ahan	50 % Jumlah ATS terident ifikasi terdafta r pada layanan pendidi kan (dapodi k)	174,439, 900	Keluarah an	AP BD II	Dinas Pendid ikan

NO	Sasaran	Nomenklatur Urusan Kabupaten/K ota	Uraian Kegiatan	Indikator/ta rget capaian 2026 - 2029)	Target Kinerja dan Pagu															Su mb er dan a	Penan ggung jawab
		Tahun 2025			Tahun 2026			Tahun 2027			Tahun 2028			Tahun 2029							
		Target capaian (satuan/ %)			Pagu (Esti masi dana)	Lokasi	Target capaian (satuan/ %)	Pagu (Estim asi dana)	Lokasi	Target capaian (satuan/ %)	Pagu (Estim asi dana)	Lokasi	Target capaian (satuan/ %)	Pagu (Estim asi dana)	Lokasi	Target capaian (satuan /%)	Pagu (Estimas i dana)	Lokasi			
12	Meningkatn ya ATS kategori Anak berhadapan Hukum, Anak Berkebutuh an khusus, anak korban kekerasan, perkawinan anak, dan lainnya untuk kembali ke layanan pendidikan	Perlindungan khusus anak /Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, memerlukan koordinasi tingkat daerah kab/kota /(1) Layanan pendampinga n tenaga ahli bagi anak korban kekerasan tingkat kab/kota (2) Layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak dalam lingkuk kab/kota	Meningkatkan layanan anak korban kekerasan pada Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak serta Memantau dan memastikan Anak berhadapan Hukum, Anak Berkebutuhan Khusus, Anak korban kekerasan, perkawinan anak dan anak kategori perlindungan khusus lainnya mendapatkan layanan pendidikan hingga menyelesaikan wajib belajar 13 tahun Meningkatan layanan edukasi dan konseling bagi ATS dan keluarga pada Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Meningkatkan pendidikan kesetaraan gender dalam keluarga	100% ATS kategori memerluka n perlindunga n khusus anak (ABH, ABK, AKK, PA dan lainnya) teridentifik asi dan terverifikasi kembali ke layanan pendidikan dan menyelesai kan pendidikan 12 tahun (khusus PA 75 %)	100 % ATS kategori memerlu kan perlindu ngan khusus anak (ABH, ABK, dan lainnya) terident ifikasi dan terverifi ikasi kembali ke layanan pendidik an	342,1 96,80 0	Keluar ahan	100 % ATS kategor i memerlu kan perlindu ngan khusus anak (ABH, ABK, dan lainnya) terident ifikasi dan terverifi ikasi kembali ke layanan pendidik an	342,19 6,800	Keluar ahan	100 % ATS kategori memerlu kan perlindu ngan khusus anak (ABH, ABK, dan lainnya) terident ifikasi dan terverifi ikasi kembali ke layanan pendidik an	342,19 6,800	Keluar ahan	100 % ATS kategor i memerlu kan perlind ungan khusus anak (ABH, ABK, dan lainnya) terident ifikasi dan terverifi ikasi kembali ke layanan pendidi kan	342,19 6,800	Keluar ahan	100 % ATS kategor i memerlu kan perlind ungan khusus anak (ABH, ABK, dan lainnya) terident ifikasi dan terverifi ikasi kembali ke layanan pendidi kan	342,196, 800	Keluarah an	AP BD	Dinas Pembe rdayaa n Perem puan dan Perlind ungan Anak

NO	Sasaran	Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	Uraian Kegiatan	Indikator/ta rget capaian 2026 - 2029)	Target Kinerja dan Pagu															Su mb er dan a	Penan ggung jawab
		Tahun 2025			Tahun 2026			Tahun 2027			Tahun 2028			Tahun 2029							
		Target capaian (satuan/ %)			Pagu (Esti masi dana)	Lokasi	Target capaian (satuan/ %)	Pagu (Estim asi dana)	Lokasi	Target capaian (satuan/ %)	Pagu (Estim asi dana)	Lokasi	Target capaian (satuan/ %)	Pagu (Estim asi dana)	Lokasi	Target capaian (satuan /%)	Pagu (Estimas i dana)	Lokasi			
13	Meningkatn ya keluarga ATS kategori miskin yang mendapatka n bantuan pendidikan dasar	Program Rehabilitasi Sosial/1. Pemberian akses pendidikan dan pelayanan dasar 2. Pengelolaan data fakir miskin	Memberikan edukasi pencegahan ATS bagi keluarga penerima bantuan sosial serta Memantau dan memastikan setiap keluarga miskin sesuai data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional hasil yang memilikianak usia 7-18 tahun menerima bantuan sosial Pengusulan ATS masuk ke dalam desil 1-5. Pengusulan ATS masuk ke Sekolah Rakyat bagi yang bersedia Koordinasi daftar nama ATS ke Disdik	100 % ATS dari keluarga miskin termasuk anak jalanan teridentifi kasi dan terkonfir masi kembali ke layanan pendidika n dan menyelesa ikan pendidikan 12 tahun	100 % ATS dari keluarga miskin termasuk anak jalanan teridentifi kasi dan terkonfir masi kembali ke layanan pendidika n dan menyelesa ikan pendidikan 12 tahun	4,174 ,000	Kelura han	100 % ATS dari keluarga miskin teridentifi kasi dan terkonfir masi kembali ke layanan pendidika n dan menyelesa ikan pendidikan 12 tahun	4,174,0 00	Kelura han	100 % ATS dari keluarga miskin teridentifi kasi dan terkonfir masi kembali ke layanan pendidika n dan menyelesa ikan pendidikan 12 tahun	4,174, 000	Kelura han	100 % ATS dari keluarga miskin teridentifi kasi dan terkonfir masi kembali ke layanan pendidika n dan menyelesa ikan pendidikan 12 tahun	4,174, 000	Kelura han	100 % ATS dari keluarga miskin teridentifi kasi dan terkonfir masi kembali ke layanan pendidika n dan menyelesa ikan pendidikan 12 tahun	4,174,00 0		AP BD	Dinas Sosial
14		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial/Pendid ikan dan kesehatan dasar	Pemberian bantuan pendidikan dasar bagi keluarga ATS yang tergolong masyarakat miskin	100% keluarga ATS kategori miskin memperole h bantuan layanan pendidikan dasar	100% keluarga ATS kategori miskin memperole h bantuan layanan pendidikan dasar	100% keluarga ATS kategori miskin memperole h bantuan layanan pendidikan dasar	21,06 0,000	Kelura han	100% keluarga ATS kategori miskin memperole h bantuan layanan pendidikan dasar	21,060, 000	Kelura han	100% keluarga ATS kategori miskin memperole h bantuan layanan pendidikan dasar	21,060 ,000	Kelura han	100% keluarga ATS kategori miskin memperole h bantuan layanan pendidikan dasar	21,060 ,000	Kelura han	100% keluarga ATS kategori miskin memperole h bantuan layanan pendidikan dasar	21,060,0 00	Keluraha n	AP BD

NO	Sasaran	Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	Uraian Kegiatan	Indikator/ta rget capaian 2026 - 2029)	Target Kinerja dan Pagu															Su mb er dan a	Penan ggung jawab
		Tahun 2025			Tahun 2026			Tahun 2027			Tahun 2028			Tahun 2029							
		Target capaian (satuan/ %)			Pagu (Esti masi dana)	Lokasi	Target capaian (satuan/ %)	Pagu (Estim asi dana)	Lokasi	Target capaian (satuan/ %)	Pagu (Estim asi dana)	Lokasi	Target capaian (satuan/ %)	Pagu (Estim asi dana)	Lokasi	Target capaian (satuan /%)	Pagu (Estimas i dana)	Lokasi			
15	Meningkatn ya pendidikan warga yang ditamatkan n sampai pendidikan menengah (12 tahun), usia 19 – 24 tahun)	Program Pengelolaan Pendidikan/P engelolaan Pendidikan Nonformal Kesetaraan/P embinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal Kesetaraan	Kampanye Sadar Pendidikan Berbasis Shelter Warga Aktivitas layanan untuk penyelenggaraan proses belajar bagi peserta didik meliputi: • Bantuan untuk mendaftar menjadi peserta didik di sekolah tempat anak kembali belajar. • Penyediaan pembiayaan operasional dan pendukung pembelajaran bagi warga belajar dan keterampilan – BOS daerah	100 % warga yang teridentifikasi asi kelompok usia 19 – 24 tahun kembali ke layanan pendidikan non formal dan menyelesai kan pendidikan 12 tahun	32 satuan pendidik an yang dibina terkait bantuan bagi ATS yang akan kembali sekolah di pendidi kan non formal	174,4 39,90 0	Kelura han	32 satuan pendidi kan yang dibina terkait bantuan bagi ATS yang akan kembali sekolah di pendidi kan non formal	174,43 9,900	Kelura han	32 satuan pendidik an yang dibina terkait bantuan bagi ATS yang akan kembali sekolah di pendidi kan non formal	174,43 9,900	Kelura han	32 satuan pendidi kan yang dibina terkait bantuan bagi ATS yang akan kembali sekolah di pendidi kan non formal	174,439, 900	Keluraha n					
16	Meningkatn ya ATS mendapat pelatihan	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas tenaga kerja/Pelaksa naan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi/P roses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi bagi pencari kerja berdasarkan unit kompetensi	Fasilitasi pelatihan, magang, workshop, training melalui kerjasama dengan DUDI atau SMK / BLK sesuai minat ATS yang terdaftar di PKBM/SKB	100 % ATS mendapat pelatihan sesuai minat bakat mereka.	100 % ATS mendap at pelatiha n sesuai minat bakat mereka.	644.0 45.40 0	Kota Makas sar	100 % ATS mendap at pelatiha n sesuai minat bakat mereka .	644.04 5.400	Kota Makas sar	100 % ATS mendap at pelatiha n sesuai minat bakat mereka.	644.04 5.400	Kota Makas sar	100 % ATS mendap at pelatiha n sesuai minat bakat mereka .	644.045. 400	Kota Makassa r	AP BD	Dinas Ketena gakerj aan			

NO	Sasaran	Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	Uraian Kegiatan	Indikator/ta rget capaian 2026 - 2029)	Target Kinerja dan Pagu															Su mb er dan a	Penan ggung jawab
		Program /Kegiatan /Sub Kegiatan			Tahun 2025			Tahun 2026			Tahun 2027			Tahun 2028			Tahun 2029				
					Target capaian (satuan/ %)	Pagu (Esti masi dana)	Lokasi	Target capaian (satuan/ %)	Pagu (Estim asi dana)	Lokasi	Target capaian (satuan/ %)	Pagu (Estim asi dana)	Lokasi	Target capaian (satuan/ %)	Pagu (Estim asi dana)	Lokasi	Target capaian (satuan /%)	Pagu (Estimas i dana)	Lokasi		
17	Meningkatn ya ketersediaa n busbagi ATS yang kembali bersekolah	Program penyelenggar aan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)/Peny ediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang danatau Barang Antar Kota dalam Satu Daerah KabupatenKo ta/Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang danatau Barang Antar Kota dalam Satu Daerah KabupatenKo ta	Fasilitasi bus antar jemput sekolah	100% ATS yang tidak memiliki sarana transportasi difasilitasi bus sekolah sehingga dapat kembali bersekolah	100% ATS yang tidak memilik i sarana transport asi difasilita si bus sekolah sehingga dapat kembali bersekol ah	2.047 .488. 300,	Kota Makas sar	100% ATS yang tidak memili ki sarana transpo rtasi difasilit asi bus sekolah sehingg a dapat kembali berseko lah	2.047.4 88.300,	Kota Makas sar	100% ATS yang tidak memilik i sarana transport asi difasilita si bus sekolah sehingga dapat kembali bersekol ah	2.047. 488.30 0,	Kota Makas sar	100% ATS yang tidak memili ki sarana transpo rtasi difasilit asi bus sekolah sehingg a dapat kembali berseko lah	2.047. 488.30 0,	Kota Makas sar	100% ATS yang tidak memili ki sarana transpo rtasi difasilit asi bus sekolah sehingg a dapat kembali berseko lah	2.047.48 8.300,	Kota Makassa r	AP BD	Dinas Perhub ungan

NO	Sasaran	Nomenklatur Urusan Kabupaten/K ota	Uraian Kegiatan	Indikator/ta rget capaian 2026 - 2029)	Target Kinerja dan Pagu															Su mb er dan a	Penan ggung jawab
		Tahun 2025			Tahun 2026			Tahun 2027			Tahun 2028			Tahun 2029							
		Target capaian (satuan/ %)			Pagu (Esti masi dana)	Lokasi	Target capaian (satuan/ %)	Pagu (Estim asi dana)	Lokasi	Target capaian (satuan/ %)	Pagu (Estim asi dana)	Lokasi	Target capaian (satuan/ %)	Pagu (Estim asi dana)	Lokasi	Target capaian (satuan /%)	Pagu (Estimas i dana)	Lokasi			
C	Tata Kelola																				
18	Meningkatn ya dokumen perencanaa n daerah dan dokumen perangkat daerah yang terintegrasi PPATS	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pembangunan daerah/Koord inasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia/Koo rdinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia	Koordinasi dan sinkronisasi Renstra/Renja dengan RPJMD dan RKPD yang terintegrasi PPATS Penyusunan Peraturan Walikota tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Penanganan ATS Sosialisasi Perwali tentang PPATS kepada OPD, kecamatan, kelurahan dan seluruh stakeholder terkait	100% dokumen perencanaa n daerah dan dokumen perencanaa n perangkat daerah terkait terintegrasi PPATS	100% dokume n perenca naan daerah dan dokume n perenca naan perangk at daerah terkait terinteg rasi PPATS	633.2 31.20 0	Kota Makas sar	100% dokum en perenca naan daerah dan dokum en perenca naan perang kat daerah terkait terinteg rasi PPATS	633.23 1.200	Kota Makas sar	100% dokume n perenca naan daerah dan dokume n perenca naan perangk at daerah terkait terinteg rasi PPATS	633.23 1.200	Kota Makas sar	100% dokum en perenca naan daerah dan dokum en perenca naan perang kat daerah terkait terinteg rasi PPATS	633.23 1.200	Kota Makas sar	100% dokum en perenca naan daerah dan dokum en perenca naan perang kat daerah terkait terinteg rasi PPATS	633.23 1.200	Kota Makassa r	AP BD II	Bappe da

NO	Sasaran	Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	Uraian Kegiatan	Indikator/ta rget capaian 2026 - 2029)	Target Kinerja dan Pagu															Su mb er dan a	Penan ggung jawab
		Program /Kegiatan /Sub Kegiatan			Tahun 2025			Tahun 2026			Tahun 2027			Tahun 2028			Tahun 2029				
					Target capaian (satuan/ %)	Pagu (Esti masi dana)	Lokasi	Target capaian (satuan/ %)	Pagu (Estim asi dana)	Lokasi	Target capaian (satuan/ %)	Pagu (Estim asi dana)	Lokasi	Target capaian (satuan/ %)	Pagu (Estim asi dana)	Lokasi	Target capaian (satuan/ %)	Pagu (Estimas i dana)	Lokasi		
19		Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pembangunan daerah/Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia/Asistensi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah bidang pembangunan manusia	Koordinasi dan asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah terkait yang mendukung PPATS dan memastikan dokumen perencanaan tersebut terintegrasi PPATS	100 % OPD terkait menyusun Renstra, Renja, RKA dan DPA terintegrasi PPATS	100 % OPD terkait menyusun Renstra, Renja, RKA dan DPA terintegrasi PPATS	83.155.500	Kota Makassar	100 % OPD terkait menyusun Renstra, Renja, RKA dan DPA terintegrasi PPATS	83.155.500	Kota Makassar	100 % OPD terkait menyusun Renstra, Renja, RKA dan DPA terintegrasi PPATS	83.155.500	Kota Makassar	100 % OPD terkait menyusun Renstra, Renja, RKA dan DPA terintegrasi PPATS	83.155.500	Kota Makassar	100 % OPD terkait menyusun Renstra, Renja, RKA dan DPA terintegrasi PPATS	83.155.500	Kota Makassar	AP BD	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

NO	Sasaran	Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	Uraian Kegiatan	Indikator/ta rget capaian 2026 - 2029)	Target Kinerja dan Pagu															Su mb er dan a	Penan ggung jawab
		Tahun 2025			Tahun 2026			Tahun 2027			Tahun 2028			Tahun 2029							
		Target capaian (satuan/ %)			Pagu (Estimasi dana)	Lokasi	Target capaian (satuan/ %)	Pagu (Estimasi dana)	Lokasi	Target capaian (satuan/ %)	Pagu (Estimasi dana)	Lokasi	Target capaian (satuan/ %)	Pagu (Estimasi dana)	Lokasi	Target capaian (satuan/ %)	Pagu (Estimasi dana)	Lokasi			
20	Meningkatnya pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi kegiatan dan anggaran yang mendukung PPATS	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pembangunan daerah/Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia/Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Memantau dan mengevaluasi realisasi kinerja dan anggaran kegiatan yang mendukung PPATS Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PPATS) Workshop pengembalian Anak tidak Sekolah (ATS)	100 % target kinerja dan anggaran kegiatan yang mendukung PPATS tercapai	100 % target kinerja dan anggaran kegiatan yang mendukung PPATS tercapai	198.866.300	Kota Makassar	100 % target kinerja dan anggaran kegiatan yang mendukung PPATS tercapai	198.866.300	Kota Makassar	100 % target kinerja dan anggaran kegiatan yang mendukung PPATS tercapai	198.866.300	Kota Makassar	100 % target kinerja dan anggaran kegiatan yang mendukung PPATS tercapai	198.866.300	Kota Makassar	APBD	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah			

NO	Sasaran	Nomenklatur Urusan Kabupaten/K ota	Uraian Kegiatan	Indikator/ta rget capaian 2026 - 2029)	Target Kinerja dan Pagu															Su mb er dan a	Penan ggung jawab
		Tahun 2025			Tahun 2026			Tahun 2027			Tahun 2028			Tahun 2029							
		Target capaian (satuan/ %)			Pagu (Esti masi dana)	Lokasi	Target capaian (satuan/ %)	Pagu (Estim asi dana)	Lokasi	Target capaian (satuan/ %)	Pagu (Estim asi dana)	Lokasi	Target capaian (satuan/ %)	Pagu (Estim asi dana)	Lokasi	Target capaian (satuan/ %)	Pagu (Estimas i dana)	Lokasi			
21		Program Pemerintahan dan Kesejahteraa n Rakyat/Pelak sanaan Kebijakan Kesejahteraa n Ralyat/Pelaks anaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraa n Rakyat	Melaksanakan kebijakan PPATS dan evaluasi terhadap capaian kinerja terkait PPATS Melakukan sosialisasi pencanangan penanganan ATS Melakukan rapat koodinasi penetapan Tim Teknis Penanganan ATS pada semua level. Melakukan pemetaan data ATS dalam sistem informasi yang sudah ada. Melakukan konsultasi publik tentang penetapan prioritas ATS. Bekerjasama dengan lembaga kemasyarakatan (PKK dan Disdik) untuk memberikan Bekerjasama dengan LPM dan RT/RW untuk mencegah, menangani dan memantau setiap warga dipastikan menyelesaikan pendidikan wajib belaiar 13 tahun.	100% kebijakan PPATS dilaksana n di tingkat kelurahan dan kinerja tercapai	100% kebijaka n PPATS dilaksa nakan di tingkat kelurah an dan kinerja tercapai	219,7 67,59 6	Kelura han	100% kebijaka n PPATS dilaksa nakan di tingkat kelurah an dan kinerja tercapai	219,76 7,596	Kelura han	100% kebijaka n PPATS dilaksa nakan di tingkat kelurah an dan kinerja tercapai	219,76 7,596	Kelura han	100% kebijak an PPATS dilaksa nakan di tingkat kelurah an dan kinerja tercapai	219,767, 596	Keluraha n	AP BD	Bagian Pembe rdayaa n Masya rakat			

Lampiran II

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI DAERAH PPATS 2025 - 2029

No	Sasaran (Strategis/P rogram/ Kegiatan)	Indikator Kinerja (Program/ Kegiatan)	Target Kinerja				Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Aktivitas yang Direncanakan akan Dilakukan untuk Mencapai Target Kinerja	Status / Progres Pelaksanaan	Angg aran (Rp)	Realisa si (Rp)	% Realis asi Angga ran
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A. PENCEGAHAN													
1	Menigkatnya satuan pendidikan berpartisipasi secara aktif dalam PPTAS	Persentasi (%) satuan pendidikan SD/MI, SMP/Mts dan SM/MA yang berpartisipasi secara aktif											
2	Meningkatnya satuan pendidikan dalam mengidentifikasi anak beresiko putus sekolah tetap bersekolah pada satuan pendidikan	Persentasi (%) anak teridentifikasi beresiko putus sekolah tetap bersekolah pada satuan pendidikan											

		formal dan non formal											
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat /organisasi dalam kampanye PPATS	Persentase (%) organisasi yang teridentifikasi terlibat dalam PPATS.											
B. PENANGANAN													
1	Meningkatnya Jumlah kelurahan memiliki data ATS	Persentase (%) kelurahan yang memiliki data ATS											
2	Meningkatnya verifikasi dan validasi data ATS melalui Pusdatin (data lintas sektor)	Persentase (%) Data ATS terverifikasi dan validasi by system											



3	Meningkatnya ATS teridentifikasi dan kembali kelayanan pendidikan (bersekolah)	Persentasi (%) ATS teridentifikasi dan terkonfirmasi kembali ke layanan pendidikan dan menyelesaikan pendidikan 12 tahun											
4	Meningkatnya ATS kategori berhadapan dengan Hukum kembali ke layanan pendidikan	Persentasi (%) ATS berhadapan dengan hukum kembali ke layanan pendidikan dan menyelesaikan pendidikan 12 tahun											



5	Meningkatnya ATS/ABPS kategori akibat Kekerasan kembali dan bertahan pada layanan pendidikan.	Persentasi (%) ATS dan ABPS kategori akibat kekerasan kembali dan bertahan pada satuan ayanan pendidikan dan menyelesaikan pendidikan 12 tahun											
6	Meningkatnya ATS kategori anak jalanan kembali kelayanan pendidikan	Persentasi (%) ATS kategori anak jalanan kembali ke layanan pendidikan dan menyelesaikan pendidikan 12 tahun											



7	Meningkatkan ya ATS kategori pernikahan anak kembali kelayanan pendidikan	Persentase (%) ATS kategori pernikahan anak ke layanan pendidikan dan menyelesaikan pendidikan 12 tahun											
8	Meningkatkan ya pendidikan warga yang ditamatkan sampai pendidikan menengah (12 tahun), usia 19 – 24 tahun)	Persentase (%) warga yang teridentifikasi kelompok usia 19 – 24 tahun kembali ke layanan pendidikan non formal dan menyelesaikan pendidikan 12 tahun											

9	Meningkatnya ATS mendapat pelatihan	Persentasi (%) ATS mendapat pelatihan sesuai minat bakat mereka.											
C. TATA KELOLA													
1	Mendorong sinkronisasi kebijakan dan peraturan	Persentasi (%) regulasi PPATS											
2	Meningkatnya OPD terkait dalam melakukan perencanaan dan anggaran PPATS	Persentasi (%) OPD memiliki Renstra dan Renja terintegrasi PPATS											
3	Meningkatnya mekanisme koordinasi tim PPATS	Persentasi (%) tim PPATS terbentuk pada tingkat kota dan kelurahan											

Lampiran III

Daftar Istilah/Glosarium

Singkatan	Kepanjangan	Pengertian / Penjelasan
ABH	Anak Berhadapan dengan Hukum	Anak yang berkonflik, menjadi korban, atau menjadi saksi tindak pidana dalam proses peradilan.
Anjal	Anak Jalanan	Anak yang menghabiskan sebagian besar waktu hidupnya untuk bekerja dan/atau berkeliaran di jalanan.
Antar	Anak Terlantar	Anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya (fisik, psikis, sosial) karena kelalaian atau ketiadaan orang tua/wali.
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah untuk membiayai program dan kegiatan daerah, ditetapkan melalui Peraturan Daerah.
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional	Rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang disetujui DPR dan ditetapkan dengan Undang-Undang untuk kemakmuran rakyat.
APM	Angka Partisipasi Murni	Proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tertentu. Dengan kata lain, proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap seluruh anak pada kelompok usia tersebut.
APS	Anak Partisipasi Sekolah	APS adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk kelompok umur tertentu. Angka partisipasi sekolah (APS) dapat menunjukkan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada satu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai.
ATS	Anak Tidak Sekolah	Anak usia sekolah (7-18 tahun) yang tidak terdaftar dan tidak sedang menempuh pendidikan formal dan Non-Formal di

		jenjang pendidikan manapun saat ini yaitu ATS dengan kategori Belum Pernah Bersekolah (BPB yaitu anak yang belum pernah terdaftar sama sekali pada satuan jenjang pendidikan), Putus Sekolah (PS yaitu anak yang pernah sekolah pada satuan Pendidikan namun putus sekolah sehingga tidak menyelesaikan pendidikannya), Lulus Tidak Melanjutkan (LTM yaitu anak yang telah lulus pada satuan Pendidikan dan tidak melanjutkan Pendidikan ke yang lebih tinggi sehingga belum menyelesaikan Pendidikan menengah 12 tahun)
BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Lembaga perencana pembangunan nasional yang bertanggung jawab kepada Presiden untuk merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan.
BAPPEDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan pemerintah daerah yang bertugas menyusun, mengendalikan, dan mengevaluasi rencana pembangunan daerah (RPJMD, RKPD).
BOS	Bantuan Operasional Sekolah	Bantuan dana dari pemerintah pusat untuk membiayai operasional sekolah, menjamin akses dan layanan pendidikan dasar bermutu.
BSM	Bantuan Siswa Miskin	Bantuan tunai pemerintah untuk siswa miskin/rentan miskin, ditujukan mengurangi beban biaya personal pendidikan dan mencegah putus sekolah.
BPS	Biro Pusat Statistik	Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas menyediakan data statistik nasional (sosial, ekonomi, dan sensus) bagi pemerintah dan publik.
DAK	Dana Alokasi Khusus	Dana APBN untuk daerah tertentu guna mendanai kegiatan fisik atau non-fisik spesifik sesuai dengan prioritas pembangunan nasional.
DAPODIK	Data Pokok Pendidikan	Sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Nasional yang memuat data satuan Pendidikan data sekolah, peserta didik (siswa), Pendidik dan tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana Pendidikan yang diperbaharui secara terus menerus secara online.

DO	Drop Out	Penghentian pendidikan formal oleh siswa sebelum menyelesaikan jenjang yang sedang dijalani, seringkali karena masalah ekonomi/sosial.
DIKNAS	Dinas Pendidikan	Lembaga pemerintah daerah yang mengelola, menyelenggarakan, dan mengawasi sistem pendidikan formal dan non-formal di wilayahnya.
DINSOS	Dinas Sosial	Lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab mengelola urusan perlindungan sosial, rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat miskin/rentan.
DISKOMINFO	Dinas Komunikasi dan Informasi	Lembaga daerah yang mengelola komunikasi, informatika, statistik, persandian, dan menjamin keterbukaan informasi publik.
DISTRNAKER	Dinas Tenaga Kerja	Lembaga daerah yang mengelola penempatan, pelatihan, perlindungan tenaga kerja, pengawasan K3, dan hubungan industrial di wilayahnya.
DPPPA (DP3A)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Lembaga daerah yang bertanggung jawab atas pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender, serta perlindungan khusus anak dan korban kekerasan.
EMIS	Education Management Information System	Sistem basis data terpusat Kementerian Agama untuk mengelola data lembaga, siswa, dan guru Madrasah serta Pendidikan Keagamaan lainnya.
GKB	Gerakan Kembali Bersekolah	Gerakan moral daerah untuk mengidentifikasi dan memfasilitasi anak putus sekolah agar kembali menempuh pendidikan formal atau non-formal.
HLS	Harapan Lama Sekolah	Rata-rata lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.
IPM	Indeks Pembangunan	Indikator komposit untuk mengukur keberhasilan pembangunan wilayah dari

	Manusia	dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.
KEMENAG	Kementerian Agama	Kementerian yang mengurus urusan agama, pendidikan keagamaan Madrasah/Pesantren), kerukunan antarumat beragama
KEMENDIKDASMEN	Kementerian Pendidikan Dasar, dan Menengah	Kementerian yang mengurus seluruh jenjang pendidikan formal, mulai dari PAUD, Pendidikan Dasar, hingga Pendidikan Menengah di Indonesia.
KEMENDAGRI	Kementerian Dalam Negeri	Kementerian yang mengelola pemerintahan daerah, politik dalam negeri, kependudukan, dan ketentraman/ketertiban umum di Indonesia.
KIE	Komunikasi Informasi Edukasi	Strategi mengubah perilaku masyarakat melalui penyampaian pesan yang terstruktur, mencakup Komunikasi, Informasi, dan Edukasi.
KHA	Konvensi Hak Anak	Perjanjian PBB yang menetapkan standar minimum hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya bagi semua anak di bawah 18 tahun.
KK	Kartu Keluarga	Dokumen resmi yang memuat data identitas kepala keluarga dan seluruh anggota keluarga, sebagai dasar administrasi kependudukan.
KIP	Kartu Indonesia Pintar	Kartu identitas yang diberikan kepada anak usia sekolah dari keluarga miskin dan rentan untuk mengakses bantuan tunai pendidikan (PIP).
KKS	Kartu Keluarga Sejahtera	Kartu identitas keluarga miskin dari DTKS yang digunakan untuk mengakses berbagai program bantuan sosial tunai dan non-tunai pemerintah.
LKP	Lembaga Kursus dan Pelatihan	Lembaga pendidikan non-formal yang memberikan keterampilan praktis dan kejuruan kepada masyarakat agar siap kerja atau berwirausaha.
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat	Organisasi nirlaba yang didirikan masyarakat untuk bergerak di berbagai isu publik, melayani, mengadvokasi, dan mengkritisi kebijakan pemerintah.
MA	Madrasah Aliyah	Sekolah menengah atas (setingkat SMA) di bawah Kemenag yang menekankan pada

		ilmu umum dan pengetahuan agama Islam yang mendalam.
MOU	Memorandum of Understanding - <i>Perjanjian Kesepahaman</i>	Dokumen formal non-mengikat yang menyatakan niat bersama para pihak untuk menjalin kerja sama atau kesepakatan awal.
NIK	Nomor Induk Kependudukan	Nomor identitas tunggal, unik, dan seumur hidup yang diberikan kepada setiap penduduk Indonesia untuk semua keperluan dokumen dan layanan publik.
OPD	Organisasi Perangkat Daerah	Unit kerja Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan program pembangunan sesuai kewenangan daerah.
PPATS	Percegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah	Upaya terpadu untuk mencegah anak putus sekolah dan mengembalikan anak yang sudah tidak sekolah ke pendidikan formal atau non-formal.
PBB	Perserikatan Bangsa Bangsa	Organisasi internasional global yang didirikan untuk menjaga perdamaian, mengembangkan hubungan persahabatan, dan memajukan kerja sama antarnegara.
PERDA	Peraturan Daerah	Peraturan perundang-undangan yang dibentuk DPRD dan Kepala Daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan menampung kondisi lokal.
PIK	Pusat Informasi dan Konseling	Wadah remaja/mahasiswa untuk mendapatkan informasi dan konseling tentang kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, dan kehidupan berencana.
PIP	Program Indonesia Pintar	Program bantuan tunai pendidikan bagi anak usia sekolah dari keluarga miskin atau rentan untuk membiayai kebutuhan sekolah.
PMU	Pendidikan Menengah Universal	Program pemerintah yang memastikan semua anak usia 15–18 tahun memiliki akses dan kesempatan menamatkan pendidikan setara SMA/SMK.
PKBM	Pusat Kegiatan Belajar Mengajar	Lembaga pendidikan non-formal yang menyelenggarakan program kesetaraan (Paket A, B, C) dan pelatihan keterampilan

		bagi masyarakat.
PKH	Program Keluarga Sejahtera	Program peningkatan taraf hidup melalui klasifikasi tahapan status kesejahteraan keluarga sebagai dasar intervensi bantuan sosial.
POKJA	Kelompok Kerja	Tim khusus sementara yang dibentuk untuk menyelesaikan tugas, menganalisis masalah, merumuskan kebijakan, atau menyiapkan laporan spesifik.
PPN/Bappenas	Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Lembaga kementerian yang merumuskan dan mengoordinasikan perencanaan pembangunan nasional jangka panjang, menengah, dan tahunan.
PP & KB	Pemberdayaan Perempuan & Keluarga Berencana	Upaya meningkatkan status, posisi, peran, dan kapasitas perempuan dalam pengambilan keputusan dan akses sumber daya pembangunan.
RRLS	Rata Rata Lama Sekolah	Indikator yang menunjukkan jumlah tahun rata-rata yang dihabiskan penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menempuh pendidikan formal. Perhitungan ini menjadi salah satu dalam penetapan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
RAD	Rencana Aksi Daerah	Dokumen perencanaan implementatif daerah yang merinci program, kegiatan, dan target tahunan untuk melaksanakan kebijakan prioritas nasional/daerah.
RENJA	Rencana Kerja	Dokumen perencanaan tahunan yang merinci program, kegiatan, dan anggaran yang akan dilaksanakan organisasi atau unit kerja.
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	Dokumen perencanaan pembangunan 5 tahun di daerah, memuat visi, misi, dan program kepala daerah terpilih sebagai pedoman seluruh SKPD.
RKA	Rencana Kerja Anggaran	Dokumen yang merinci target kinerja, program, kegiatan, dan alokasi biaya yang dibutuhkan oleh suatu unit kerja dalam satu tahun anggaran.
SD	Sekolah Dasar	Jenjang pendidikan dasar formal 6 tahun bagi anak usia 7-12 tahun, sebagai fondasi untuk

		melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP).
SPM	Standard Pelajaran Minimal	Ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal
SDGs	<i>Sustainable Development Goals</i>	17 tujuan global PBB untuk dicapai pada 2030, fokus pada pengentasan kemiskinan, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan universal.
SISDIKNAS	Sistim Pendidikan Nasional	Kerangka dasar hukum dan struktural yang mengatur keseluruhan komponen dan jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal di Indonesia.
SIAK	Sistim Informasi Administrasi Kependudukan	Sistem terpusat berbasis TI yang mengelola data kependudukan (biodata dan pencatatan sipil) secara <i>online</i> dan terintegrasi di seluruh Indonesia.
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Unit kerja pelaksana fungsi eksekutif spesifik (dinas, badan) di pemerintah daerah, bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah.
SKB	Sanggar Kegiatan Belajar	UPTD Dinas Pendidikan yang menyelenggarakan dan memfasilitasi program pendidikan non-formal, kesetaraan (Paket A,B,C), dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat.
SMA/SMK	Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Kejuruan	Sekolah menengah yang menekankan pada ilmu pengetahuan umum dan mempersiapkan siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi (universitas).
SMP	Sekolah Menengah Pertama	Jenjang pendidikan dasar lanjutan formal 3 tahun bagi anak usia 12-15 tahun, sebagai jembatan menuju pendidikan menengah (SMA/SMK).
SOP	<i>Standard Operational Prosedure</i>	Instruksi tertulis yang baku dan terperinci, mengatur langkah-langkah pelaksanaan kegiatan rutin untuk menjamin konsistensi dan efisiensi kerja.
SRA	Sekolah Ramah Anak	Sekolah yang memenuhi hak anak, melindungi dari kekerasan/diskriminasi, serta

		menjamin kepentingan terbaik anak dalam seluruh proses pendidikan.
STRANAS	Strategi Nasional	Serangkaian kebijakan, rencana aksi, dan prioritas Pemerintah Pusat untuk mengarahkan sumber daya guna mencapai tujuan pembangunan jangka panjang.
SUSENAS	Survei Sosial Ekonomi Nasional	Survei rumah tangga skala besar BPS untuk mengumpulkan data sosial, ekonomi, demografi penduduk, dan menjadi dasar perhitungan indikator kesejahteraan nasional.
TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	17 tujuan pembangunan global PBB yang disepakati untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet, dan menjamin kesejahteraan bagi semua pada tahun 2030.
TPT	Tingkat Pendidikan Terakhir	Jenjang pendidikan formal tertinggi yang diselesaikan seseorang, dibuktikan dengan ijazah, dan digunakan sebagai indikator status sosial ekonomi.
UNICEF	<i>United Nations Children's Funds</i>	Badan PBB yang bekerja secara global untuk menyediakan bantuan kemanusiaan, pembangunan, dan mempromosikan hak-hak anak di seluruh dunia.
USB	Unit Sekolah Baru	Proyek pembangunan fisik sekolah baru yang didirikan di lokasi belum terlayani, untuk memenuhi kebutuhan akses dan pemerataan pendidikan.
UUD	Undang Undang Dasar	Hukum dasar tertulis tertinggi, fondasi konstitusional negara yang mengatur bentuk, tujuan, lembaga, dan hak dasar warga negara.
Verval ATS	Verifikasi dan Validasi Anak Tidak Sekolah	Verifikasi dilakukan untuk memastikan apakah anak tersebut yang terdata pada sistem masih terdaftar pada layanan Pendidikan atau tidak sedang validasi adalah memastikan hasil verifikasi anak tidak sekolah tersebut tervalidasi pada sistem sehingga terbaca jumlah ATS
WAJAR DIKDAS	Wajib Belajar Pendidikan Dasar	Program wajib 9 tahun (SD dan SMP) bagi warga negara usia 7-15 tahun, dijamin gratis oleh pemerintah.



Lampiran IV

TIM PENYUSUN
RENCANA AKSI DAERAH (RAD)
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH (PPATS0
KOTA MAKASSAR 2025 – 2029

Pengarah
H. DAHYAL, S.Sos, M.Si
Kepala Bappeda

Penanggung Jawab
ULFAH ICHWANI ACHMAD, S.T
Plt. Kabid PPM Bappeda

Penyusun
Pebriani
Masriani Mahyuddin
Andi Samsudarwan Sanusi
Suryanto

Kontributor dan Reviu Dokumen
Perwakilan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar

Tenaga Ahli Pemerintah Kota	Bappeda	Dinas Pendidikan
Kementerian Agama	Dinas Sosial	DP3A
Biro Pusat Statistik	DPPKB	Dinas Catatan Sipil
Dinas Tenaga Kerja	Dinas Perhubungan	Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM)
Dinas Perpustakaan	Dinas Kominfo	Tim Fungsional Bappeda
Forum PKBM	Tim Kecamatan	Tim Kelurahan

Editor dan layout RAD
Andi Samsudarwan Sanusi

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2025). Kota Makassar dalam Angka 2025 (Vol. 25). <https://www.bps.go.id>.
- Badan Pusat Statistik. (2025). Statistik Pendidikan Sulawesi Selatan 2024 (Vol. 10). <https://www.bps.go.id>.
- Badan Pusat Statistik. (2025). Statistik Sosial Provinsi Sulawesi Selatan 2024 (Vol. 7). <https://www.bps.go.id>.
- Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri. (2025). Surat Edaran Nomor 400.1.7/13061/BANGDA tentang Panduan Perencanaan dan Penganggaran Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS). <https://www.kemendagri.go.id>.
- Kementerian Dalam Negeri. (2025). Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. <https://www.kemendagri.go.id>.
- Kim, C., Mirusmonov, M., & Lee, I. (2010). An Empirical Examination of Factors Influencing the Intention to Use Mobile Payment. *Computers in Human Behavior*, 26(3), 310-322. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2009.10.013>.
- Kota Makassar. (2025). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Periode 2025–2029. <https://makassarkota.go.id>.
- Pemerintah Indonesia. (2020). Strategi Nasional dan Panduan Petunjuk Stanas. <https://www.bappenas.go.id>.
- Provinsi Sulawesi Selatan. (2025). Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029. <https://sulselprov.go.id/>.
- Provinsi Sulawesi Selatan. (2025). Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Selatan 2024. Vol.10. <https://sulselprov.go.id/>.
- Pusat Standar & Kebijakan Pendidikan. (2024). Buku Saku Indikator Prioritas Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. <https://www.kemdikbud.go.id>.
- Putra, D. K. S. (2019). Political Social Responsibility: Dinamika Komunikasi Politik Dialogis. Prenadamedia.
- Renstra OPD Dinas Pendidikan, DP3A, Dinsos, Capil. (2025). Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025–2029. Kota Makassar. <https://makassarkota.go.id>.
- Wibowo, B. (2022). Peran Teknologi dalam Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Modern*, 10(2), 112-125.



PEMERINTAH
KOTA MAKASSAR



RENCANA AKSI DAERAH

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH

KOTA MAKASSAR TAHUN 2025 - 2029